

Analisis sektor perekonomian basis dan progresif di kabupaten bogor

Arbi Setiyawan

Abstract

Penentuan prioritas pengembangan sektor ekonomi perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar daerah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang dan dapat bersaing dengan daerah lain. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penopang Daerah Khusus Ibukota Jakarta semestinya sudah mempunyai sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi. Setiap daerah/ wilayah mempunyai sektor ekonomi prioritas masing-masing dan kemungkinan berbeda dengan daerah lain. Untuk mengetahui sektor prioritas dapat digunakan teknis analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Teknis analisis *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis. Sedangkan teknik analisis *Shift Share* dapat digunakan untuk mengetahui sektor progresif dan non progresif. Dengan menggunakan kedua teknik analisis tersebut dan dilakukan penyilangan (*overlay*), penelitian ini dapat mengetahui sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) sektor PDRB yang merupakan sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi. Sedangkan sektor basis ada 4 sektor dan sektor yang progresif ada 2 sektor.

Keywords

Pdrb; pembangunan daerah; location quotient; economic analysis; shift share

Analisis sektor perekonomian basis dan progresif di kabupaten bogor

Arbi Setiyawan

National Statistics Training Center, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Email: arbies@bps.go.id

Abstrak

Penentuan prioritas pengembangan sektor ekonomi perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar daerah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang dan dapat bersaing dengan daerah lain. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penopang Daerah Khusus Ibukota Jakarta semestinya sudah mempunyai sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi. Setiap daerah/ wilayah mempunyai sektor ekonomi prioritas masing-masing dan kemungkinan berbeda dengan daerah lain. Untuk mengetahui sektor prioritas dapat digunakan teknis analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Teknis analisis *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis. Sedangkan teknik analisis *Shift Share* dapat digunakan untuk mengetahui sektor progresif dan non progresif. Dengan menggunakan kedua teknik analisis tersebut dan dilakukan penyilangan (*overlay*), penelitian ini dapat mengetahui sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) sektor PDRB yang merupakan sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi. Sedangkan sektor basis ada 4 sektor dan sektor yang progresif ada 2 sektor.

Kata Kunci: PDRB; pembangunan daerah; location quotient; economic analysis; shift share

Analysis of base and progressive economics sector in bogor regency

Abstract

Regional Government should have priority in economics sector to develop and to compete with other regions. Bogor Regency, a region supporting Jakarta, also should have priority in economics development sector. Each region has its own priority in economic sector and may be different from other regions. To find out the priority sectors, technical analysis of Location Quotient (LQ) and Shift Share can be implemented. LQ analysis can be used to find out the base and non-base sectors. Shift Share analysis technique can be used to find out progressive and non progressive sectors. By using these techniques and the overlays of both techniques, this study found that the base and progressive sectors in Bogor Regency are the Mining and Excavation Sector and Construction Sector. There are four sectors which are classified as base sector and two sector classified as progressive sector.

Keywords: PDRB; regional development; location quotient; economic analysis; shift share

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian atau pembangunan daerah pada suatu wilayah tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian. Pemerintah Daerah perlu memilih prioritas pengembangan sektor-sektor pilihan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Bogor semestinya sudah memiliki prioritas pembangunan pada sektor ekonomi tertentu yang mempunyai potensi di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya mendorong dan menarik perkembangan sektor perekonomian lainnya, Adytia Riantika (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi basis dan progresif di Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan indikator ekonomi makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penentuan sektor ekonomi basis dan progresif menjadi penting dalam penentuan program dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor untuk mendorong pembangunan wilayah secara utuh dan agar mampu bersaing dengan wilayah/ daerah lain, Adytia Riantika (2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan data PDRB Kabupaten Bogor tahun 2010, 2015 dan 2016 dan PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dan 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode statistik deskriptif dan menggunakan teknik analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA).

Analisis deskriptif

“Descriptive statistics refers to the collection, presentation, description, analysis and interpretation of data collection. Its purpose is to summarize these from a set of values. Descriptive statistics is the method of obtaining data set conclusions about themselves”, Pe´ rez-Vicentea & Ruizb (2009).

Location quotient

Location Quotient (LQ) dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis kegiatan, kapasitas ekspor perekonomian wilayah dan tingkat kecukupan barang/jasa produksi lokal. LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor PDRB di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share* output sektor tertentu di kabupaten/kota dan *share* output sektor tertentu di provinsi atau nasional, A.K., Alsharikh, Alasmal, & Alghamdi, (2015) (EMSI, 2018)

Formula LQ:

$$LQ = (Si/S) / (Ni/N)$$

Dimana:

LQ = Nilai Location Quotient

Si = PDRB Sektor i di Kabupaten Bogor

S = PDRB total di Kabupaten Bogor

Ni = PDRB Sektor i di Provinsi Jawa Barat

N = PDRB total di Provinsi Jawa Barat

Apabila LQ suatu sektor lebih besar dari 1 (satu) ($LQ > 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya bila LQ suatu sektor kurang dari satu ($LQ < 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Sedangkan jika LQ suatu sektor = 1, maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, Usman (2015).

Shift share analysis

Shift Share Analysis digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Dalam shift share analysis, pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bogor ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: Komponen *Regional Share* (S), Komponen *Proportional Shift* (PS), dan Komponen *Regional Shift* (RS), Khusaini (2015).

Komponen *Regional Share* (S) digunakan untuk mengetahui perubahan produksi Kabupaten Bogor yang disebabkan oleh perubahan produksi Provinsi Jawa Barat. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi provinsi/nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian sektoral atau wilayah.

Komponen *Proportional Shift* (PS) digunakan untuk melihat peranan pertumbuhan ekonomi nasional atau Jawa Barat terhadap peranan pertumbuhan sektoral Kabupaten Bogor. Komponen *proportional shift* (PS) timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (seperti kebijakan perpajakan dan subsidi) serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

Komponen *Regional Shift* (RS) digunakan untuk melihat peranan pertumbuhan sektor tertentu di Kabupaten Bogor terhadap pertumbuhan sektor tertentu di Jawa Barat. Komponen regional shift (RS) timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB/kesempatan kerja Kabupaten Bogor dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan Kabupaten Bogor dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regionalnya.

Apabila $RS \geq 0$, sektor ekonomi dimasukkan ke dalam kelompok progresif (maju). Sementara, jika $RS < 0$ menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tergolong pertumbuhan yang non-progresif (lambat), Indrayansyah; Mulatsih; Asmara (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor basis perekonomian kabupaten bogor

Salah satu cara untuk menentukan sektor ekonomi basis dan sektor ekonomi bukan basis dapat dilakukan dengan menggunakan teknis analisis Location Quotient (LQ). Tabel 1 menampilkan LQ Kabupaten Bogor.

Tabel 1. *Location quotient* kabupaten bogor, 2015 – 2016

| Sektor Perekonomian (1) | <i>Location Quotient (LQ)</i> | |
|--|-------------------------------|-------------|
| | 2015 (2) | 2016 (3) |
| SEKTOR PRIMER | 0,81 | 0,78 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,67 | 0,66 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1,27 | 1,24 |
| SEKTOR SEKUNDER | 1,23 | 1,24 |
| 3. Industri Pengolahan | 1,26 | 1,27 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,34 | 0,36 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,43 | 1,44 |
| 6. Konstruksi | 1,10 | 1,10 |
| SEKTOR TERSIER | 0,74 | 0,74 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,81 | 0,82 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 0,65 | 0,65 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,99 | 0,98 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 0,65 | 0,65 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,21 | 0,21 |
| 12. Real Estat | 0,73 | 0,72 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,49 | 0,49 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,80 | 0,79 |
| 15. Jasa Pendidikan | 0,71 | 0,70 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,71 | 0,72 |
| 17. Jasa lainnya | 0,88 | 0,88 |

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sektor basis Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Konstruksi ($LQ > 1$). Artinya adalah ada 4 (empat) sektor yang sudah dapat mencukupi kebutuhan sendiri di Kabupaten Bogor dan mampu untuk diekspor ke daerah lain. LQ terendah adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Hal ini mengindikasikan bahwa adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Bogor belum mampu untuk mencukupi kebutuhan di wilayahnya sendiri. Terlihat pula pada tahun 2015, sektor basis Kabupaten Bogor sama dengan tahun 2016.

Pergeseran dan peranan perekonomian kabupaten bogor

Komponen regional share (S)

Nilai Share yang positif berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Bogor 2010-2016 lebih cepat dibanding pertumbuhan rata-rata Jawa Barat. Tabel 2 kolom (5) menunjukkan sektor-sektor dalam perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat. Sektor yang tumbuh paling cepat dibandingkan dengan Jawa Barat adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Konstruksi. Sedangkan yang pertumbuhannya paling lambat namun masih berada diatas pertumbuhan Jawa Barat adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Komponen proportional shift (PS)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 yang tergolong maju karena pertumbuhannya lebih cepat dibanding perekonomian Kabupaten Bogor secara umum adalah sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Pendidikan ($PS_i > 0$). Sementara Sektor Konstruksi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pertumbuhannya paling lambat dibanding perekonomian Kabupaten Bogor secara umum ($PS_i < 0$).

Komponen regional shift (RS)

Regional Shift (RS) pada Tabel 2 kolom (7) menggambarkan bahwa sektor-sektor di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 yang mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat. Sektor tersebut diantaranya yang paling dapat bersaing ($RS_i > 0$) adalah adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1.11), Sektor Kontruksi (0.82) dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0.48). Sementara sektor yang paling tidak dapat bersaing dengan daerah lain ($RS_i < 0$) adalah Industri Pengolahan (-0.14) dan Sektor Jasa Lainnya (-0.14).

Tabel 2. Shift share analysis PDRB kabupaten bogor (Jutaan Rupiah), 2010 – 2016

| Sektor Perekonomian | PDRB | | Δ PDRB | Komponen Perubahan PDRB | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2010 | 2016 | | Share (S) | Proporsional Shift (PS) | Regional Shift (RS) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I SEKTOR PRIMER | 9.08 | 10.20 | 1.12 | 3.69 | -3.23 | 0.66 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.64 | 6.70 | 1.06 | 2.30 | -1.72 | 0.48 |
| 2. Pertambangan dan Penggalan | 3.43 | 3.49 | 0.06 | 1.40 | -1.74 | 0.40 |
| II SEKTOR SEKUNDER | 60.34 | 84.72 | 24.38 | 24.55 | -0.62 | 0.45 |
| 3. Industri Pengolahan | 53.33 | 72.47 | 19.14 | 21.70 | -2.42 | -0.14 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.03 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Konstruksi | 6.73 | 11.87 | 5.13 | 2.74 | 1.57 | 0.82 |
| III SEKTOR TERSIER | 23.51 | 37.47 | 13.96 | 9.57 | 3.53 | 0.87 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11.12 | 16.94 | 5.82 | 4.52 | 0.19 | 1.11 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 2.56 | 4.14 | 1.58 | 1.04 | 0.59 | -0.05 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.16 | 3.31 | 1.16 | 0.88 | 0.20 | 0.08 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 1.37 | 3.22 | 1.85 | 0.56 | 1.23 | 0.06 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.44 | 0.71 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | -0.01 |
| 12. Real Estat | 0.76 | 1.11 | 0.35 | 0.31 | 0.07 | -0.02 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.80 | 2.12 | 0.32 | 0.73 | -0.57 | 0.15 |
| 15. Jasa Pendidikan | 1.29 | 2.55 | 1.25 | 0.53 | 0.69 | 0.03 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.38 | 0.72 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| 17. Jasa lainnya | 1.45 | 2.39 | 0.93 | 0.59 | 0.48 | -0.14 |
| PDRB | 92.93 | 132.39 | 39.14 | 37.81 | -0.32 | 1.65 |

Keterangan: Δ PDRB = S + PS + RS**Overlay Iq dan ssa**

Analisis overlay LQ dan SSA merupakan analisis yang digunakan untuk melihat sektor ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun dari sisi pertumbuhan PDRB. Dalam hal ini, analisis overlay digunakan untuk melihat keunggulan dan potensi ekonomi di Kabupaten Bogor, dengan melakukan integrasi antara analisis LQ (aspek keunggulan komparatif) dan Analisis Shift Share (aspek keunggulan kompetitif).

Tabel 3. Overlay LQ – SSA Kabupaten Bogor, 2010 – 2016

| Sektor Perekonomian (1) | LQ (2) | RS (3) | Hasil Overlay (6) |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| I SEKTOR PRIMER | 0.78 | 0.66 | Non basis, progresif |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.66 | 0.48 | Non basis, progresif |
| 2. Pertambangan dan Penggalan | 1.24 | 0.40 | Basis, progresif |
| II SEKTOR SEKUNDER | 1.24 | 0.45 | Basis, lambat |
| 3. Industri Pengolahan | 1.27 | -0.14 | Basis, lambat |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.36 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.44 | 0.00 | Basis, lambat |
| 6. Konstruksi | 1.10 | 0.82 | Basis, progresif |
| III SEKTOR TERSIER | 0.74 | 0.87 | Non basis, progresif |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.82 | 1.11 | Non basis, progresif |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 0.65 | -0.05 | Non basis, lambat |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.98 | 0.08 | Non basis, progresif |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 0.65 | 0.06 | Non basis, progresif |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.21 | -0.01 | Non basis, lambat |
| 12. Real Estat | 0.72 | -0.02 | Non basis, lambat |
| 13. Jasa Perusahaan | 0.49 | -0.02 | Non basis, lambat |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.79 | 0.15 | Non basis, progresif |
| 15. Jasa Pendidikan | 0.70 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.72 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 17. Jasa lainnya | 0.88 | -0.14 | Non basis, lambat |

Tabel 3 menunjukkan potensi sektor ekonomi di Kabupaten Bogor, dalam arti memiliki keunggulan komparatif dan juga kompetitif, dominan yang juga progresif. Berdasarkan dua indikator dalam analisis overlay di atas, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bogor dapat dikategorikan sebagai berikut;

Kategori 1, Dominan dan progresif ($LQ > 1$ dan $RS > 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif, sekaligus memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Kelompok sektor ini dominan dalam perekonomian Kabupaten Bogor dan pertumbuhannya relatif lebih cepat dibanding daerah lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan dan Sektor Konstruksi.

Kategori 2, Dominan dan tidak progresif ($LQ > 1$ dan $RS < 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif, namun tidak memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Kelompok sektor ini dominan dalam perekonomian Kabupaten Bogor namun pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding daerah lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengadaan Air, Sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kategori 3, Tidak dominan tetapi progresif ($LQ < 1$ dan $RS > 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor-sektor non basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, tetapi memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Pertumbuhan sektor-sektor dalam kelompok ini tergolong progresif (maju). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kategori 4, Tidak dominan dan tidak progresif ($LQ < 1$ dan $RS < 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor-sektor non basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, dan juga tidak memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa lainnya.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang basis/ dominan dan progresif/ kompetitif (mampu bersaing dengan wilayah lain). Melalui analisis LQ dan SSA diketahui bahwa sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor hanya ada 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) sektor PDRB yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi.

Sedangkan sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Bogor ada 4 (empat) yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Konstruksi. Kemudian, sektor ekonomi progresif di Kabupaten Bogor adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., A., Alsharikh, M., Alasmail, M., & Alghamdi, Z. (2015). Location Quotient Technique and Economy Analysis of Regions: Tabuk Province of Saudi Arabia as a Case Study. *International Journal of Science and Research*, 1756-1761.
- Adytia Riantika, I. (2017). Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1185-1211.
- BPS Kabupaten Bogor. (2017). *Kabupaten Bogor dalam Angka*. Bogor.
- EMSI. (2018). Retrieved from [www.economicmodeling.com: www.economicmodeling.com/wp-content/uploads/2007/10/emsi_understandinglq.pdf](http://www.economicmodeling.com/wp-content/uploads/2007/10/emsi_understandinglq.pdf)
- Indrayansyah, N., Mulatsih, S., & Asmara, A. (2013). Analisis Struktur Perekonomian dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 47 - 59.
- Khusaini, M. (2015). A shift-share analysis on regional competitiveness - a case of Banyuwangi district, East Java, Indonesia. *2nd Global Conference on Business and Social Science* (pp. 738-744). Bali: Elsevier.
- Pe'rez-Vicentea, S., & Ruizb, M. E. (2009). Descriptive statistics. *Allergol Immunopathol*, :314–320.
- Usman. (2015). Analisis Sektor Basis dan Subsektor Basis Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 38-49.



AKUNTABEL

JURNAL AKUNTANSI
DAN KEUANGAN

Volume 16 (2), 2019

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

AKUNTABEL
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

1. Irwansyah, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University.

Editor/Reviewer

1. Irsan Tricahyadinata, Faculty of Economics and Business Mulawarman University, Indonesia.
2. Hendryadi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia.
3. Zaki Fakhroni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
4. Iskandar, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.
5. Sri Mintarti, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.
6. Anisa Kusumawardani, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.
7. Anis Rachma Utary, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.
8. Yana Ulfah, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.
9. Yunita Fitria, Faculty of Economics and Business Mulawarman University, Indonesia.
10. Musdallifah Azis, Faculty of Economics and Business Mulawarman University, Indonesia.
11. Agus Iwan Kusuma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia
12. Rediyanto Putra, Politeknik Negeri Jember, Indonesia.

Admin Web

1. Rizki Fakhrowan, Faculty of Economics and Business Mulawarman University, Indonesia.
2. Bayu Dwi Dharma, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia.

Alamat Sekretariat Redaksi Unit Pelaksana Fakultas Publikasi Ilmiah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Jl. Tanah Grogot No. 1 Kampus Gunung Kelua, Telp/Fax : 0541-738913 Samarinda,
Kalimantan Timur, Indonesia.

AKUNTABEL**JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN****DAFTAR ISI**

| Penulis | Judul | Halaman |
|---|---|----------------|
| Agus Wahyudi Sutjipto Ngumar Bambang Suryono | Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi pada perangkat desa di kabupaten sumbawa) | 143-157 |
| Arbi Setiyawan | Analisis sektor perekonomian basis dan progresif di kabupaten bogor | 158-164 |
| Ayub Pradipta Hadi Nagina Kencono Putri Agus Faturokhman | Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah | 165-171 |
| Dianty Sonia Puruhita | Perbedaan faktor yang mempengaruhi trust dalam penggunaan e-banking berdasarkan gender | 172-178 |
| Edward Sidabutar Siti Masyithoh Yoremia Lestasi Ginting | Pengaruh struktur modal, perputaran piutang dan devidend payout ratio terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia | 179-188 |
| Evi Lithfiyah Irwansyah Yunita Fitria | Analisis rasio keuangan pt telekomunikasi indonesia tbk | 189-196 |
| Hendra Sanjaya Kusno Dahyang Ika Leni Wijayani | Analisis survei minat studi siswa sma/smk/ma terhadap program studi akuntansi manajerial di kalimantan timur | 197-205 |
| Ige Mawarni Cornelius Rantelangi Ledy Setiawati | Audit operasional atas fungsi sumber daya manusia pada yayasan pendidikan islam pondok pesantren shuffah hizbullah samarinda | 206-212 |
| Indra Suyoto Kurniawan | Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif | 213-221 |
| Indria Fitri Afiyana Lucky Nugroho Tettet Fitrijanti Citra Sukmadilaga | Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat | 222-229 |
| Moh. Baqir Ainun | Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2011-2015) | 230-237 |
| Rizki Arlita Hamid Bone Agus Iwan Kesuma | Pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) | 238-248 |

| Penulis | Judul | Halaman |
|---|---|---------|
| Tapi Omas Annisa Noorlailie Soewarno Isnailita | The perception of individual taxpayers against the intention of using e-form services | 249-255 |
| Yurisna Anis Rachma Utary Iskandar | Analisis perencanaan laba pada perusahaan daerah air minum | 256-262 |
| Ratna Purnama Sari Shinta Suryaningrum, Dekeng Setyo Budiarto | Does family firm have better performance? empirical research in indonesia smes | 263-271 |

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi pada perangkat desa di kabupaten sumbawa)

Agus Wahyudi¹, Sutjipto Ngumar², Bambang Suryono³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya.

¹Email: aguswahyudistiesia@gmail.com

²Email: sutjiptongumar@stiesia.co.id

³Email: bambang_ppmb@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 38,6% variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hasil statistik menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, tidak berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya di mana perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa hanya akan berfokus pada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa.

Kata Kunci: Kinerja manajerial; anggaran; akuntabilitas public; aplikasi sistem keuangan; sistem pengendalian

Factors influencing managerial performance of village officials (study of village officials in Sumbawa district)

Abstract

This study aims to examine the effect of budgeting participation, public accountability, utilization of village financial system applications, and internal control systems on managerial performance of village officials. This research is an associative quantitative research. This research was conducted on village officials in the Sumbawa Regency area with respondents namely the village head and the head of village consultative agency. The number of villages that became respondents was 75 villages so that the total respondents were 150 respondents. The results showed that 38.6% of the budgeting participation variables, public accountability, utilization of village financial system applications, and internal control systems were able to explain the variable managerial performance of the village apparatus. The statistic results show that budgeting participation, public accountability, and utilization of village financial system applications have a positive effect on the managerial performance of village officials, while the internal control system does not affect the managerial performance of village officials the non-influence of the internal control system on managerial performance is influenced by several things including where the village apparatus is only the executor who works in accordance with his job desk, the village apparatus will only focus on what is done and charged, not responsible for the implementation of internal control policies, and the minimum human resources who become village officials.

Keywords: *Managerial performance; budget; public accountability; financial system applications; control systems*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi desa, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Otonomi desa telah memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas (Bhakti, et al, 2015). Dalam menyukseskan Undang-Undang ini pemerintah pusat semenjak tahun 2014 telah mengalokasikan dana desa untuk membiayai kebutuhan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan pendapatan desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa (Putra, 2013). Di mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Ermawati, 2017). Untuk menentukan kinerja manajerial dari perangkat desa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), dan sistem pengendalian intern.

Perangkat desa membutuhkan alat untuk mengkoordinasikan dan merencanakan sumber daya yang dimilikinya, di mana alat yang dapat membantu perencanaan, koordinasi, dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat ialah adanya suatu anggaran. Agar terbentuknya anggaran, diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut dari semua elemen yang ada dalam desa tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai kaitan yang erat dengan kinerja manajerial perangkat desa, di mana kinerja pemangku kepentingan akan mempengaruhi proses penyusunan anggaran (Aulad, et al (2018). Partisipasi anggaran dapat dinilai dari tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh perangkat desa dalam menentukan dan menyusun anggaran tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan partisipasi penyusunan anggaran yakni maraknya kasus-kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya yakni kasus dugaan penyimpangan dana desa pada Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Kasus tersebut dimulai adanya laporan dari masyarakat setempat yakni dugaan sejumlah proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ada juga pekerjaan yang belum tuntas serta penyimpangan penggunaan dana desa dari tahun 2016 dan 2017 yang belum juga selesai (pulausumbawanews.net). Hal ini memberikan kesadaran pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, perangkat desa dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya. Sehingga kinerja manajerial perangkat desa itu sendiri melalui terselenggaranya kegiatan yang diusungkan pada saat penyampaian aspirasi dalam penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akuntabilitas publik juga memiliki keterkaitan dalam kinerja manajerial pada perangkat desa. Putra (2013) menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, sehingga perangkat desa berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Sehingga akuntabilitas akan terkait dengan pengawasan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan diharapkan dari terciptanya akuntabilitas publik ini dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa, Benawan et al, (2018).

Adanya akuntabilitas publik ini diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kinerja manajerial mereka, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang terjadi pada desa-desa di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2018, empat desa di Kabupaten Sumbawa tertunda dalam pencairan Dana Desa tahap II, hal ini dikarenakan adanya dugaan penyimpangan keuangan tahap sebelumnya, desa-desa tersebut ialah Desa Suka Mulia Kecamatan Labangka, Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Desa Tengah Kecamatan Labangka, dan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Penyelewengan anggaran di empat desa tersebut terindikasi sebagai tindak kesengajaan dari kepala desa masing-masing (www.kabarsumbawa.com). Sehingga diperlukan kesadaran dari aparat

desa tentang pentingnya akuntabilitas terhadap publik dalam hal mencapai peningkatan kinerja manajerial perangkat desa. Tidak hanya hal negatif yang terjadi pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Sumbawa. Di mana pada tahun 2017 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara diberikan penghargaan sebagai Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada publik.

Tidak hanya partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik yang terkait dengan kinerja manajerial perangkat desa, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa juga berkaitan dengan kinerja. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Penerapan siskeudes ini tentunya disertai harapan agar dapat berjalan efektif sehingga mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan dana serta pelaporan yang tepat waktu sehingga menunjang kinerja manajerial pemerintah desa, Saputri (2018). Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan terhadap publik akan semakin meningkat dan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat sehingga kinerja manajerial perangkat desa semakin meningkat.

Penggunaan aplikasi siskeudes ini sudah berjalan semenjak Bulan Mei 2017 di wilayah Kabupaten Sumbawa, namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa belum maksimal. Hal ini disebabkan masih belum bagusny sumber daya manusia seperti desa-desa di wilayah Kecamatan Batu Lanteh dari enam desa yang ada empat diantaranya merupakan desa sangat tertinggal (pulausumbawanews.net).

Agar berjalannya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan peningkatan kinerja manajerial maka perlu dilakukan pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Pengendalian intern digunakan sebagai alat ukur kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan menunjang kinerja perangkat desa, Saputri (2018). Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem pengendalian intern sendiri yakni untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pemerintah desa, keandalan pelaporan keuangan desa, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yakni kinerja kepala desa di Kecamatan Moyo Utara diapresiasi oleh Bupati Sumbawa. Di mana Bupati menilai, selesainya APBDes secara tepat waktu mencerminkan adanya kekompakan dan kebersamaan antara kepala desa, aparatur desa dan semua unsur yang ada di desa tersebut. Selain itu penyelesaian APBDes juga tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (pulausumbawanews.net).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya melakukan penelitian pada pemerintah daerah antara lain Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putra (2013); Putri (2013); Utama dan Abdul (2013); Saputra, et al (2014); Susanti (2014); Chintya (2015); Naipospo, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Ermawati (2017); Heski, et al (2017); Sakti (2017); Aulad, et al (2018); Benawan, et al (2018); Hendra (2018); Siwi, et al (2018)), sedangkan penelitian ini mencoba melakukan penelitian pada pemerintah level bawah yakni perangkat desa. Penelitian ini juga melengkapi beberapa penelitian terdahulu di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran (Utama dan Abdul (2013); Saputra, et al (2014); Bhakti, et al (2015); Medhayanti dan Ketut (2015); Naipospo, et al (2015); Aprilia (2017); Ermawati (2017); Handrika dan Made (2017); Heski, et al (2017); Sakti (2017); Aulad, et al (2018); Hendra (2018); Siwi, et al (2018)), akuntabilitas publik (Putra (2013); Saputra, et al (2014); Ibrahim (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Heski, et al (2017); Benawan, et al (2018);), pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Saputri, 2018), dan pengendalian intern (Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya (2015); Maharani, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Mayarani, et al (2017); Taradipa (2017); Saputri (2018)).

Berangkat dari hal-hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kajian Pustaka

Stewardship theory

Stewardship Theory berangkat dari paradigma dalam pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari oleh teori-teori psikologi dan sosiologi, Anton (2010). Dalam pengelolaan Stewardship Theory, pengelolaan organisasi difokuskan pada keharmonisan diantara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama. Stewardship theory menggambarkan manajer tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan kepentingan publik. Sehingga steward bekerja atas keinginan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas.

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Sehingga arti penting stewardship adalah bagaimana manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan bersama. Pemimpin yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi akan mampu memuaskan kebutuhan dari organisasi tersebut, sebab sebagian besar pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan pelayanan yang diraih organisasi. Sehingga pemimpin akan termotivasi dalam memaksimalkan kinerjanya Donalson dan James 1991).

Implikasi stewardship theory pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi perangkat desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka dalam hal ini perangkat desa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan melakukan pengendalian intern yang bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja manajerial perangkat desa.

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Stewardship theory mengisyaratkan bahwa pengelolaan organisasi difokuskan pada keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Terjalannya keharmonisan ini dapat dilihat dari peran aktifnya semua unsur yang ada di desa tersebut dalam penyusunan anggaran. Anggaran pada sektor publik dibuat untuk membantu dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Perangkat desa terlibat aktif dalam proses penganggaran, hal ini terlihat adanya kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah terhadap target anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan suatu hal untuk menilai seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh seseorang didalam menentukan dan menyusun anggaran secara tahunan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dari perangkat desa. Partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka perangkat desa akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah Utama dan Abdul (2013); Bhakti, et al (2015); Naipospos, et al (2015); Heski, et al (2017); Sakti (2017), Aulad, et al (2018); Hendra (2018); serta Siwi, et al (2018), hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja, hal ini berarti adanya anggaran partisipasi akan menghasilkan tukar menukar informasi yang efektif, melalui penyusunan anggaran secara partisipasi membuat perangkat desa akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas akan pekerjaan mereka melalui anggaran tersebut. Dengan adanya anggaran partisipasi tersebut pemerintah desa didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya, sehingga perangkat desa akan meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan agar mereka dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan secara bersama dalam anggaran.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Candrakususma dan Bambang; (2017); Ermawati (2017); Handrika dan Made (2017), yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan tingkat keterlibatan perangkat desa rendah dalam proses penyusunan anggaran. Perangkat desa memang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tetapi

keterlibatan mereka tidak diimbangi dengan menyumbang ide-ide kreatif yang mereka miliki. Seharusnya dengan ikut terlibat dan bekerja dengan baik akan menghasilkan kinerja yang bagus.

Dengan adanya keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Eksistensi adanya *stewardship theory* ialah adanya pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada publik. Amanah tersebut dapat diimplementasikan melalui akuntabilitas publik. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan segala penggunaan sumber daya yang tersedia baik kepada publik. Perangkat desa dapat meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri dengan cara mampu memuaskan kebutuhan publik, sebab sebagian besar publik memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik melalui peningkatan kemakmuran yang diraih perangkat desa. Oleh karena itu, *steward* yang pro pemerintah desa termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan publik.

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2015a;29). Putra (2013) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah di atasnya dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya mereka tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah desa berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah Putra (2013); Saputra, et al (2014); Benawan, et al (2018) yang menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini terjadi karena kinerja perangkat desa diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja perangkat desa perlu adanya akuntabilitas publik. Adanya akuntabilitas publik mewajibkan perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa harus memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakannya sehingga kinerja perangkat desa dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik, maka peningkatan kinerja perangkat desa semakin naik.

Berbeda dengan penelitian Candarakusuma dan Bambang (2017) bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja, hal ini menunjukkan bahwa aparat daerah belum memahami secara keseluruhan prinsip pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau perencanaan anggaran kepada publik. Masyarakat hanya mengetahui anggaran saja, tetapi tidak semua pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah diketahui oleh masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas publik yang diberikan oleh perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa, maka dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Berdasarkan *stewardship theory*, masyarakat mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi pemerintah desa. Hal ini berimplikasi pada tuntutan masyarakat agar pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan pada desa tersebut. Untuk menciptakan pertanggungjawaban tersebut, sejak 2015 perangkat desa telah memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Aplikasi ini digunakan oleh bendahara desa untuk mempermudahnya dalam menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informasi laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja manajerial, Chintya (2015). Sehingga diharapkan bendahara desa dapat memanfaatkan aplikasi siskeudes secara efektif. Saputri (2018), menyatakan bahwa Sebuah sistem akan efektif jika pengguna merasa puas dalam pengaplikasiannya, sistem mudah digunakan, biaya penerapan lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh organisasi dan data yang dihasilkan akan menunjang kinerja organisasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga organisasi mampu mencapai tujuannya dan mendukung pengambilan keputusan.

Susanti, (2014); Chintya (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di mana adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adanya informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi lebih efektif apabila dapat mendukung penggunaan informasi atau pengambilan keputusan. Manajer yang memiliki informasi umumnya mampu untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja manajer akan meningkat. Dalam pemanfaatan aplikasi siskeudes, Saputri (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan siskeudes berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, di mana adanya aplikasi akan membentuk laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kinerja pemerintah desa meningkat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Ranti (2013); Damayanti (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukan arah pembentukan e-Government yang baik.

Dengan adanya pemahaman tentang aplikasi sistem keuangan desa oleh bendahara desa, sehingga mempermudahnya dalam bekerja maka dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Stewardship theory didefinisikan sebagai situasi di mana kepala desa dan perangkat desa tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya. Hal ini diartikan bahwa perangkat desa bekerja atas kepentingan publik. Sehingga untuk tercapainya hal ini maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa harus memiliki pengendalian intern dalam bekerja. Kepala desa dan perangkat desa sebagai steward (manajemen) tentunya harus mengarahkan semua kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian intern, hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pengendalian intern yang baik maka akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik.

Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya (2015); Maharani, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa (2017); serta Saputri (2018) menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja. Adanya perangkat desa yang menerapkan sistem pengendalian intern yang baik akan mampu menghasilkan kegiatan yang baik pula. Sehingga adanya kegiatan yang baik tersebut membuat perangkat desa lebih mudah dalam pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ibrahim (2015); Benawan, et al (2017) di mana penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja. Jadi jika perangkat desa memiliki pengawasan yang baik, maka akan dapat memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, maka output yang dikeluarkan akan semakin optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), di mana pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga adanya pengendalian intern tidak akan mempengaruhi tingkat kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa. Mayarani, et al, (2017) juga menunjukkan indikator pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Dengan adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam setiap proses kegiatan dalam mengelola sumber daya yang ada maka akan mempermudah dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H4: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa

METODE

Definisi operasional variabel dan pengukurannya

Di bawah ini disajikan tabel 1 tentang definisi operasional variabel dan pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti.

Tabel 1. Definisi operasional variabel dan pengukurannya

| No. | Variabel | Definisi Operasional Variabel | Indikator |
|-----|---|---|--|
| 1 | Kinerja manajerial perangkat desa (Aprilia, 2017) | Kemampuan atau prestasi kerja yang dicapai oleh perangkat desa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatannya. | Kualitas pekerjaan Tanggung jawab Pelaksanaan tugas Memahami peraturan Aktif terhadap aktivitas Teliti dalam bekerja Keberhasilan menjalankan tugas |
| 2 | Partisipasi penyusunan anggaran (Sakti, 2017) | Keterlibatan semua elemen yang ada di desa tersebut tanpa terkecuali seluruh perangkat desa dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran Perangkat desa terlibat dalam proses penganggaran, di mana mereka diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap target anggaran. | Keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan anggaran Wewenang perangkat desa dalam penyusunan anggaran dan berlakunya anggaran Keterlibatan perangkat desa dalam pengawasan proses penyusunan anggaran Keterlibatan perangkat desa dalam tujuan pelaksanaan anggaran pada bidang yang dipimpin |
| 3 | Akuntabilitas publik (Putra, 2013) | Prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka maupun pemerintah di atasnya yang diwakili oleh kepala desa. | Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas proses Akuntabilitas program Akuntabilitas kebijakan |
| 4 | Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Saputri, 2018) | Penggunaan aplikasi siskeudes yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan desa dengan tujuan memfasilitasi aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa dengan mudah, cepat dan tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. | Mudah digunakan Kepuasan pengguna Data atau laporan yang dihasilkan cepat/tepat waktu Dilengkapi keamanan Ekonomis |
| 5 | Sistem pengendalian intern (Putri, 2013; Saputri, 2018) | Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala desa dan seluruh aparatur desa untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintah desa melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian |

Dalam menilai indikator tersebut, peneliti menggunakan skala likert dengan bobot satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk tidak setuju, tiga untuk setuju, dan empat untuk sangat setuju.

Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yakni (1) Uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dengan ketentuan jika nilai r hitung lebih dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka butir-butir pernyataan tersebut valid dan uji reliabilitas dengan ketentuan dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016:47-48). (2) Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada tingkat signifikan 5%, uji multikolonieritas dengan cara melihat angka collinearity Statistics yang ditunjukkan oleh Nilai Variance inflation Factor (VIF). Jika angka $VIF > 10$, maka variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas dan nilai tolerance pada output penilaian multikolinearitas yang tidak menunjukkan nilai lebih besar dari 0,1 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji rank spearman dengan kriteria Jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (3) Uji Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (4) Uji kesesuaian model yang digunakan apakah model yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai atau tidak yakni jika nilai F lebih besar daripada 4 dan nilai signifikan kurang dari 5% ($<5\%$) maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. (5) Uji statistika parameter individual atau uji t dengan ketentuan apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t -tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2016:97). (6) Analisis regresi linier berganda, di mana dalam penelitian ini memiliki persamaan linier berganda seperti berikut ini:

$$KPD = a + b_1PPA + b_2AKP + b_3PAS + b_4SPI + e \dots$$

Keterangan:

KMP = Kinerja Perangkat Desa

a = Konstanta

$b_1 - b_4$ = Koefisien Regresi

PPA = Partisipasi Penyusunan Anggaran

AKP = Akuntabilitas Publik

PAS = Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = Error/Variabel Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kualitas data

Berdasarkan hasil olahan data seluruh pernyataan dikatakan valid. Hal ini dikarenakan r tabel lebih besar dari r hitung. Dengan demikian variabel kinerja manajerial perangkat desa, partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern memiliki nilai r hitung lebih dari 0,162 sehingga dinyatakan item pernyataan yang digunakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60.

Uji asumsi klasik

Pengujian ini meliputi (1) uji normalitas di mana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yakni berjumlah 0,200, hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, (2) uji multikolonieritas di mana disimpulkan variabel bebas dalam penelitian ini bebas dalam masalah multikolonieritas, hal ini dikarenakan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan (3) uji heteroskedastisitas di mana dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi keempat variabel tersebut lebih dari 0,05.

Uji koefisiensi determinasi regresi (R^2)

Berdasarkan nilai Adjustes R^2 yakni sebesar 0,386, hal ini berarti sebanyak 38,6% variabel kinerja manajerial perangkat desa mampu dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern.

Sedangkan sisanya 61,4% (100%-38,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model

Dalam pengujian kesesuaian model ini peneliti melihatnya dari uji ANOVA yakni pada nilai F dan tingkat signifikansi. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa nilai F sebesar 24,646, yang mana dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern secara serentak mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini dikarenakan nilai F lebih besar dari 4. Nilai signifikansi juga menunjukkan angka kurang dari 0,05 yakni 0,000 sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

Uji statistika parameter individual atau uji t

Hasil uji statistika parameter individual (uji statistika t) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji statistika parameter individual (uji statistika t)

| Variabel | Nilai t | Nilai Signifikansi |
|---|---------|--------------------|
| Partisipasi penyusunan anggaran | 3,080 | 0,002 |
| Akuntabilitas publik | 2,332 | 0,021 |
| Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa | 2,144 | 0,034 |
| Sistem pengendalian intern | 1,151 | 0,252 |

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran nilai $t = 3,080$ dan nilai signifikansi 0,002. Hal ini bermakna bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = 3,080 > t_{tabel} 1,9765$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama diterima.

Variabel akuntabilitas publik menunjukkan hasil yang signifikan yakni 0,021 dengan nilai t hitung = 2,332. Hal ini berarti akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = 2,332 > t_{tabel} 1,9765$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel 2 untuk variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa menunjukkan nilai t hitung = 2,144 dengan tingkat signifikansi 0,034. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = 2,144 > t_{tabel} 1,9765$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hasil pengujian yang tertera pada tabel 2 untuk variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai $t = 1,151$ dengan nilai signifikansi 0,252. Hal ini berarti sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung kurang dari t tabel ($t_{hitung} = 1,151 < t_{tabel} 1,9765$) dan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis ditolak.

Analisis regresi linier berganda

Hasil pengujian statistika parameter individual menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$KPD = 0,440 + 0,327PPA + 0,238AKP + 0,156PAS + 0,144SPI + e$$

di mana:

KPD = Kinerja Manajerial Perangkat Desa

PPA = Partisipasi Penyusunan Anggaran

AKP = Akuntabilitas Publik

PAS = Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = error/gangguan

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien variabel partisipasi penyusunan anggaran bernilai positif sebesar 0,327, koefisien variabel akuntabilitas publik bernilai positif sebesar 0,238, koefisien variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa bernilai positif sebesar 0,156, dan koefisien variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 0,144 yang berarti kinerja manajerial perangkat desa meningkat dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa.

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini membuktikan eksistensi *stewardship theory* yang menginsyiratkan bahwa pengelolaan keuangan desa akan terjalin secara harmonis ketika perangkat desa berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketika perangkat desa terlibat aktif dalam proses penganggaran, hal ini terlihat adanya kemampuan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dalam target anggaran desa. Perangkat desa berpartisipasi secara aktif dan memberikan usulan dalam penyusunan anggaran, sehingga dengan mudah untuk mengawasi program/kegiatan yang dilakukan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara partisipasi. Hal ini dilakukan agar dapat menilai sejauh mana keterlibatan dan pengaruh dari perangkat desa dalam menentukan dan menyusun anggaran desa. Sehingga dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka perangkat desa akan menginternalisasikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut dan perangkat desa akan merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya, karena mereka terlibat dalam proses penyusunan anggaran desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Abdul (2013); Bhakti, et al (2015); Naipospos, et al (2015); Heski, et al (2017); Sakti (2017), Aulad, et al (2018); Hendra (2018); serta Siwi, et al (2018), yang menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini membawa kesadaran bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran akan membawa dampak pada tukar menukar informasi yang efektif. Adanya keterlibatan perangkat desa, akan membuat mereka memperoleh gambaran pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan melalui anggaran desa yang telah ditetapkan dari hasil partisipasi penyusunan anggaran tersebut. Sehingga perangkat desa termotivasi untuk bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Di mana eksistensi dari *stewardship theory* ialah pemberian amanah oleh masyarakat dan pemerintah di atasnya untuk mengelola sumber daya yang ada. Kemudian sumber daya tersebut dipertanggungjawabkan oleh kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Pemerintah desa yang akuntabel akan mampu mempertanggungjawabkan segala penggunaan sumber daya yang tersedia kepada publik. Hal ini membuat perangkat desa mampu meningkatkan kinerjanya dengan cara pemuasan kebutuhan publik. Sehingga *steward* yang pro pemerintah desa akan termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan publik.

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa ialah akuntabel. Hal ini memberikan pandangan bahwa kepala desa dan perangkat desa berkewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada publik. Sehingga setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dari pertanggungjawaban, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban perlu adanya akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Sujarweni (2015a:29) menegaskan pentingnya akuntabilitas, karena asas ini merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013); Saputra, et al (2014); Benawan, et al (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja. Di mana kinerja perangkat desa diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, sehingga dalam peningkatan kinerja perangkat desa perlu adanya akuntabilitas. Adanya akuntabilitas terhadap publik mewajibkan perangkat desa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja perangkat desa dapat di nilai oleh masyarakat maupun pemerintah desa,

dengan demikian semakin baik tingkat akuntabilitas publik maka peningkatan kinerja manajerial perangkat desa semakin baik.

Pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang membuktikan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Sesuai dengan adanya *stewardship theory* yang menuntut perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya. Untuk menciptakan pertanggungjawaban tersebut maka perangkat desa dapat memanfaatkan aplikasi sistem keuangan secara maksimal khususnya bendahara desa. Adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa lebih mudah dalam menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informasi laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang akhirnya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, sehingga kinerja perangkat desa semakin baik.

Adanya aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengelola data keuangan desa dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya serta menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa guna menunjang pelaporan informasi keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sistem ini efektif dan efisien untuk bendahara desa karena bendahara desa merasa puas dalam pengaplikasiannya, sistem mudah digunakan, biaya penerapan yang lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh dan data yang dihasilkan akan menunjang kinerja manajerial perangkat desa, sehingga pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan mendukung pengambilan keputusan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Susanti (2014); Chintya (2015) yang mana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini karena pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung Saputri (2018) yakni pemanfaatan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, di mana adanya aplikasi ini akan membentuk laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja pemerintah desa meningkat.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini menolak adanya *stewardship theory* yang mana kepala desa dan perangkat desa sebagai *steward* bekerja atas kepentingan publik sehingga mereka akan mengarahkan semua kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian intern, hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pengendalian intern yang baik akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan penelitian terdahulu antara lain Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya (2015); Maharani, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa (2017); serta Saputri (2018) menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) di mana pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh Mayarani, et al (2017) bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Alasan hipotesis ini ditolak karena perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa bukan termasuk manajemen puncak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern. Hasil penelitian ini didukung dengan adanya teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom (1964 dalam Mayarani, et al, 2017) bahwa jika seorang perangkat desa menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka perangkat desa yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya. Sehingga perangkat desa akan bekerja secara baik jika berdampak terhadap reward yang diterima.

Indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian sudah dilakukan secara baik sesuai dengan frekuensi

jawaban responden yang menjawab kadang-kadang hingga selalu tetapi kinerja perangkat desa tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Faktor penyebabnya dikarenakan perangkat desa hanya akan berfokus kepada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern. Sesuai dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom (1964 dalam Mayarani, et al, 2017) yang menjelaskan bahwa banyak sekali karyawan yang tidak termotivasi pada pekerjaan mereka dan hanya melaksanakan yang minimum sesuai dengan output yang didapatkan semata-mata untuk menyelamatkan diri atau sesuai dengan insentif yang diterima.

Alasan selanjutnya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa dikarenakan minimnya sumber daya manusia. Aulia, et al. (2018) menegaskan bahwa adanya kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pada pemerintah desa tersebut. Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa menjadi syarat utama agar kinerja perangkat desa menjadi baik. Dalam pengelolaan keuangan desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan, salah satunya diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Meutia dan Liliana (2017) bahwa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi masalah bagi beberapa desa yakni keterbatasan sumber daya manusia dan penelitian Herdianto (2018) di mana sumber daya manusia masih kurang mendukung dalam pengelolaan keuangan desa, dikarenakan masih banyak perangkat desa yang belum paham mengenai perhitungan rancangan anggaran biaya dan belum sepenuhnya. Saat ini adanya tenaga pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah dirasakan masih belum optimal, di mana Triani dan Susi (2018) menegaskan bahwa setiap desa didampingi oleh tenaga pendamping desa untuk membantu dalam hal pengadministrasian pengelolaan dana desa. Namun pada kenyataannya mayoritas desa mengeluhkan tenaga pendamping desa yang keberadaannya justru menjadi beban bagi desa. Tenaga pendamping desa juga tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait dalam hal pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini berarti dengan adanya partisipasi perangkat desa dalam penyusunan anggaran, akan membuat perangkat desa memperoleh gambaran pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan melalui anggaran desa yang telah ditetapkan dari hasil partisipasi penyusunan anggaran tersebut. Sehingga perangkat desa termotivasi untuk bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini menunjukkan dengan adanya akuntabilitas terhadap publik mewajibkan perangkat desa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja perangkat desa dapat dinilai oleh masyarakat maupun pemerintah desa, dengan demikian semakin baik tingkat akuntabilitas publik maka peningkatan kinerja manajerial perangkat desa semakin baik.

Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Di mana dengan adanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengelola data keuangan desa dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan publik guna menunjang pelaporan informasi keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan mendukung pengambilan keputusan yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini disebabkan karena perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa bukan termasuk manajemen puncak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern. Perangkat desa hanya akan berfokus kepada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern. Selanjutnya dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada pada desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2013). Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(2); 1-22.
- Anton, FX. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* Vol 1(2); 61-80.
- Aulad, A., N. Hidayati, dan Junaidi. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kota Malang). *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 7(7); 111-120.
- Aulia, P., R. Agusti, dan Julita. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* Vol 1(1): 1-15.
- Aprilia, R., Yuliansyah, dan Y. Agustina. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Provinsi Lampung). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumbawa. (2018). *Statistika Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018*. (<https://sumbawakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/d8d6850f9bade0c14051cf83/statistik-daerah-kabupaten-sumbawa-2018.html>). (Di akses 19 November 2018).
- Benawan, E.T.R., D.P.E. Saerang, dan W. Pontoh. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 13(3); 72-79.
- Bhakti, D.C., E. Pituringsih, dan E. Widiastuty. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (Assets)* Vol. 5(1); 29-43.
- Candrakusuma, D.A., dan B. Jatmiko. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol 24(1); 87-93.
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok). *Jurnal Akuntansi* Vol. 3(1); 1-15.
- Damayanti, S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. Program Studi Strata-S1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Donaldson, L. dan J.H. Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. Vol 16(1); 49-65.
- Ermawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia* Vol. 6(2); 141-156.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 33*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handrika, D. dan M.G. Wirakusuma. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Manajerial yang Dimoderasi Self Efficacy dan Motivasi Kerja. *Jurnal Akuntansi* Vol. 20(2); 875-903.

- Hendra, J. (2018). Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak* Vol. 2(1); 8-17.
- Herdianto, M.A. (2018). Mekanisme, Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Bajur, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* Vol 6(2):1-15.
- Heski, P., D.T. Purwanti, dan A. Fidayati. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang). *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*; 345-352.
- Ibrahim, P.S. (2015). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. *Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis* Vol 6(1); 82-95.
- Kabarsumbawa.com. (2018). Empat Kades Bermasalah Diminta Kooperati. (<https://www.kabarsumbawa.com/2018/08/13/empat-kades-bermasalah-diminta-kooperatif>). (Di akses 26 September 2018).
- Maharani, F.L, S.P.D Sofianti, S.M. Wardayanti. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan pada Divisi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jember Klinik. *Jurnal Akuntansi* Vol. 13(2); 57-69.
- Mayarani, E.I, A.D.D. Santoso, G.B. Riyandaru, dan S.M. Wardayati. (2017). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Paru Jember. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis Jember*. 27-8 Oktober 2017:158-168.
- Medhayanti, N.P. dan K.A. Suardana. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Self Efficacy, Desentralisasi, dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi* Vol. 11(1); 155-170.
- Meutia, I. dan Lilian. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 8(2); 336-351.
- Mulyono, S.P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 43(3); 438-444.
- Naipospos, H., T. Taufik, dan Julita. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi* 2(2); 1-15.
- Nasir, A. dan R. Oktari. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi* Vol 19(2); 1-14.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 23 Februari 2015. *Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12*. Sumbawa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2017. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127*. Jakarta.
- Pulausumbawanews.net. (2018). Administrasi Pemerintah Desa Di Sumbawa Masih Lemah. (<http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/04/22/administrasi-pemerintah-desa-di-sumbawa-masih-lemah>). (Di akses 26 September 2018).

-
- Pulausumbawanews.net. (2018). Dugaan Penyimpangan Dana Desa Mata Segera Ditindaklanjuti. (<http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/05/09/dugaan-penyimpangan-dana-desa-mata-segera-ditindaklanjuti>). (Di akses 26 September 2018).
- Pulausumbawanews.net. (2018). Kinerja Kades Di Moyo Utara Diapresiasi Kepala Dearah. (<http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/03/05/kinerja-kades-di-moyo-utara-diapresiasi-kepala-daerah/>). (Di akses 26 September 2018).
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(1); 1-23.
- Putri, G.Y. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sisetm Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(1); 1-23.
- Sakti, K.M.D. dan A. Taman. (2017). Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus SKPD Kabupaten Sleman). Skripsi. Program Studi Akuntansi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Saputra, D.S, Darwanis, dan S. Abdullah. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda. Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi* Vol 3(2); 76-84.
- Saputri, N., R.S. Pancawati, dan Nurabiah. (2018). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Mataram.
- Siwi, N.D.P., A.S. Kustono, dan N. Puspitasari. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran dengan Komitmen, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 12(1); 119-130.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan Belas. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, W. (2015a). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- . (2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Susanti, I. (2014). Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada SKPD Kabupaten Siak). *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi* Vol 1(1); 1-14.
- Taradipa, P.S. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Kendari). *Jurnal Akuntansi* Vol 2(1); 27-38.
- Triani, N.N.A., dan S. Handayani. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 9(1); 136-155.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Utama, E.Y. dan A. Rohman. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2(3); 1-12.
- Yuliani, A. (2017). Festival Desa Benderang Informasi Publik, Menjadikan Pemerintah Desa Yang Terbuka. (https://kominfo.go.id/content/detail/11716/festival-desa-benderanginformasi-publik-menjadikan-pemerintahan-desa-yang-terbuka/0/sorotan_media). (Di akses 04 Oktober 2018).
-

Analisis sektor perekonomian basis dan progresif di kabupaten bogor

Arbi Setiyawan

National Statistics Training Center, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Email: arbies@bps.go.id

Abstrak

Penentuan prioritas pengembangan sektor ekonomi perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar daerah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang dan dapat bersaing dengan daerah lain. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penopang Daerah Khusus Ibukota Jakarta semestinya sudah mempunyai sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi. Setiap daerah/ wilayah mempunyai sektor ekonomi prioritas masing-masing dan kemungkinan berbeda dengan daerah lain. Untuk mengetahui sektor prioritas dapat digunakan teknis analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Teknis analisis *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis. Sedangkan teknik analisis *Shift Share* dapat digunakan untuk mengetahui sektor progresif dan non progresif. Dengan menggunakan kedua teknik analisis tersebut dan dilakukan penyilangan (*overlay*), penelitian ini dapat mengetahui sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) sektor PDRB yang merupakan sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi. Sedangkan sektor basis ada 4 sektor dan sektor yang progresif ada 2 sektor.

Kata Kunci: PDRB; pembangunan daerah; location quotient; economic analysis; shift share

Analysis of base and progressive economics sector in bogor regency

Abstract

Regional Government should have priority in economics sector to develop and to compete with other regions. Bogor Regency, a region supporting Jakarta, also should have priority in economics development sector. Each region has its own priority in economic sector and may be different from other regions. To find out the priority sectors, technical analysis of Location Quotient (LQ) and Shift Share can be implemented. LQ analysis can be used to find out the base and non-base sectors. Shift Share analysis technique can be used to find out progressive and non progressive sectors. By using these techniques and the overlays of both techniques, this study found that the base and progressive sectors in Bogor Regency are the Mining and Excavation Sector and Construction Sector. There are four sectors which are classified as base sector and two sector classified as progressive sector.

Keywords: PDRB; regional development; location quotient; economic analysis; shift share

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian atau pembangunan daerah pada suatu wilayah tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian. Pemerintah Daerah perlu memilih prioritas pengembangan sektor-sektor pilihan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Termasuk juga Pemerintah Kabupaten Bogor semestinya sudah memiliki prioritas pembangunan pada sektor ekonomi tertentu yang mempunyai potensi di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya mendorong dan menarik perkembangan sektor perekonomian lainnya, Adytia Riantika (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi basis dan progresif di Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan indikator ekonomi makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penentuan sektor ekonomi basis dan progresif menjadi penting dalam penentuan program dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor untuk mendorong pembangunan wilayah secara utuh dan agar mampu bersaing dengan wilayah/ daerah lain, Adytia Riantika (2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan data PDRB Kabupaten Bogor tahun 2010, 2015 dan 2016 dan PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dan 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode statistik deskriptif dan menggunakan teknik analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA).

Analisis deskriptif

“Descriptive statistics refers to the collection, presentation, description, analysis and interpretation of data collection. Its purpose is to summarize these from a set of values. Descriptive statistics is the method of obtaining data set conclusions about themselves”, Pe´ rez-Vicentea & Ruizb (2009).

Location quotient

Location Quotient (LQ) dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis kegiatan, kapasitas ekspor perekonomian wilayah dan tingkat kecukupan barang/jasa produksi lokal. LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor PDRB di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share* output sektor tertentu di kabupaten/kota dan *share* output sektor tertentu di provinsi atau nasional, A.K., Alsharikh, Alasmal, & Alghamdi, (2015) (EMSI, 2018)

Formula LQ:

$$LQ = (Si/S) / (Ni/N)$$

Dimana:

LQ = Nilai Location Quotient

Si = PDRB Sektor i di Kabupaten Bogor

S = PDRB total di Kabupaten Bogor

Ni = PDRB Sektor i di Provinsi Jawa Barat

N = PDRB total di Provinsi Jawa Barat

Apabila LQ suatu sektor lebih besar dari 1 (satu) ($LQ > 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya bila LQ suatu sektor kurang dari satu ($LQ < 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Sedangkan jika LQ suatu sektor = 1, maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, Usman (2015).

Shift share analysis

Shift Share Analysis digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Dalam shift share analysis, pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bogor ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: Komponen *Regional Share* (S), Komponen *Proportional Shift* (PS), dan Komponen *Regional Shift* (RS), Khusaini (2015).

Komponen *Regional Share* (S) digunakan untuk mengetahui perubahan produksi Kabupaten Bogor yang disebabkan oleh perubahan produksi Provinsi Jawa Barat. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi provinsi/nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian sektoral atau wilayah.

Komponen *Proportional Shift* (PS) digunakan untuk melihat peranan pertumbuhan ekonomi nasional atau Jawa Barat terhadap peranan pertumbuhan sektoral Kabupaten Bogor. Komponen *proportional shift* (PS) timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (seperti kebijakan perpajakan dan subsidi) serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

Komponen *Regional Shift* (RS) digunakan untuk melihat peranan pertumbuhan sektor tertentu di Kabupaten Bogor terhadap pertumbuhan sektor tertentu di Jawa Barat. Komponen regional shift (RS) timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB/kesempatan kerja Kabupaten Bogor dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan Kabupaten Bogor dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regionalnya.

Apabila $RS \geq 0$, sektor ekonomi dimasukkan ke dalam kelompok progresif (maju). Sementara, jika $RS < 0$ menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tergolong pertumbuhan yang non-progresif (lambat), Indrayansyah; Mulatsih; Asmara (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor basis perekonomian kabupaten bogor

Salah satu cara untuk menentukan sektor ekonomi basis dan sektor ekonomi bukan basis dapat dilakukan dengan menggunakan teknis analisis Location Quotient (LQ). Tabel 1 menampilkan LQ Kabupaten Bogor.

Tabel 1. *Location quotient* kabupaten bogor, 2015 – 2016

| Sektor Perekonomian (1) | <i>Location Quotient (LQ)</i> | |
|--|-------------------------------|-------------|
| | 2015 (2) | 2016 (3) |
| SEKTOR PRIMER | 0,81 | 0,78 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,67 | 0,66 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1,27 | 1,24 |
| SEKTOR SEKUNDER | 1,23 | 1,24 |
| 3. Industri Pengolahan | 1,26 | 1,27 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,34 | 0,36 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,43 | 1,44 |
| 6. Konstruksi | 1,10 | 1,10 |
| SEKTOR TERSIER | 0,74 | 0,74 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,81 | 0,82 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 0,65 | 0,65 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,99 | 0,98 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 0,65 | 0,65 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,21 | 0,21 |
| 12. Real Estat | 0,73 | 0,72 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,49 | 0,49 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,80 | 0,79 |
| 15. Jasa Pendidikan | 0,71 | 0,70 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,71 | 0,72 |
| 17. Jasa lainnya | 0,88 | 0,88 |

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sektor basis Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Konstruksi ($LQ > 1$). Artinya adalah ada 4 (empat) sektor yang sudah dapat mencukupi kebutuhan sendiri di Kabupaten Bogor dan mampu untuk diekspor ke daerah lain. LQ terendah adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Hal ini mengindikasikan bahwa adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Bogor belum mampu untuk mencukupi kebutuhan di wilayahnya sendiri. Terlihat pula pada tahun 2015, sektor basis Kabupaten Bogor sama dengan tahun 2016.

Pergeseran dan peranan perekonomian kabupaten bogor

Komponen regional share (S)

Nilai Share yang positif berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Bogor 2010-2016 lebih cepat dibanding pertumbuhan rata-rata Jawa Barat. Tabel 2 kolom (5) menunjukkan sektor-sektor dalam perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat. Sektor yang tumbuh paling cepat dibandingkan dengan Jawa Barat adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Konstruksi. Sedangkan yang pertumbuhannya paling lambat namun masih berada diatas pertumbuhan Jawa Barat adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Komponen proportional shift (PS)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 yang tergolong maju karena pertumbuhannya lebih cepat dibanding perekonomian Kabupaten Bogor secara umum adalah sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Pendidikan ($PS_i > 0$). Sementara Sektor Konstruksi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pertumbuhannya paling lambat dibanding perekonomian Kabupaten Bogor secara umum ($PS_i < 0$).

Komponen regional shift (RS)

Regional Shift (RS) pada Tabel 2 kolom (7) menggambarkan bahwa sektor-sektor di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 yang mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat. Sektor tersebut diantaranya yang paling dapat bersaing ($RS_i > 0$) adalah adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1.11), Sektor Kontruksi (0.82) dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0.48). Sementara sektor yang paling tidak dapat bersaing dengan daerah lain ($RS_i < 0$) adalah Industri Pengolahan (-0.14) dan Sektor Jasa Lainnya (-0.14).

Tabel 2. Shift share analysis PDRB kabupaten bogor (Jutaan Rupiah), 2010 – 2016

| Sektor Perekonomian | PDRB | | Δ PDRB | Komponen Perubahan PDRB | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2010 | 2016 | | Share (S) | Proporsional Shift (PS) | Regional Shift (RS) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I SEKTOR PRIMER | 9.08 | 10.20 | 1.12 | 3.69 | -3.23 | 0.66 |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.64 | 6.70 | 1.06 | 2.30 | -1.72 | 0.48 |
| 2. Pertambangan dan Penggalan | 3.43 | 3.49 | 0.06 | 1.40 | -1.74 | 0.40 |
| II SEKTOR SEKUNDER | 60.34 | 84.72 | 24.38 | 24.55 | -0.62 | 0.45 |
| 3. Industri Pengolahan | 53.33 | 72.47 | 19.14 | 21.70 | -2.42 | -0.14 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.03 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Konstruksi | 6.73 | 11.87 | 5.13 | 2.74 | 1.57 | 0.82 |
| III SEKTOR TERSIER | 23.51 | 37.47 | 13.96 | 9.57 | 3.53 | 0.87 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11.12 | 16.94 | 5.82 | 4.52 | 0.19 | 1.11 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 2.56 | 4.14 | 1.58 | 1.04 | 0.59 | -0.05 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.16 | 3.31 | 1.16 | 0.88 | 0.20 | 0.08 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 1.37 | 3.22 | 1.85 | 0.56 | 1.23 | 0.06 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.44 | 0.71 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | -0.01 |
| 12. Real Estat | 0.76 | 1.11 | 0.35 | 0.31 | 0.07 | -0.02 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -0.02 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.80 | 2.12 | 0.32 | 0.73 | -0.57 | 0.15 |
| 15. Jasa Pendidikan | 1.29 | 2.55 | 1.25 | 0.53 | 0.69 | 0.03 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.38 | 0.72 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| 17. Jasa lainnya | 1.45 | 2.39 | 0.93 | 0.59 | 0.48 | -0.14 |
| PDRB | 92.93 | 132.39 | 39.14 | 37.81 | -0.32 | 1.65 |

Keterangan: Δ PDRB = S + PS + RS**Overlay lq dan ssa**

Analisis overlay LQ dan SSA merupakan analisis yang digunakan untuk melihat sektor ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun dari sisi pertumbuhan PDRB. Dalam hal ini, analisis overlay digunakan untuk melihat keunggulan dan potensi ekonomi di Kabupaten Bogor, dengan melakukan integrasi antara analisis LQ (aspek keunggulan komparatif) dan Analisis Shift Share (aspek keunggulan kompetitif).

Tabel 3. Overlay LQ – SSA Kabupaten Bogor, 2010 – 2016

| Sektor Perekonomian (1) | LQ (2) | RS (3) | Hasil Overlay (6) |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| I SEKTOR PRIMER | 0.78 | 0.66 | Non basis, progresif |
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.66 | 0.48 | Non basis, progresif |
| 2. Pertambangan dan Penggalan | 1.24 | 0.40 | Basis, progresif |
| II SEKTOR SEKUNDER | 1.24 | 0.45 | Basis, lambat |
| 3. Industri Pengolahan | 1.27 | -0.14 | Basis, lambat |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.36 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.44 | 0.00 | Basis, lambat |
| 6. Konstruksi | 1.10 | 0.82 | Basis, progresif |
| III SEKTOR TERSIER | 0.74 | 0.87 | Non basis, progresif |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.82 | 1.11 | Non basis, progresif |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 0.65 | -0.05 | Non basis, lambat |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.98 | 0.08 | Non basis, progresif |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 0.65 | 0.06 | Non basis, progresif |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.21 | -0.01 | Non basis, lambat |
| 12. Real Estat | 0.72 | -0.02 | Non basis, lambat |
| 13. Jasa Perusahaan | 0.49 | -0.02 | Non basis, lambat |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.79 | 0.15 | Non basis, progresif |
| 15. Jasa Pendidikan | 0.70 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.72 | 0.03 | Non basis, progresif |
| 17. Jasa lainnya | 0.88 | -0.14 | Non basis, lambat |

Tabel 3 menunjukkan potensi sektor ekonomi di Kabupaten Bogor, dalam arti memiliki keunggulan komparatif dan juga kompetitif, dominan yang juga progresif. Berdasarkan dua indikator dalam analisis overlay di atas, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bogor dapat dikategorikan sebagai berikut;

Kategori 1, Dominan dan progresif ($LQ > 1$ dan $RS > 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif, sekaligus memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Kelompok sektor ini dominan dalam perekonomian Kabupaten Bogor dan pertumbuhannya relatif lebih cepat dibanding daerah lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan dan Sektor Konstruksi.

Kategori 2, Dominan dan tidak progresif ($LQ > 1$ dan $RS < 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif, namun tidak memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Kelompok sektor ini dominan dalam perekonomian Kabupaten Bogor namun pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding daerah lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengadaan Air, Sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kategori 3, Tidak dominan tetapi progresif ($LQ < 1$ dan $RS > 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor-sektor non basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, tetapi memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Pertumbuhan sektor-sektor dalam kelompok ini tergolong progresif (maju). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kategori 4, Tidak dominan dan tidak progresif ($LQ < 1$ dan $RS < 0$). Kelompok sektor ini merupakan sektor-sektor non basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, dan juga tidak memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Jawa Barat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa lainnya.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan sektor perekonomian di Kabupaten Bogor yang basis/ dominan dan progresif/ kompetitif (mampu bersaing dengan wilayah lain). Melalui analisis LQ dan SSA diketahui bahwa sektor basis dan progresif di Kabupaten Bogor hanya ada 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) sektor PDRB yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi.

Sedangkan sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Bogor ada 4 (empat) yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Konstruksi. Kemudian, sektor ekonomi progresif di Kabupaten Bogor adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., A., Alsharikh, M., Alasmail, M., & Alghamdi, Z. (2015). Location Quotient Technique and Economy Analysis of Regions: Tabuk Province of Saudi Arabia as a Case Study. *International Journal of Science and Research*, 1756-1761.
- Adytia Riantika, I. (2017). Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1185-1211.
- BPS Kabupaten Bogor. (2017). *Kabupaten Bogor dalam Angka*. Bogor.
- EMSI. (2018). Retrieved from [www.economicmodeling.com: www.economicmodeling.com/wp-content/uploads/2007/10/emsi_understandinglq.pdf](http://www.economicmodeling.com/wp-content/uploads/2007/10/emsi_understandinglq.pdf)
- Indrayansyah, N., Mulatsih, S., & Asmara, A. (2013). Analisis Struktur Perekonomian dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 47 - 59.
- Khusaini, M. (2015). A shift-share analysis on regional competitiveness - a case of Banyuwangi district, East Java, Indonesia. *2nd Global Conference on Business and Social Science* (pp. 738-744). Bali: Elsevier.
- Pe'rez-Vicentea, S., & Ruizb, M. E. (2009). Descriptive statistics. *Allergol Immunopathol*, :314–320.
- Usman. (2015). Analisis Sektor Basis dan Subsektor Basis Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 38-49.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah

Ayub Pradipta Hadi¹, Negina Kencono Putri², Agus Faturokhman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia.

¹Email: pradiptaayub87@gmail.com

²Email: negina.putri@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan menetapkan 2 kriteria. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 80 responden. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi pada UKM secara bersama-sama dipengaruhi oleh sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi kemudian diantara variabel tersebut, sumber daya manusia menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi kemudian variabel pelatihan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan untuk variabel umur usaha secara mandiri berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi dan variabel skala usaha berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Kata Kunci: Usaha kecil dan menengah; sumber daya manusia; skala usaha; umur usaha; pelatihan akuntansi; penggunaan informasi akuntansi

Factors that influence the use of accounting information in small and medium businesses

Abstract

This study aims to analyze and describe the factors that influence the use of accounting information in Small and Medium Enterprises. The factors used in this study are human resources, business scale, business age and accounting training. The population in this study were all SMEs in Purbalingga Regency. This study uses purposive sampling by setting 2 criteria. The samples obtained in this study were 80 respondents. Data collection techniques with survey techniques through questionnaires and data analysis techniques in this study using multiple regression analysis techniques. The results of this study conclude that the use of accounting information for SMEs is jointly influenced by human resources, business scale, business age and later accounting training and the variables. Human resources become the most influential variable on the use of accounting information, then the accounting training variable has a significant positive effect on the use of accounting information, while the independent business age variables negatively affect the use of accounting information and the variable business impact has a positive but not significant effect on the use of accounting information.

Keywords: *Small and medium enterprises; human resources; business scale; business age; accounting training; use of accounting information*

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan cukup besar bagi perekonomian rakyat Indonesia. UKM memiliki peranan yang strategis dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja dan berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan. Periode 1997 sampai dengan 1998, hanya UKM yang mampu berdiri kokoh saat krisis menerpa Indonesia, dengan demikian UKM terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap mempunyai kesempatan besar untuk survive saat ekonomi yang modern sekalipun atau bahkan berkembang pesat jika industri tersebut membuat jenis-jenis produk yang proses produksinya tidak mempunyai skala ekonomis, dan mengandung teknologi sederhana (Tambunan, 2002). Pembangunan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, sehingga UKM memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara, Norkamsiah et al., (2016), Putri et al., (2015). Peran penting keberadaan UKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Keberadaan UKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama ekonomi. Kinerja UKM yang efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing global yang tinggi akan ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDB yang tinggi, Tambunan (2002). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber inovasi. Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di negara-negara berkembang seringkali dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, Ardiana (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Holmes dan Nicholls (1989), mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Australia dimana variabel-variabel nya antara lain, ukuran usaha, masa manajer memimpin, sektor industri dan pendidikan pemilik kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sitoresmi (2013), yang meneliti skala usaha, umur perusahaan, pelatihan akuntansi, pendidikan pemilik dan ketidakpastian lingkungan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UKM, khususnya di wilayah Kabupaen Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda survey kepada 80 responden. Adapaun faktor-faktor yang diteliti adalah sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dengan menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif menggunakan angka- angka dalam penafsirannya, pengumpulan serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini dilakukan di daerah Purbalingga, Jawa Tengah dan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Sampel penelitian ini ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) per tahun 2017; b. Pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOPUKM). Berdasarkan kriteria di atas maka diperoleh 152 unit sampling. Jumlah anggota sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin maka jumlah sampel penelitian sebanyak 61 unit

Perumusan persamaan regresi berganda pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1.x_1 + \beta_2.x_2 + \beta_3.x_d + \beta_4.x_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penggunaan Informasi Akuntansi

α = Konstanta x_1 = Sumber Daya Manusia

x_2 = Skala Usaha

x_d = Umur Usaha

x_4 = Pelatihan Akuntansi

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Sumber Daya Manusia

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Skala Usaha

β_3 = Koefisien Regresi Variabel Umur Usaha

β_4 = Koefisien Regresi Variabel Pelatihan Akuntansi

e = Variabel pengganggu (error)

Koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Pada pengukuran ini jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Uji F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dimana jika: $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji statistik t Uji statistik t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Maka kita dapat menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial dari regresi misal untuk menguji apakah variabel X_1 berpengaruh terhadap Y dengan menganggap variabel X lain konstan. Sementara uji elastisitas digunakan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada UKM yang berada di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga, terdapat 152 UKM yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel.

Sampel penelitian ini ditetapkan menggunakan purposive sampling. Ukuran sampel total ditentukan melalui sampel Slovin berjumlah 61 UKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh dari daftar pertanyaan yang dijawab oleh responden dalam kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian ini diberikan langsung kepada responden sehingga mengurangi kemungkinan adanya ketidakpastian pengisian kuesioner oleh responden.

Hasil analisis regresi linear berganda

Tabel 1. Hasil uji analisis regresi linear berganda

| No. | Variabel | Koefisien regresi | t_{hitung} | t_{tabel} |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | Sumber daya manusia (X_1) | 1,476 | 5,675 | > 1,665 |
| 2 | Skala usaha (X_2) | 0,123 | 1,042 | < 1,665 |
| 3 | Umur usaha (X_3) | -0,008 | -0,029 | < 1,665 |
| 4 | Pelatihan akuntansi (X_4) | 0,663 | 2,092 | > 1,665 |
| Konstanta | | = 7,628 | | |
| Koef. Determinasi | | = 0,363 | | |
| F_{hitung} | | = 10,678 | | |

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 1 menjelaskan bahwa persamaan regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 7,628 + 1,476X_1 + 0,123X_2 - 0,008X_3 + 0,663X_4$$

Keterangan:

Y = Penggunaan Informasi Akuntansi

a = Konstanta x_1 = Sumber Daya Manusia

x_2 = Skala Usaha

x_3 = Umur Usaha

x_4 = Pelatihan Akuntansi

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Sumber Daya Manusia

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Skala Usaha

β_3 = Koefisien Regresi Variabel Umur Usaha

β_4 = Koefisien Regresi Variabel Pelatihan Akuntansi

e = Variabel pengganggu (error)

Hasil koefisien determinasi

Nilai Adjusted R Square pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,363. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa sebesar 36,30 persen variasi perubahan variabel penggunaan informasi akuntansi dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh perubahan variabel sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan variabel pelatihan akuntansi, sedangkan 63,70 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil uji F

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung ($10,678$) $>$ F table ($2,53$) dan Sig ($0,000$) $<$ α ($0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (X_1), skala usaha (X_2), umur usaha (X_3) dan pelatihan akuntansi (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis (Uji t)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, t hitung ($5,675$) $>$ t table ($1,665$).

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa skala usaha memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, t hitung ($1,042$) $<$ t tabel ($1,665$).

Sementara itu, umur usaha memiliki pengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi, t hitung ($-0,029$) $<$ t table ($1,665$).

Hasil juga menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, t hitung ($2,092$) $>$ t table ($1,665$).

Hasil uji elastisitas

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai elastisitas koefisien regresi variabel sumber daya manusia (E_1) sebesar 0,533, elastisitas koefisien regresi variabel skala usaha (E_2) sebesar 0,049, elastisitas koefisien regresi variabel umur usaha (E_3) sebesar -0,001, dan elastisitas koefisien regresi variabel pelatihan akuntansi (E_4) sebesar 0,205. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa elastisitas koefisien regresi variabel sumber daya manusia (E_1) lebih besar dibandingkan dengan elastisitas koefisien regresi variabel skala usaha (E_2), umur usaha (E_3) dan pelatihan akuntansi (E_4).

Pengaruh simultan sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha, serta pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusia, semakin besar skala usaha, semakin lama umur usaha dan semakin baik pelatihan akuntansi yang diikuti oleh para pelaku UKM, maka akan semakin baik pula tingkat penggunaan informasi akuntansi pada UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi yang dilakukan oleh Sitoresmi (2013), bahwa secara simultan variabel pendidikan, skala usaha, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi perusahaan kecil dan menengah di Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan reasoned and action theory dan self determination theory dimana kedua teori tersebut menjelaskan perilaku individu. Reasoned and action theory menjelaskan niat sebagai alasan atas perilaku seseorang, salah satu pertimbangan dalam merumuskan niat adalah konsekuensi yang akan diterima ketika seseorang melakukan tindakan, jika di kaitkan dengan hasil ini maka para pelaku UKM menyadari akan pentingnya informasi akuntansi didalam usaha mereka kemudian self determination theory menjelaskan bagaimana seseorang memiliki kendali atas tindakan mereka serta mengasumsikan bahwa selain karena alasan ekonomi, seseorang juga mencari kompetensi agar mampu bersaing kemudian jika dihubungkan dengan hasil penelitian ini maka, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UKM juga mencari kompetensi berupa informasi akuntansi agar bisnis atau usaha mereka mampu bersaing didalam dunia usaha.

Pengaruh sumber daya manusia terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan semakin baik pula tingkat penggunaan informasi akuntansi pada UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan

studi yang dilakukan oleh Holmes & Nicholls (1988), yang menyimpulkan bahwa informasi akuntansi ditujukan kepada 2 pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal serta sesuai dengan teori reasoned and action yang mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendasari perilaku manusia adalah niat. Para pelaku UKM di Purbalingga merumuskan niat mereka berdasarkan konsekuensi yang nanti nya akan mereka terima ketika menggunakan informasi akuntansi yang ada. Oleh sebab itu kompetensi dari sumber daya manusia yang ada dibutuhkan dalam penggunaan informasi akuntansi.

Pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala usaha mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar skala usaha UKM tidak selalu diikuti dengan meningkatnya penggunaan informasi akuntansi pada UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. penelitian ini tidak sesuai dengan teori reasoned and action dan teori self determination yang menyatakan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan adalah niat, dimana niat tersebut timbul berdasarkan konsekuensi yang akan terjadi dari suatu tindakan, kemudian dari hasil ini diketahui bahwa pelaku UKM ingin memiliki kompetensi agar mampu bersaing. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nichols dan Holmes (1988), dimana mereka menemukan bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja maka kebutuhan akan informasi akuntansi juga akan meningkat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Wethyningtyas (2016), bahwa skala usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi dan juga menemukan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Pengaruh umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa umur usaha berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hubungan kausal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama umur usaha UKM tidak diikuti dengan semakin tingginya tingkat penggunaan informasi akuntansi pada UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para pelaku UKM di Purbalingga Jawa Tengah cenderung akan menggunakan informasi akuntansi ketika transaksi usaha mereka meningkat pula. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan studi yang dilakukan oleh Lestianti (2015), bahwa umur usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitoresmi (2013), yang mengungkapkan bahwa umur usaha berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi, kemudian hal serupa juga ditemukan oleh Kaukab, Ediraras (2010), yang menemukan bahwa umur usaha juga berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Temuan ini tidak sesuai dengan self-determination theory, dimana seharusnya individu didalam suatu usaha yang sudah lama berdiri memiliki motivasi untuk berkompetensi dengan pesaing yang ada, namun hal tersebut tidak terjadi pada pelaku UKM di Purbalingga Jawa Tengah.

Pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hubungan kausal tersebut membuktikan bahwa semakin baik pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pelaku UKM, maka akan semakin baik pula tingkat penggunaan informasi akuntansi pada UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sitoresmi (2013), bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pelatihan akuntansi dengan penggunaan informasi akuntansi. Lebih lanjut, hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Wethyningtyas (2016), yang juga membuktikan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga selaras dengan reasoned and action theory yang menjelaskan perilaku manusia ditinjau dari niat masing-masing individu. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Purbalingga Jawa Tengah mempertimbangkan konsekuensi yang akan diperoleh atas penggunaan informasi akuntansi terhadap usaha mereka kemudian jika ditinjau dari self-determination theory maka penelitian ini menggambarkan bagaimana para pelaku UKM ingin memiliki kompetensi agar dapat bersaing dalam dunia usaha.

Variabel sumber daya manusia memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggunaan informasi akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penggunaan informasi akuntansi jika dibandingkan dengan skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan informasi akuntansi pada

UKM di daerah Purbalingga, Jawa Tengah cenderung lebih dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UKM yang bersangkutan. Hal ini wajar jika berdasarkan reasoned and action theory dan sel-determination theory yang mendasari bagaimana manusia merumuskan niat untuk berperilaku dan bagaimana manusia ingin terus mengembangkan potensi diri mereka. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah sendiri sudah melakukan pembelajaran akuntansi dasar ke masyarakat dan apa dampak yang akan di rasakan bila para pelaku UKM mengelola keuangan mereka dengan baik dan benar kemudian pembelajaran yang diberikan berupa sosialisasi dan pelatihan – pelatihan yang sering dilakukan, namun fakta yang ditemukan bahwa animo atau ketertarikan para pelaku UKM terhadap sosialisasi dan pembelajaran kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku UKM yang belum dapat mengerti serta tidak melakukan proses akuntansi yang benar didalam usaha yang mereka jalani.

SIMPULAN

Sumber daya manusia, skala usaha, umur usaha dan pelatihan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Skala usaha berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Umur usaha berpengaruh negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Pelatihan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Sumber daya manusia memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, L. D., Brahmayanti, L. A., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Management Dan Kewirausahaan*. VOL.12, NO. 1, 42-55.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2018). Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di Jawa Tengah. Diakses 28 Maret 2018, dari <https://jateng.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik Purbalingga. (2018). Jumlah Industri Menengah di Purbalingga. Diakses 28 Maret 2018, dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Erwin Rijanto. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>.
- Ediraras, D. T. (2010). Akuntansi dan Kinerja UKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , Volume 15, No 2., 152-158.
- Ghozali, I. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Holmes, S., & Nicholls, D. (1988). An Analysis of the use of accounting information by australian small business. *Journal of Small Business Management* , Vol.26, No.20, 57-68.
- Holmes, S., & Nicholls, D. (1989). Modeling The Accounting Information Requirements of Small Business. *Accounting and Business Research* , Vol.19, No. 74, 60-76.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (2016). Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016. Jakarta: Puspayoga. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/>
- Lestanti, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha, dan Motivasi Kerja Terhadap Persepsi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Pelaku UMKM di Boyolali. *Jurnal Pendidikan Akuntansi* , 1-15.
- Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma dan Agus Setiawaty. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 13 No. 2, 151-163.

-
- Putri, Negin Kencono, Atiek Sri Purwati dan Irianing Suparlinah. (2015). The Effect of SAK ETAP Implementation to the Use of Accounting Information at SME's in Banyumas Region, Central Java, Indonesia. *Acta Universitatis Danubius Economica*, Volume 11, No. 6, 117-124.
- Scott, H., & Nicholls, D. (1989). Modelling The Accounting Information Requirement Of Small Business. *Accounting and Business Research* , Vol. 19, No. 74, 143-150.
- Sitoresmi, L. D. (2013). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah . *Diponegoro Journal of Accounting* , 1-13.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS* (pp.53). Yogyakarta: Andi Offset.
- Tambunan, T. T. (2002). *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (1s Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Whetyningtyas, A. (2016). Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. *Media Ekonomi dan Manajemen* , Vol. 31 No. 2, 88-96.

Perbedaan faktor yang mempengaruhi trust dalam penggunaan e-banking berdasarkan gender

Dianty Sonia Puruhita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: dianty.sonia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan faktor yang mempengaruhi trust atau kepercayaan dalam penggunaan e-banking berdasarkan gender terhadap 203 responden. Responden adalah pengguna e-banking dengan patokan usia produktif yaitu antara 15-64 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM-PLS dan data diolah dengan software WarpPLS 6.0. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah bahwa task characteristic merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi trust baik bagi laki-laki maupun perempuan. Variabel kedua yang berpengaruh terhadap kepercayaan dalam menggunakan e-banking adalah risk perceived bagi perempuan dan social influences bagi laki-laki. Karakteristik tugas sebagai faktor utama yang berpengaruh terhadap kepercayaan dalam menggunakan e-banking sesuai dengan sampel penel Hal ini sesuai dengan profil sampel yang diperoleh yaitu pada usia. Sampel dalam penelitian ini adalah individu dalam rentang usia produktif yang membutuhkan teknologi e-banking dalam menjalankan aktivitas harian, utamanya untuk mengelola keuangan mereka secara cepat dan mudah.

Kata Kunci: Trust; e-banking; gender; sem pls

Differences in factors that influence trust in the use of e-banking based on gender

Abstract

This study aims to determine the differences in factors that influence trust in the use of e-banking based on gender to 203 respondents. Respondents are e-banking users with a benchmark of productive age, which is between 15-64 years. The analysis technique used is SEM-PLS and the data is processed with WarpPLS 6.0. Some findings in this study are that task characteristics are the most significant factor in influencing trust for both men and women. The second variable that influences trust in using e-banking is risk perceived for women and social influences for men. Task characteristics as the main factor influencing trust in using e-banking in accordance with the sample of research This is in accordance with the profile of the sample obtained namely at age. The sample in this study are individuals in the productive age range who need e-banking technology in carrying out daily activities, primarily to manage their finances quickly and easily.

Keywords: Trust; e-Banking; gender; sem pls

PENDAHULUAN

Statistik Perbankan Indonesia bulan Juni 2018 mencatat adanya penurunan kantor fisik perbankan. Sejak awal tahun 2018 hingga bulan Juni 2018 terdapat penurunan kantor cabang sebanyak 341 outlet, Waluyo (2018). Menurut Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, Sukarela Batunanggar, berkembangnya teknologi mengubah gaya hidup masyarakat termasuk dalam hal akses dunia keuangan, Kumparan (2019). Nasabah yang tadinya perlu melakukan transaksi perbankan secara face-to-face melalui kantor cabang, saat ini lebih memilih transaksi perbankan secara digital. Menurut OJK (2017), jumlah nasabah pengguna e-banking (SMS banking, phonebanking, mobile banking, dan internet banking) meningkat sebesar 270%, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016. Sementara frekuensi transaksi pengguna e-banking meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Dengan adanya potensi jumlah pengguna smartphone dan pengguna internet di Indonesia, beberapa perusahaan telah mulai memperluas operasi bisnis mereka dalam bentuk mobile untuk memfasilitasi dan menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan mobilitasnya, termasuk di kalangan industri perbankan. E-banking saat ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas di dunia perbankan, Sri Maharsi (2006). Secara umum, perempuan dan laki-laki memiliki preferensi yang berbeda, Moss, (1999). Gender berperan penting dalam suatu perilaku, dimana juga menjadi faktor penentu dalam segmentasi pasar, Goh dan Sun, (2014). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi praktisi tentang treatment yang tepat berdasarkan gender sehingga dapat menarik dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan e-banking.

Di Indonesia belum banyak penelitian yang menguji secara empiris faktor yang mempengaruhi trust dalam penggunaan e-banking. Eksplorasi penentu faktor yang mempengaruhi Trust merupakan salah satu hal yang penting dalam penggunaan e-Banking. Hal ini karena Trust itu sendiri merupakan katalisator di dalam hubungan antara pembeli dan penjual, Pavlou, (2003); Wang, Ngamsiriudom, dan Hsieh, (2015). *E-commerce*, termasuk di dalamnya *e-Banking*, memiliki tingkat ketidakpastian serta perceived risk yang tinggi, karena itu trust menjadi faktor yang penting bagi masyarakat untuk menggunakan e-banking, Li dan Yeh, (2010); Pavlou, (2003). Trust memiliki pengaruh besar bagi seorang nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui *e-Banking* atau tidak (Sugiantoro dan Isharijadi, 2015) sehingga diperlukan upaya besar bagi bank penyedia layanan e-Banking agar kepercayaan yang dimiliki nasabahnya meningkat. Zhou (2012), menyebutkan jika dalam hubungan antara pelanggan dan *e-banking* tidak terdapat trust, maka tidak akan ada adopsi yang berujung pada tidak adanya penggunaan atas teknologi ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Malaquias dan Hwang (2016), dimana terdapat 4 variabel yang akan diuji terkait pengaruhnya terhadap kepercayaan terhadap penggunaan *e-banking* yaitu *risk perception*, *task characteristic*, *personal innovativeness* dan *social influence*.

Tinjauan pustaka

Pengaruh risk perception terhadap trust

Hambatan utama dalam penggunaan e-banking di Brazil adalah persepsi risiko, Cruz, Barretto Filgueiras Neto, Munoz-Gallego, dan Laukkanen, (2010). *Risk perception* juga menjadi faktor yang paling penting di Cina, Laforet dan Li, (2005) serta faktor yang mempunyai hubungan signifikan dengan intensi untuk menggunakan *e-banking* di Iran, Mohammadi (2015). Penggunaan *e-banking* juga secara signifikan dipengaruhi oleh risk perception, Yiu, Grant, dan Edgar, (2007). Persepsi risiko adalah faktor signifikan yang mempengaruhi kepercayaan (Al-Gahtani, 2011) dan mempengaruhi adopsi mobile banking, Al-Jabri dan Sohail, (2012).

Al-Gahtani (2011) dan Liao, Liu, dan Chen (2011), menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan berpengaruh negatif pada kepercayaan untuk melakukan transaksi online. Persepsi risiko yang lebih tinggi berpotensi lebih besar membuat nasabah menghindari penggunaan e-banking. Penelitian Al-Jabri dan Sohail (2012), membuktikan bahwa non-pengguna *e-banking* merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna e-banking. Individu yang merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi dalam *e-banking* cenderung merasa kurang percaya diri untuk mengadopsinya.

Pengaruh task characteristic terhadap trust

Task characteristic menjadi salah satu variabel yang populer dan diterima secara luas dalam penelitian sistem informasi Lee, Cheng, dan Cheng, (2007). Hwang dan Jeong (2014) menyebutkan

bahwa pengaruh karakteristik tugas terhadap penerimaan pengguna teknologi perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sebuah teknologi informasi akan berdampak positif pada kinerja individu ketika teknologi tersebut bermanfaat bagi penggunanya dan sesuai dengan tugas yang harus dilakukannya Goodhue dan Thompson, (1995). Karakteristik tugas dapat mempengaruhi niat dan kepercayaan untuk menggunakan *e-banking* Oliveira, Faria, Thomas, dan Popovic, (2014). Seseorang yang perlu melakukan transfer dana, yang memerlukan informasi saldo atau mengelola keuangan mereka kapan dan dimana saja, cenderung percaya pada teknologi untuk menunjang aktivitas mereka. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, task characteristic berpengaruh positif terhadap kepercayaan dalam menggunakan *e-banking*.

Pengaruh personal innovativeness terhadap trust

Inovasi Pribadi dalam ranah teknologi informasi mewakili karakteristik individu yang mencerminkan suatu kesediaan untuk mencoba teknologi baru Agarwal dan Karahanna, (2000). Dalam hal *e-banking*, personal innovativeness merupakan suatu faktor yang berpengaruh positif pada persepsi teknologi seluler sebagai kemudahan bagi penggunanya, Lu, Yao, dan Yu, (2005) dan kepercayaan McKnight, Choudhury, dan Kacmar, (2002). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, individu dengan personal innovativeness yang lebih tinggi akan lebih percaya terhadap *e-banking*.

Pengaruh social influence terhadap trust

Baptista dan Oliveira (2015), menjelaskan bahwa pengaruh sosial mewakili sejauh mana seorang individu merasa bahwa orang lain yang penting untuknya, percaya bahwa dia harus menggunakan suatu teknologi baru. Hal tersebut merupakan konsep yang relevan dalam menjelaskan tentang penggunaan suatu teknologi dan telah digunakan dalam penelitian-penelitian tentang *e-banking*. Individu yang menggunakan *e-banking* dapat mempengaruhi individu lain disekitarnya untuk menggunakan *e-banking* juga, terutama apabila pengguna tersebut adalah individu yang penting bagi individu yang dipengaruhi. Terdapat transfer kepercayaan, dimana seseorang cenderung percaya pada *e-banking* karena orang lainnya juga mempercayainya. Hal ini telah diteliti sebelumnya untuk mengeksplorasi pengaruh sosial dalam *e-commerce*, Lu dkk., (2005). Norma sosial berpengaruh terhadap penggunaan *e-banking* bagi perempuan, namun tidak ada bagi pengguna laki-laki, Goh dan Sun, (2014).

METODE

Metode penelitian menggunakan kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan online survey. Target populasi untuk penelitian ini adalah pengguna *e-banking*. Sebanyak 203 pengguna *e-banking* yang berdomisili di Indonesia berpartisipasi dalam studi ini. Responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, yaitu pengguna *e-banking* dalam usia produktif yaitu antara 15-64 tahun. Sebanyak 14 item kuesioner diadopsi dari Malaquias dan Hwang (2016). Semua item-item pada tabel 1 telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi pengguna di Indonesia untuk memudahkan responden dalam memahami pertanyaan. Setiap item diukur dengan menggunakan skala Likert antara 1 (sangat tidak setuju) dan 5 (setuju). Usia dan jenis kelamin juga termasuk dalam kuesioner sebagai pertanyaan demografis. Semua empat determinan yaitu risk perception, task characteristic, personal innovativeness dan social influence bertindak sebagai variabel independen. Sedangkan trust bertindak sebagai variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi model pengukuran (outer)

Pengolahan dan deskripsi data akan dilakukan terpisah berdasarkan gender. Dalam menguji model pengukuran, di mana korelasi antara variabel laten dan indikator yang diuji sesuai variabel laten, maka dilakukan uji convergent validity, uji discriminant validity, dan uji reliabilitas. Uji convergent validity digunakan untuk melihat indikasi sejauh mana langkah-langkah penilaian berkorelasi dengan langkah-langkah lain yang harus berhubungan. Uji convergent validity dinilai untuk model pengukuran berdasarkan kriteria sebagai berikut: (a) outer loadings untuk semua item harus melebihi 0.70; (b) nilai Average Variance Extracted (AVE) melebihi 0,50. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Uji convergent validity dan reliabilitas

| Konstruk | Items | Outer Loadings | | AVE | | Composite Reliability | | | Cronbach's alpha |
|------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------------------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Trust (TR) | TR1 | 0.898 | 0.829 | 0.802 | 0.785 | 0.924 | 0.916 | 0.877 | 0.862 |
| | TR2 | 0.897 | 0.937 | | | | | | |
| | TR3 | 0.892 | 0.890 | | | | | | |
| Risk Perceived (RP) | RP1 | 0.949 | 0.957 | 0.901 | 0.915 | 0.948 | 0.956 | 0.890 | 0.908 |
| | RP2 | 0.949 | 0.957 | | | | | | |
| Social Influence (SI) | SI1 | 0.905 | 0.917 | 0.818 | 0.841 | 0.900 | 0.913 | 0.778 | 0.811 |
| | SI2 | 0.905 | 0.917 | | | | | | |
| Task Characteristic (TC) | TC1 | 0.865 | 0.879 | 0.772 | 0.809 | 0.910 | 0.927 | 0.850 | 0.882 |
| | TC2 | 0.947 | 0.927 | | | | | | |
| | TC3 | 0.819 | 0.891 | | | | | | |
| Personal Innovativeness (PI) | P1 | 0.754 | 0.816 | 0.666 | 0.706 | 0.856 | 0.878 | 0.748 | 0.791 |
| | P2 | 0.846 | 0.865 | | | | | | |
| | P3 | 0.844 | 0.838 | | | | | | |

Catatan: SI3 telah dihapus karena outer loadings yang rendah (<0.70)

L=Laki-laki ; P=Perempuan

Tabel di atas menunjukkan bahwa outer loadings untuk semua item > 0.70 seperti yang direkomendasikan oleh Sholihin & Ratmono, (2013). Item SI3 dari Social Influence (SI) telah dihapus dari data karena pemuatan yang rendah (<0.70). Terakhir, nilai-nilai AVE untuk semua konstruk lebih besar dari 0,50 seperti yang direkomendasikan oleh Solimun et al., (2017). Dengan demikian, uji convergent validity tercapai. Sedangkan untuk menguji reliabilitas, item yang digunakan sebagai patokan untuk parameter uji reliabilitas adalah cronbach's alpha dan composite reliability (Nugroho et al., 2017). Persyaratan untuk uji reliabilitas adalah composite reliability (CR) > 0.70 dan Cronbach's alpha > 0,60 Solimun et al., (2017). Seperti ditampilkan dalam tabel 3, maka uji reliabilitas tercapai.

Tabel 2. Uji discriminant validity/ korelasi variabel laten

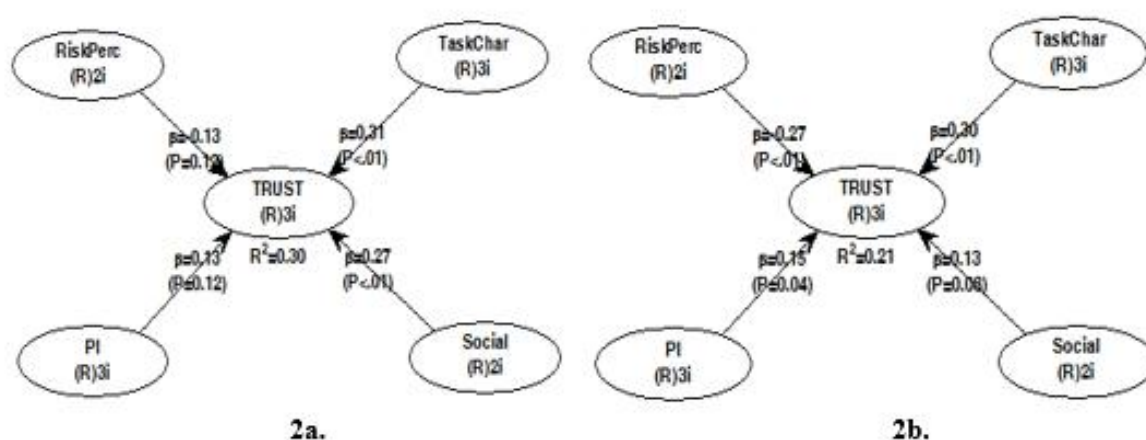
| Laki-laki | | | | | | Perempuan | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | RP | TC | TRUST | PI | SI | | RP | TC | TRUST | PI | SI |
| RP | 0.949 | 0.093 | -0.094 | -0.099 | 0.188 | RP | 0.957 | 0.257 | -0.189 | 0.073 | 0.034 |
| TC | 0.093 | 0.879 | 0.421 | 0.335 | 0.157 | TC | 0.257 | 0.899 | 0.293 | 0.174 | 0.039 |
| TRUST | -0.094 | 0.421 | 0.896 | 0.295 | 0.24 | TRUST | -0.189 | 0.293 | 0.886 | 0.200 | 0.182 |
| PI | -0.099 | 0.335 | 0.816 | 0.816 | 0.145 | PI | 0.073 | 0.174 | 0.200 | 0.840 | 0.367 |
| SI | 0.188 | 0.157 | 0.145 | 0.145 | 0.905 | SI | 0.034 | 0.039 | 0.182 | 0.367 | 0.917 |

Catatan: elemen diagonal (bold) adalah akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk. faktor off-diagonal menunjukkan inter-korelasi

Uji discriminant validity, seperti yang didefinisikan oleh Thong (2001), dikutip dari Tan et al., (2017) adalah “sejauh mana item membedakan antara variabel”. Hal ini dapat dinilai dengan “membandingkan tingkat akar kuadrat dari AVEs dan korelasi antara dua konstruksi” Deng, Mo, & Liu, (2014). Hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 3, uji discriminant validity ini telah dicapai karena akar kuadrat dari AVEs melebihi interkorelasi yang sesuai AVEs.

Analisis model struktural (inner).

Gambar 2a menunjukkan bahwa 30% dari variasi TRUST dalam menggunakan e-banking bagi laki-laki dijelaskan oleh variabel Risk Perceived (RP), Task Characteristic (TC), Social Influence (SI) dan Personal Innovativeness (PI). Hal tersebut telah menunjukkan bahwa model ini berlaku dalam memahami kepercayaan dalam penggunaan e-banking. Trust dalam menggunakan e-banking bagi laki-laki secara signifikan positif dipengaruhi oleh TC ($\beta = 0.31$, $p < 0.01$) dan SI ($\beta = 0.27$, $p < 0.01$), di mana faktor determinan terkuat adalah Task Characteristic (TC). Sedangkan Risk Perceived dan Personal Innovativeness tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dalam penggunaan e-banking bagi laki-laki.



Gambar 2. Hasil pls-sem

Gambar 2b menunjukkan bahwa 21% dari variasi TRUST dalam menggunakan e-banking bagi perempuan dijelaskan oleh variabel Risk Perceived, Task Characteristic, Social Influence, dan Personal Innovativeness. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa model ini berlaku dalam memahami kepercayaan dalam penggunaan e-banking. Trust untuk menggunakan e-banking bagi perempuan secara signifikan positif dipengaruhi oleh TC ($\beta = 0.30$, $p < 0.01$) dan RP ($\beta = 0.27$, $p < 0.01$), di mana faktor determinan terkuat adalah Task Characteristic (TC). Sedangkan Personal Innovativeness dan Social Influence tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dalam penggunaan e-banking bagi perempuan.

Berdasarkan penerapan model maka bukti empiris tersebut di atas, terdapat perbedaan antara faktor yang mempengaruhi kepercayaan dalam penggunaan e-banking bagi perempuan dan laki-laki. Variabel utama yang berpengaruh baik bagi laki-laki dan perempuan adalah task characteristic. Hal ini sesuai dengan penelitian Malaquias dan Hwang (2016). Hal ini sesuai dengan profil sampel yang diperoleh yaitu pada usia. Sampel dalam penelitian ini adalah individu dalam rentang usia produktif yang membutuhkan teknologi e-banking dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, utamanya untuk mengelola keuangan mereka secara cepat dan mudah.

Variabel kedua yang mempengaruhi kepercayaan untuk menggunakan e-banking bagi perempuan adalah risk perception. Hal ini sesuai dengan stereotype dalam masyarakat bahwa perempuan adalah penghindar risiko atau risk averse, baik dari sudut pandang sosial maupun secara sosial Coates dan Herbert, (2008); Wagner, (2001). Sedangkan bagi laki-laki, variabel kedua yang berpengaruh terhadap trust dalam menggunakan e-banking adalah social influence. Banyak peneliti telah menguji pengaruh sosial berdasarkan gender. Menurut Instone, Major, dan Bunker (1983), laki-laki cenderung membuat upaya dan strategi yang lebih besar dalam mempengaruhi, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih besar. Status, kekuatan dan legitimasi sosial merupakan hal yang penting bagi laki-laki.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil empiris, task characteristic merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi trust, kemudian diikuti oleh risk perceived bagi perempuan dan social influences bagi laki-laki. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mendorong studi lebih lanjut. Pertama, penelitian ini masih kurang dalam hal jumlah responden dan penyebaran kuesioner yang mewakili wilayah di Indonesia. Studi lebih lanjut dapat mempertimbangkan distribusi yang lebih luas dan lebih merata ke wilayah Indonesia. Kedua, model studi ini hanya menambahkan faktor usia untuk menjelaskan trust dalam menggunakan e-banking. Analisa tambahan dengan memperhatikan faktor lain seperti latar belakang pendidikan, profesi atau lainnya diperlukan untuk memperdalam pemahaman akan kepercayaan dalam penggunaan e-banking. Dari sudut pandang praktisi bisnis, penelitian ini memberikan panduan praktis untuk meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang membuat e-banking diterima dan digunakan oleh masyarakat. Studi ini membuktikan bahwa task characteristic memiliki pengaruh paling besar terhadap kepercayaan masyarakat dalam menggunakan e-banking. Hal ini dapat menjadi langkah awal bagi perbankan untuk menyalurkan nasabah dengan

karakteristik yang membutuhkan mobilitas dalam mengelola dan menggunakan transaksi keuangannya serta membuat strategi dan program marketing yang tepat baik bagi nasabahnya baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage. *MIS quarterly*, 665-694.
- Al-Gahtani, S. S. (2011). Modeling the electronic transactions acceptance using an extended technology acceptance model. *Applied computing and informatics*, 9(1), 47-77.
- Al-Jabri, I. M., & Sohail, M. S. (2012). Mobile banking adoption: Application of diffusion of innovation theory. *Journal of Electronic Commerce Research*, 13(4), 379-391.
- Baptista, G., & Oliveira, T. (2015). Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology combined with cultural moderators. *Computers in Human Behavior*, 50, 418-430.
- Coates, J. M., & Herbert, J. (2008). Endogenous steroids and financial risk taking on a London trading floor. *Proceedings of the national academy of sciences*, 105(16), 6167-6172.
- Cruz, P., Barretto Filgueiras Neto, L., Munoz-Gallego, P., & Laukkanen, T. (2010). Mobile banking rollout in emerging markets: evidence from Brazil. *International Journal of Bank Marketing*, 28(5), 342-371.
- Goh, T.-T., & Sun, S. (2014). Exploring gender differences in Islamic mobile banking acceptance. *Electronic Commerce Research*, 14(4), 435-458.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS quarterly*, 213-236.
- Hwang, Y., & Jeong, J. (2014). Electronic commerce and online consumer behavior research: A literature review. *Information Development*, 32(3), 377-388.
- Instone, D., Major, B., & Bunker, B. B. (1983). Gender, self confidence, and social influence strategies: An organizational simulation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(2), 322-333. doi: 10.1037/0022-3514.44.2.322
- Kumparan. (2019). Tergilas digitalisasi, ribuan kantor cabang bank tutup Retrieved 5 Mei, 2019, from <https://kumparan.com/kabarbisnis/tergilas-digitalisasi-ribuan-kantor-cabang-bank-tutup-1qwrkMghTXN>
- Laforet, S., & Li, X. (2005). Consumers' attitudes towards online and mobile banking in China. *International Journal of Bank Marketing*, 23(5), 362-380.
- Lee, C.-C., Cheng, H. K., & Cheng, H.-H. (2007). An empirical study of mobile commerce in insurance industry: Task-technology fit and individual differences. *Decision support systems*, 43(1), 95-110.
- Li, Y.-M., & Yeh, Y.-S. (2010). Increasing trust in mobile commerce through design aesthetics. *Computers in Human Behavior*, 26(4), 673-684.
- Liao, C., Liu, C.-C., & Chen, K. (2011). Examining the impact of privacy, trust and risk perceptions beyond monetary transactions: An integrated model. *Electronic Commerce Research and Applications*, 10(6), 702-715.
- Lu, J., Yao, J. E., & Yu, C.-S. (2005). Personal innovativeness, social influences and adoption of wireless Internet services via mobile technology. *The Journal of Strategic Information Systems*, 14(3), 245-268.
- Malaquias, R. F., & Hwang, Y. (2016). An empirical study on trust in mobile banking: A developing country perspective. *Computers in Human Behavior*, 54, 453-461.

-
- McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology. *Information systems research*, 13(3), 334-359.
- Mohammadi, H. (2015). A study of mobile banking loyalty in Iran. *Computers in Human Behavior*, 44, 35-47.
- Moss, G. (1999). Gender and consumer behaviour: Further explorations. *Journal of Brand Management*, 7(2), 88-100.
- OJK. (2017). Siaran Pers : Ojk Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital Wujudkan Perbankan Digital Di Indonesia (Vol. SP 05/DKNS/OJK/1/2017): OJK.
- Oliveira, T., Faria, M., Thomas, M. A., & Popovič, A. (2014). Extending the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM. *International journal of information management*, 34(5), 689-703.
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International journal of electronic commerce*, 7(3), 101-134.
- Sri Maharsi, F. F. (2006). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Dan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna Internet Banking Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 35-51.
- Sugiantoro, Y., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Personalization, Computer Self Efficacy, dan Trust Terhadap Perceived Usefulness Pada Pengguna Internet Banking di PT. Bank BRI (Persero), tbk. Cabang Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 4(1), 82-90.
- Wagner, M. K. (2001). Behavioral characteristics related to substance abuse and risk-taking, sensation-seeking, anxiety sensitivity, and self reinforcement. *Addictive behaviors*, 26(1), 115-120.
- Waluyo, C. A. (2018). Sejak awal tahun, bank sudah kurangi 341 kantor cabang. Retrieved 5 Mei, 2019, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/sejak-awal-tahun-bank-sudah-kurangi-341-kantor-cabang>
- Wang, S. W., Ngamsiriudom, W., & Hsieh, C.-H. (2015). Trust disposition, trust antecedents, trust, and behavioral intention. *The Service Industries Journal*, 35(10), 555-572.
- Yiu, C. S., Grant, K., & Edgar, D. (2007). Factors affecting the adoption of Internet Banking in Hong Kong-implications for the banking sector. *International journal of information management*, 27(5), 336-351.
- Zhou, T. (2012). Examining mobile banking user adoption from the perspectives of trust and flow experience. *Information Technology and Management*, 13(1), 27-37.

Pengaruh struktur modal, perputaran piutang dan devidend payout ratio terhadap harga saham

Edward Sidabutar¹, Siti Masyithoh², Yoremia Lestari Ginting³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: edward.sidabutar@gmail.com

²Email: siti.masyithoh@feb.unmul.ac.id

³Email: ginting.yoremia@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, perputaran piutang dan *dividend payout ratio* terhadap harga saham pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Harga saham perusahaan industri makanan dan minuman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor keuangan yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah variabel-variabel seperti struktur modal, perputaran piutang dan *dividend payout ratio* memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total sampel sebanyak 7 perusahaan dengan periode observasi (2010-2016). Data dikumpulkan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dividend payout ratio* berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, hal ini berarti bahwa *dividend payout ratio* memiliki peran dalam meningkatkan harga saham. Sedangkan struktur modal dan perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, hal ini berarti bahwa struktur modal dan perputaran piutang bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang baik oleh manajemen dalam membuat keputusan untuk menentukan besarnya harga saham.

Kata Kunci: Struktur modal; perputaran piutang; *dividend payout ratio*; harga saham

Effect of capital structure, accounts receivable turnover and dividend payout ratio on stock prices

Abstract

This research was conducted to determine the effect of capital structure, receivable turnover and dividend payout ratio on stock price at the food and beverages industry companies listed on the Indonesia stock exchange. Indonesia were affected by financial factors which can be measured from financial ratio. The aim of this study is to investigate the effect of capital structure, receivable turnover and dividend payout ratio to stock price at Food and beverages industry companies. The objects used in this study are food and beverage industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The total sample is 7 companies with the observation period (2010-2016). Retrieval of data using purposive sampling method. Data analysis using multiple linear regression. The results of the study show that dividend payout ratio affect company's stock prices, this means that dividend payout ratios have a role in increasing stock prices. While the capital structure and receivable turnover does not affect stock prices, this means that capital structure and receivable turnover is not the main thing that needs to be considered and made a good benchmark by management in making decisions to determine the amount of stock prices.

Keywords: Capital structure; receivable turnover; dividend payout ratio; stock price

PENDAHULUAN

Perusahaan pada umumnya mempunyai keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan itu sendiri dalam mengelola dana yang dimiliki. Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi yang bisa digunakan adalah menanamkan hartanya di pasar modal dalam bentuk saham. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup baik dipasar modal karena dengan kita memiliki saham disuatu perusahaan maka akan ada keuntungan yang dapat kita terima dalam bentuk dividen yang diberikan perusahaan. Saham juga merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat mudah untuk dijual kembali di pasar modal jika kita memerlukan dana.

Harga saham mengalami fluktuasi didalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun penyebab perubahan harga saham dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal disebut juga faktor fundamental adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan tersebut sehingga bagi para investor dan perusahaan dapat dikatakan penting, seperti kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik berupa deviden maupun capital gain yang akan diterima oleh pemegang saham, tingkat pengembalian investasi, tingkat resiko perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor non-fundamental biasanya bersifat makro, seperti situasi politik dan keamanan, perubahan nilai tukar mata uang, turunnya nilai suku bunga bank, serta rumor-rumor hasil rekayasa para spekulasi atau orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut, Fahmi (2015).

Seorang investor dalam melakukan investasi pada perusahaan biasanya tidak mempelajari secara mendalam bagaimana suatu laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat menguntungkan investor tersebut. Dari beberapa kasus investor dalam melakukan investasi hanya melihat bagaimana pergerakan harga saham pada suatu perusahaan apakah baik atau buruk dan melihat rasio keuangan yang tidak begitu lengkap ditampilkan sebuah perusahaan sehingga banyak para investor yang mengalami kerugian pada saat investasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang menguji pengaruh struktur modal, perputaran piutang dan dividend payout ratio terhadap harga saham. Menurut Fiebriyanti (2013), yang menguji pengaruh dividend payout ratio, struktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dengan hasil struktur modal dan dividend payot ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Akan tetapi Mutia dan Arfan (2013), yang menguji pengaruh dividend payout ratio dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan non keuangan di bursa efek indonesia mendapatkan hasil yang berbeda yaitu dividend payout ratio dan struktur modal berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Alim (2009), yang menguji pengaruh perputaran piutang dan persediaan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia dengan hasil perputaran piutang berpengaruh terhadap harga saham. Akan tetapi Firdaus (2013), yang menguji pengaruh rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan rasio pasar terhadap harga saham syariah pada barang konsumsi yang terdapat di bursa efek syariah mendapatkan hasil yang berbeda yaitu perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian variabel-variabel penting lainnya didalam laporan keuangan yang mempengaruhi harga saham dengan menjadikan perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Piutang dan Divdend Payout Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kajian Pustaka

Signaling theory

Menurut Jogiyanto (2014), Teori Signal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme

signalling yang berbeda-beda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan, dan kemungkinan lain pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dan demikian juga sebaliknya.

Laporan keuangan

Menurut Sutrisno (2008), "Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni 1. Neraca dan (2) Laporan Laba Rugi. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan

Struktur modal

Menurut Martono dan Harjito (2013), struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbalan pendanaan perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan total hutang terhadap total ekuitas. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Profitabilitas

Perputaran piutang

Menurut Kasmir (2011), Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama pengihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.

Dividend payout ratio

Pengertian rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menurut Hanafi dan Halim (2009), bahwa "Dividend payout ratio merupakan rasio pembayaran dividen yang melihat bagian earnings (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan". Jumlah yang tidak dibayarkan dalam dividen kepada pemegang saham dipegang oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Jumlah yang disimpan oleh perusahaan disebut saldo laba ditahan.

Harga saham

Menurut Sartono (2008), harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh investor.

METODE

Pengukuran variabel dan definisi operasional

Variabel independen

Struktur modal

Menurut Martono dan Harjito (2010), struktur modal adalah perbandingan atau imbalan pendanaan perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan total hutang terhadap total ekuitas". Untuk mengukur struktur modal melalui pendekatan tradisional maka dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Perputaran piutang

Menurut Kasmir (2011), Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama pengihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Untuk mengukur perputaran piutang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Rata - rata piutang}} = \text{..kali}$$

Dividend payout ratio

Menurut Hanafi dan Halim (2009), bahwa "Dividend payout ratio merupakan rasio pembayaran dividen yang melihat bagian earnings (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Untuk mengukur *dividend payout ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dividend payout ratio} = \frac{\text{dividend}}{\text{laba bersih}} \times 100\%$$

Variabel dependen

Harga saham

Menurut Sunariyah (2011), harga saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Harga saham dapat dipengaruhi oleh situasi pasar antara lain harga saham dipasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan go public, berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Ukuran untuk variabel harga saham merupakan harga penutupan (closing price), Sartono (2010).

Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik sebagai berikut:

Uji normalitas

Uji data statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi kenormalan data diantaranya dengan menggunakan uji normal *P plot of regression standardized residual* variabel independent untuk melihat penyebaran data (titik), dimana

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*), yaitu:

Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan *VIF* < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Jika *tolerance* < 0.10 dan *VIF* > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antar satu observasi ke observasi lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* yaitu dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual).

Uji autokorelasi

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi adalah dengan melakukan Uji *Durbin Watson* (Dw). Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi :

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah struktur modal dan perputaran piutang, sedangkan variabel dependen adalah Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian periode 2010-2016.

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Nilai F) dengan nilai (α) sebesar 0,05 (5%). Nilai F dapat diperoleh pada tabel ANOVA.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel independen pada model dapat diterangkan oleh variabel dependen.

Pengujian hipotesis (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan (nilai t) dengan (α) sebesar 0,005 (5%)

HASIL DAN PEMBAHASAN

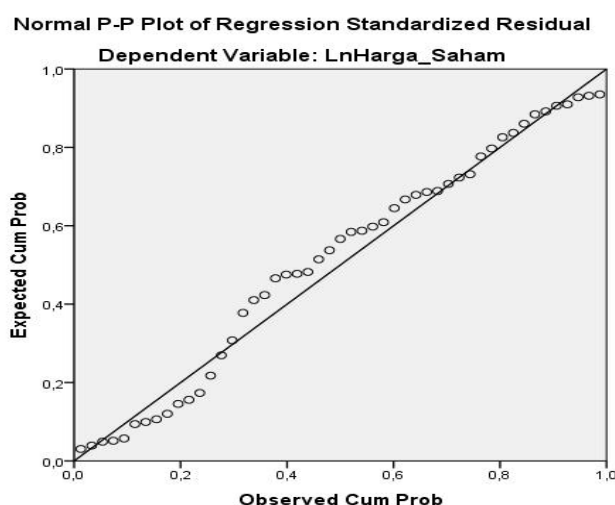
Hasil analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Descriptive Statistics

| Variabel | Jumlah Data | Nilai Minimum | Nilai Maksimum | Nilai Mean | Nilai Std.Deviasi |
|------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|-------------------|
| Ln Harga Saham (Y) | 49 | 0,355 | 9,39 | 7,4645 | 1,65704 |
| Struktur Modal (x_1) | 49 | 18,31 | 302,86 | 100,2253 | 59,84789 |
| Perputaran Piutang (x_2) | 49 | 2,51 | 14,41 | 8,7623 | 3,29023 |
| DPR (x_3) | 49 | 3,07 | 100,66 | 24,0678 | 30,21113 |

Uji normalitas



Gambar 1. Grafik normal p-plot

Pada grafik normal P-Plot, terlihat titik-titik data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

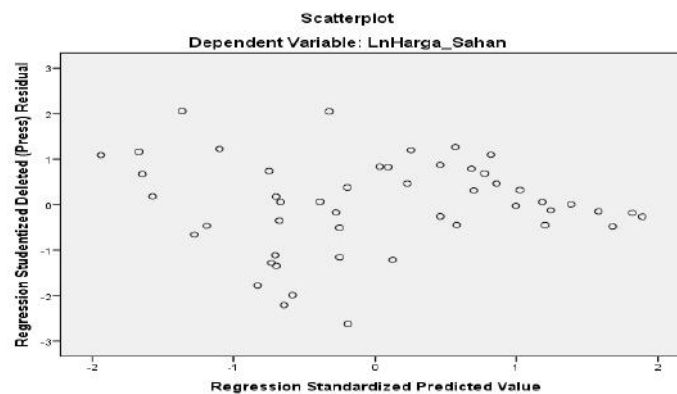
Uji multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collinearity Statistics | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| 1 Struktur Modal | ,904 | 1,107 |
| Perputaran Piutang | ,970 | 1,031 |
| DPR | ,925 | 1,082 |

Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilihat dari grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu:



Gambar 2. Hasil uji heterokedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot di atas tampak bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model layak dipakai untuk mengetahui Harga Saham berdasar masukan dari variabel independennya.

Uji autokorelasi

Tabel 3. Hasil uji autokorelasi

Model Summary^b

| Model | Nilai R | Nilai R Square | Nilai Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Nilai Durbin Watson |
|-------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | ,530 ^a | ,280 | ,232 | 1,14538 | ,629 |

Analisis regresi linier berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel Struktur Modal (x1), Perputaran Piutang (x2) dan Leverage (x3) terhadap Harga Saham (Y) pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI, maka dalam penelitian ini menggunakan data variabel pada periode 2010 - 2016 dari laporan keuangan perusahaan logam dan lainnya yang terdaftar di BEI yang telah dipublikasikan. Berikut dapat dilihat hasil analisis pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil analisis regresi linier berganda

| Variabel | Unstandrized | Coefficients | Standarized Coefficients |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| | Nilai B | Nilai Std. Error | Nilai Beta |
| Constant | 5,991 | ,519 | |
| Struktur Modal | ,001 | ,001 | ,190 |
| Perputaran Piutang | ,088 | ,051 | ,223 |
| DPR | ,029 | ,008 | ,471 |

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5. Hasil Uji kelayakan model (Uji F)

| Model | Niali F | Nilai Sig. |
|--------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 5,845 | ,002 ^b |
| Residual | | |
| Total | | |

Sumber: Hasil olah data

Analisis korelasi dan koefisien determinasi (R²)

Analisis Korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dan Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel independen pada model dapat diterangkan oleh variabel dependen.

Uji autokorelasi

Tabel 6. Hasil uji autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,530 ^a | ,280 | ,232 | 1,14538 | ,629 |

Analisis regresi linear berganda

Tabel 7. Hasil analisis regresi linear berganda

| Model | Unstandardized coefficients | | Standardized coefficients |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| (Constant) | 5,991 | ,519 | |
| 1 Struktur modal | ,001 | ,001 | ,190 |
| Perputaran Piutang | ,088 | ,051 | ,223 |
| DPR | ,029 | ,008 | ,471 |

Pengujian hipotesis (uji t)

Tabel 8. Hasil analisis uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 5,991 | ,519 | | 11,547 | ,000 |
| 1 Struktur modal | ,001 | ,001 | ,190 | 1,429 | ,160 |
| Perputaran Piutang | ,088 | ,051 | ,223 | 1,733 | ,090 |
| DPR | ,029 | ,008 | ,471 | 3,578 | ,001 |

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (x1, x2) secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil uji t tersebut diketahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Struktur Modal (x1), Perputaran Piutang (x2) dan Devidend Payout Ratio (x3) terhadap variabel dependen Harga Saham (Y) sebagai berikut:

Struktur mempunyai nilai signifikan 0,160 lebih besar dari 0,05 maka diputuskan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham

Perputaran piutang mempunyai nilai signifikan 0,090 lebih besar dari 0,05 maka diputuskan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham

Devidend Payout Ratio mempunyai nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka diputuskan bahwa Devidend Payout Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

Pembahasan hasil pengujian hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang terkait dengan judul, rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh struktur modal terhadap harga saham

Dari segi teori, hasil penelitian ini tidak mendukung signaling theory yang menyatakan demi meningkatkan nilai perusahaan, suatu perusahaan perlu memberikan informasi keuangan berupa struktur modal perusahaan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang bagi investor.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya struktur modal yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Struktur modal perusahaan yang tinggi ataupun rendah tidak akan mempengaruhi investor dalam melakukan investasi, karena tujuan investor melakukan investasi untuk mendapat deviden. selama perusahaan dapat membagikan deviden nilai struktur modal merupakan bukan suatu masalah.. Dengan demikian H1 ditolak artinya Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.

Pengaruh perputaran piutang terhadap harga saham

Dari segi teori, hasil penelitian ini tidak mendukung signaling theory yang menyatakan, Ketika sebuah perusahaan dapat mengelola piutang secara efisien akan berdampak baik pada kas yang dimiliki perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasional perusahaan dan tentunya itu juga berdampak baik bagi nilai perusahaan terutama pada harga sahamnya akan dapat meningkat karena kepercayaan investor terhadap perusahaan dalam mengelola dananya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya perputaran piutang yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Perputaran piutang perusahaan yang tinggi ataupun rendah tidak akan mempengaruhi investor dalam melakukan investasi, karena tujuan investor melakukan investasi untuk mendapat deviden. Selama perusahaan dapat membagikan deviden nilai perputaran piutang merupakan bukan suatu masalah. Dengan demikian H2 ditolak artinya Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.

Pengaruh devidend payout ratio terhadap harga saham

Dari segi teori, hasil penelitian ini mendukung signaling theory yang menyatakan Pembagian dividen sangat berpengaruh pada devidend payout ratio nya, jika devidend payout ratio yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor yang berpengaruh pula terhadap harga saham perusahaan tersebut. Dengan demikian devidend payout ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Dividend Payout Ratio yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham. Dividend Payout Ratio perusahaan yang tinggi ataupun rendah akan mempengaruhi investor dalam melakukan investasi, karena tujuan investor melakukan investasi untuk mendapat deviden. Jika suatu perusahaan tidak memiliki Dividend Payout Ratio yang cukup baik itu akan menjadi faktor utama investor tidak melakukan investasi, ketika permintaan saham perusahaan di pasar modal menurun akan menyebabkan harga perusahaan turun juga. Dengan demikian H3 diterima artinya Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hal ini menyimpulkan bahwa informasi struktur modal bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang baik oleh manajemen dalam membuat keputusan untuk menentukan besarnya harga saham.

Perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hal ini menyimpulkan bahwa informasi perputaran piutang bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang baik oleh manajemen dalam membuat keputusan untuk menentukan besarnya harga saham.

Industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti bahwa *devidend Devidend Payout Ratio* berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan *payout ratio* memiliki peran dalam meningkatkan harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrawit, Kusumawardani. 2009. Analisis Pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA pada Harga Saham dan dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2005-2009” Skripsi Akuntansi. Universitas Gunadama. Mahmudi.
- Ardi Nugroho, Listyawan. 2011. Pengaruh Modal Usaha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arfinrolianto. 2013. Teori Akuntansi Positif dan Akuntansi Normatif. Penerbit akuntansiumy.
- Alim, Fathul. 2009. Pengaruh perputaran piutang dan persediaan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia” Skripsi Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Arfan, Muhamad. 2013. Pengaruh Dividend Payout Ratio dan Struktur Modal terhadap Harga Saham syariah” Skripsi Akuntansi. Universitas Syiah Kuala.
- Bambang, Sugeng. 2009. Pengaruh struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 1, 37-48. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

-
- Edi, Subiyantoro dan Fransisca Andreani. 2003. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 171-180.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fiebriyanti. 2013. Pengaruh dividend payout ratio, struktur modal dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia” Skripsi Akuntansi. Universitas Udayana.
- Firdaus, Ahmad. 2013. Pengaruh Rasio Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas dan Rasio Pasar terhadap Harga Saham” Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fungki, dwi susanti. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal ilmu dan riset manajemen* vol. 2 no. 4.
- Gunardi, Ardi. 2010. Perubahan Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Food and Beverages. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Volume 3 No. 1.
- Hanafi, Mamduh H dan A. Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*, edisi 4. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.
- Harjito, D. A. dan Martono. 2013. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. EKONISIA, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- IAI. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jogiyanto. 2014. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Delapan. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kesuma, Ali. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 11 No. 1
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America : Wiley.
- Langi, Ravensca Fristangree. 2015. Pengaruh Perputaran Piutang dan Persediaan terhadap Profitabilitas” Skripsi Akuntansi. Universitas Mulawarman.
- Mutia, Evi. dan Arfan 2013. Pengaruh Dividend Payout Ratio dan Struktur Modal terhadap Harga Saham syariah” Skripsi Akuntansi. Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995.
- Reeve M James, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D. Djakman. 2013. *Pengantar Akuntansi-Adopsi Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Riyanto, B. 2011. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta.
- Sari Artika Weni. 2011. “Analisis Hubungan Antara Laba Bersih dan Arus Kas Operasi dengan Dividen Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” Skripsi Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Sartono, R. Agus. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Edisi 2)* . Yogyakarta: BPFE.
- Setiawan, Indra dan Pardiman. 2014. “Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned dan Return On Equity terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”. *Jurnal Nominal*. Vol. III. No. 1
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi Offset. Yogyakarta.
-

- Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Wicaksono & M Nasir. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2013. Semarang: Diponegoro Journal of Accounting–Vol. 3, No.4
- Widoatmodjo, Sawidji. 2012. Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.www.idx.co.id

Analisis rasio keuangan

Evi Lithfiyah¹, Irwansyah², Yunita Fitria³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: viie.sivinesw@gmail.com, Telp: +6285247512821

²Email: irwansyah@feb.unmul.ac.id

³Email: yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama periode 2012 hingga 2016 untuk melihat kemampuan perusahaan menggunakan rasio menggunakan rasio. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan memanfaatkan laporan keuangan dan laporan perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama periode penelitian mengalami peningkatan. Hasil perhitungan rasio likuiditas yang terdiri dari Quick Ratio dan Cash Ratio untuk periode 2012 hingga 2016 Pengukuran dan rasio solvabilitas yang menggunakan Total Debt Ratio to Equity untuk periode 2012-2016 turun. Untuk rasio aktivitas yang terdiri dari Perputaran Modal Kerja untuk periode 2012-2016, maka kenaikan dan Total Perputaran Aset untuk periode 2012-2016 menurun. Dan untuk rasio profitabilitas yang terdiri dari Net Profit Margin dari 2012 hingga 2016, maka Return on Investment pada periode 2012 hingga 2016 turun.

Kata Kunci: Likuiditas; solvabilitas; aktivitas; telekom profitabilitas

Financial analysis ratio

Abstract

This study was conducted to analyze the financial ratios of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk during the period of 2012 to 2016 to see the company's ability to use ratio using ratios. This study uses secondary data by making use of the financial statements and company reports. The analytical tool used in this study is to use liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios, and profitability ratios. Based on the results of this study indicated that the financial performance of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk during the study period has increased. The results of the calculation of liquidity ratios consisting of Quick Ratio and Cash Ratio for the period of 2012 to 2016 Measurement and solvency ratios that use the Total Debt Ratio to Equity for the period of 2012 to 2016 fell. For activity ratios consisting of Working Capital Turnover for the period of 2012 to 2016, then the increase and Total Asset Turnover for the period of 2012 to 2016 decreased. And for profitability ratios consisting of Net Profit Margin from 2012 to 2016, then Return on Investment in the period 2012 to 2016 fell.

Keywords: Liquidity; solvency; activity; profitability telekom

PENDAHULUAN

Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap (2016), rasio keuangan adalah “angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan”. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Sedangkan analisis rasio keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Menurut Fahmi (2015), analisis rasio keuangan adalah “instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan bersangkutan”. Menurut Hery (2018), analisis rasio keuangan adalah “analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan”.

Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Seperti PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disingkat INTI adalah BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 dasawarsa berperan sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja adalah perusahaan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (52,56%), dan 47,44% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). PT Telekomunikasi Indonesia memiliki peran ganda yaitu sebagai bisnis yang harus menghasilkan laba dan di lain pihak sebagai penunjang pembangunan, yang menuntut PT Telkom untuk memilih kinerja yang lebih baik untuk kepentingan pelanggannya. Dalam upaya menilai kinerja keuangan melalui perhitungan rasio keuangan dapat dilihat kemungkinan perusahaan pada periode berikutnya memberikan keuntungan signifikan bagi investor dalam dan luar negeri. Selain itu perusahaan memungkinkan untuk memprediksi pengeluaran di periode berikutnya demi mendapatkan laba yang ditargetkan.

Apabila dilihat dari perbedaan beberapa perusahaan jasa telekomunikasi sejenis, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memberikan layanan dari beberapa aspek dan lebih banyak diminati pengguna layanan jasa telekomunikasi. Sehingga, banyaknya peminat layanan jasa. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membuat perusahaan terus mengembangkan berbagai jenis produk. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dalam penilaian kinerjanya, pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa keadaan keuangan mencerminkan keadaan seutuhnya kinerja sebuah perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan umumnya menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Kelebihan pengukuran dengan metode tersebut memudahkan dalam perhitungannya selama historis tersedia. Sedangkan kelemahannya adalah metode tersebut tidak dapat mengukur kinerja perusahaan secara akurat. Maka dari itu menilai kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja keuangan kedepannya. Perusahaan didirikan dalam jangka waktu panjang untuk meningkatkan laba, jadi perusahaan harus diarahkan ke titik profitabilitas yang maksimal sehingga tingkat kinerja perusahaan akan membaik. Dimana perusahaan ini pun merupakan perusahaan yang sangat berkembang dan banyak dikenal oleh masyarakat.

METODE

Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan dokumentasi untuk memperoleh informasi dengan cara melihat data-data yang terdapat dalam dokumentasi-dokumentasi tempat usaha yang diperoleh dari internet dan data laporan keuangan di BEI (www.idx.co.id). Kemudian dengan menggunakan kepustakaan untuk memperoleh data skunder, seperti penelaahan buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Jangkauan penelitian ini dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan dikhususkan pada masalah yang berhubungan dengan kinerja laporan keuangannya ditinjau dari rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan penilaian periode tahun 2012 sampai tahun 2016. Rincian data yang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan pemecahan serta mempermudah pembahasan, maka data-data yang diperlukan untuk melengkapi tujuan penulisan ini adalah kondisi atau gambaran umum PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, struktur organisasi laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi tahun 2012-2016, dan neraca per 31 desember tahun 2012-2016.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Rasio likuiditas

Quick ratio

Menurut Sutrisno (2012), adalah “rasio yang membandingkan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan”.

Cash ratio

Menurut Sutrisno (2012), merupakan “rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar”.

Tabel 1. Standar industri rasio likuiditas

| No | Jenis Rasio | Standar Industri |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) | 2 kali |
| 2. | Rasio Tunai (<i>Quick Ratio</i>) | 1,5 kali |
| 3. | Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>) | 50% |

Rasio solvabilitas

Total debt to equity ratio

Menurut Sutrisno (2012), rasio ini digunakan untuk “mengukur persentase total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri”.

Tabel 2. Standar industri rasio solvabilitas

| No | Jenis rasio | Standar Industri |
|----|---|------------------|
| 1. | Total Utang Dibandingkan Dengan Total Aktiva (<i>Total Debt to Assets Ratio</i>) | 35 % |
| 2. | Total Utang Dibandingkan dengan Total Ekuitas (<i>Total Debt to Equity Ratio</i>) | 90% |

Rasio aktivitas

Working capital turnover

Menurut Sutrisno (2012), merupakan “salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja selama periode tertentu”.

Total assets turnover

Menurut Sutrisno (2012), merupakan rasio yang digunakan untuk “mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva”.

Tabel 3. Standar industri rasio aktivitas

| No | Jenis Rasio | Standar Industri |
|----|--|------------------|
| 1. | Perputaran Piutang (<i>Receivable Turnover</i>) | 15 kali |
| 2. | Perputaran Modal Kerja (<i>Working Capital Turnover</i>) | 6 kali |
| 3. | Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Assets Turnover</i>) | 5 kali |
| 4. | Perputaran Total Aset (<i>Total Assets Turnover</i>) | 2 kali |

Rasio profitabilitas

Net profit margin

Menurut Sutrisno (2012), merupakan “kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sesudah pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai”.

Return on investment

Menurut Sutrisno (2012), digunakan untuk mengukur “kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan”.

Tabel 4. Standar industri rasio profitabilitas

| No | Jenis Rasio | Standar Industri |
|----|--|------------------|
| 1. | Margin Laba Bersih (<i>Net Profit Margin</i>) | 20 % |
| 2. | Hasil Pengembalian Investasi (<i>Return On Investment/ROI</i>) | 30 % |
| 3. | Hasil Pengembalian Ekuitas (<i>Return On Equity/ ROE</i>) | 40 % |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguraikan bagaimana menggunakan rumus-rumus rasio dan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan

Tabel 5. Rasio

| No. | Keterangan | Tahun | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Rasio Likuiditas | | | | | |
| | <i>Quick ratio</i> | 1,14 kali | 1,15 kali | 1,05 kali | 1,34 kali | 1,18 kali |
| | Rata-rata standar industri | 1,5 kali | 1,5 kali | 1,5 kali | 1,5 kali | 1,5 kali |
| | Perubahan | Likuid | Likuid | Tidak Likuid | Likuid | Likuid |
| | <i>Cash ratio</i> | 55% | 52% | 55% | 79% | 75% |
| | Rata-rata standar industri | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | Perubahan | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid |
| 2 | Rasio Solvabilitas | | | | | |
| | <i>Total Debt to Equity Ratio</i> | 66% | 65% | 65% | 78% | 70% |
| | Rata-rata standar industri | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Perubahan | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid |
| 3 | Rasio Aktivitas | | | | | |
| | <i>Working Capital Trunover</i> | 20 kali | 17,8 kali | 45,4 kali | 8,2 kali | 14,6 kali |
| | Rata-rata standar industri | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali |
| | Perubahan | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid |
| | <i>Total Assets Trunover</i> | 0,69 kali | 0,65 kali | 0,63 kali | 0,62 kali | 0,65 kali |
| | Rata-rata standar industri | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali |
| | Perubahan | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid |
| 4 | Rasio Profitabilitas | | | | | |
| | <i>Net Profit Margin</i> | 23,8% | 24,4% | 23,7% | 22,8% | 25% |
| | Rata-rata standar industri | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | Perubahan | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid | Likuid |
| | <i>Return On Investment</i> | 16,4% | 15,8% | 15% | 14% | 16,2% |
| | Rata-rata standar industri | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| | Perubahan | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid | Tidak Likuid |

Rasio likuiditas

Rasio likuiditas dengan menggunakan quick ratio (rasio tunai/rasio cepat), merupakan jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan quick ratio menunjukkan bahwa setiap rupiah utang lancar sebesar 24.107.000.000 dijamin oleh aset lancar sebesar 27.973.000.000 dikurangi persediaan sebesar 579.000.000. Quick ratio perusahaan ini sebesar 1,14 kali untuk tahun 2012 yang berarti bahwa perusahaan likuid karena berada diatas standar industri. Kemudian setiap rupiah utang lancar sebesar 28.437.000.000 dijamin oleh aset lancar sebesar 33.075.000.000 dikurangi persediaan sebesar 509.000.000. Quick ratio perusahaan ini sebesar 1,15 kali untuk tahun 2013 yang berarti bahwa perusahaan berada pada posisi liquid karena sesuai standar

perusahaan. Adapula setiap rupiah utang lancar sebesar 32.318.000.000 dijamin oleh aset lancar sebesar 34.294.000.000 dikurangi persediaan sebesar 383.000.000. Quick ratio perusahaan ini sebesar 1,05 kali untuk tahun 2014 yang berarti bahwa perusahaan tidak likuid karena berada dibawah standar industri. Dan setiap rupiah utang lancar sebesar 53.413.000.000 dijamin oleh aset lancar sebesar 47.912.000.000 dikurangi persediaan sebesar 355.000.000. Quick ratio perusahaan ini sebesar 1,34 kali untuk tahun 2015, setiap rupiah utang lancar sebesar 39.701.000.000 dijamin oleh aset lancar sebesar 47.701.000.000 dikurangi persediaan sebesar 584.000.000. Quick ratio perusahaan ini sebesar 1,18 kali untuk tahun 2016 yang berarti perusahaan berada pada posisi likuid karena ada diatas rata-rata standar industri 1,5 kali.

Hasil penelitian rasio likuiditas dengan menggunakan cash ratio atau disebut rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah utang lancar sebesar 24.107.000.000 dijamin kas sebesar 13.118.000.000 dan bank menutupi utang lancar sebesar 55% untuk tahun 2012, setiap rupiah utang lancar sebesar 28.437.000.000 dijamin kas sebesar 14.696.000.000 dan bank menutupi utang lancar sebesar 52% untuk tahun 2013, setiap rupiah utang lancar sebesar 32.318.000.000 dijamin kas sebesar 17.672.000.000 dan bank menutupi utang lancar sebesar 55% untuk tahun 2014, setiap rupiah utang lancarsebesar 35.413.000.000 dijamin kas sebesar 28.117.000.000 dan bank menutupi utang lancar sebesar 79% untuk tahun 2015, dan setiap rupiah utang lancar sebesar 39.762.000.000 dijamin kas sebesar 29.767.000.000 dan bank menutupi utang lancar sebesar 75% untuk tahun 2016 yang berarti dimana perusahaan ini dari tahun ketahun berada pada posisi likuid karena ada diatas rata-rata standar industri 50%. Dalam teori menurut Lukman Syamsudin (2013), rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.

Jika dilihat dari tahun ketahun perusahaan mengalami naik turun, akan tetapi perusahaan ini masih berada pada posisi likuid. Berarti perusahaan mampu untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Dengan demikian untuk rasio likuiditas pada tahun 2012 dan 2013 perusahaan likuid akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2015, dan sedikit penurunan lagi pada tahun 2016 atas dasar tersebut dapat dinyatakan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam 5 tahun terakhir berada dalam kondisi likuid. Hal ini disebabkan perusahaan berada diatas standar Industri kedua rasio tersebut.

Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas dengan menggunakan total utang dibandingkan dengan total ekuitas merupakan rasio yang digunakan menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk pinjaman utang. Dimana menunjukkan bahwa setiap rupiah modal sebesar 66.978.000.000 dijamin oleh total hutang sebesar 44.391.000.000 pada tahun 2012 sebesar 66%, setiap rupiah modal sebesar 77.424.000.000 dijamin oleh total hutang sebesar 50.527.000.000 pada tahun 2013 sebesar 65%, setiap rupiah modal sebesar 85.992.000.000 dijamin oleh total hutang sebesar 55.830.000.000 pada tahun 2014 sebesar 65%, setiap rupiah modal sebesar 93.428.000.000 dijamin oleh total hutang sebesar 72.745.000.000 pada tahun 2015 sebesar 78%, dan setiap rupiah modal sebesar 105.544.000.000 dijamin oleh total hutang sebesar 74.067.000.000 pada tahun 2016 sebesar 70% dimana jika dilihat dari tahun ketahun perusahaan mengalami penurunan. Karena perusahaan berada dibawah standar industri sebesar 90%, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak likuid dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

Dalam teori menurut Harahap (2011), *Leverage ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan. Dari perhitungan yang telah dilakukan untuk rasio solvabilitas, dapat diambil kesimpulan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak mampu membayar hutang-hutangnya dengan aset yang dimiliki, dikarenakan menurunnya nilai aset tetap 2012 sampai dengan 2014. Namun mengalami peningkatan

pada tahun 2015 akan tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Dimana yang merupakan perusahaan tidak likuid karena berada dibawah rata-rata standar industri.

Rasio aktivitas

Rasio aktivitas dengan menggunakan perputaran modal kerja menurut Kasmir (2016), merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam satu periode. Dengan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah modal sebesar 3.866.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 77.143.000.000 dengan total 20 kali untuk tahun 2012, setiap rupiah modal sebesar 4.638.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 82.967.000.000 dengan total 17,9 kali untuk tahun 2013, setiap rupiah modal sebesar 1.976.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 89.696.000.000 dengan total 45,4 kali untuk tahun 2014, setiap rupiah modal sebesar 12.499.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 102.470.000.000 dengan total 8,2 kali untuk tahun 2015 dan setiap rupiah modal sebesar 7.939.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 116.333.000.000 dengan total 14,6 kali untuk tahun 2016 dimana perusahaan ini dari tahun ketahun berada pada posisi likuid karena ada diatas rata-rata standar industri yaitu 6 kali.

Hasil penelitian rasio aktivitas dengan menggunakan perputaran total aset menurut Kasmir (2016), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva. Dengan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah total aset sebesar 111.369.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 77.143.000.000 dengan total 0,69 kali untuk tahun 2012, setiap rupiah total aset sebesar 127.951.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 82.967.000.000 dengan total 10,65 kali untuk tahun 2013, setiap rupiah total aset sebesar 141.822.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 89.696.000.000 dengan total 0,63 kali untuk tahun 2014, setiap rupiah total aset sebesar 166.173.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 102.470.000.000 dengan total 0,62 kali untuk tahun 2015, dan setiap rupiah total aset sebesar 179.611.000.000 dijamin oleh penjualan bersih sebesar 116.333.000.000 dengan total 0,65 kali untuk tahun 2016. Dimana jika dilihat dari tahun ketahun perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan perusahaan berada pada posisi tidak likuid dari standar industri sebesar 2 kali.

Dalam teori menurut Kasmir (2016), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dapat disimpulkan untuk rasio aktivitas dengan menggunakan perhitungan perputaran modal kerja pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun, tetapi tetap berada diatas standar industri. Akan tetapi untuk rasio aktivitas yang menggunakan perhitungan perputaran total aset pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun, namun berada dibawah standar rata-rata industri. Atas dasar tersebut dapat dinyatakan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam 5 tahun berada dalam kondisi likuid pada perhitungan perputaran modal kerja akan tetapi tidak likuid untuk perputaran total asetnya.

Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas dengan menggunakan margin laba bersih mengukur tingkat laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Dengan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah penjualan bersih sebesar 77.143.000.000 dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 18.362.000.000 dengan total 23,8% untuk tahun 2012, setiap rupiah penjualan bersih sebesar 82.967.000.000 dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 20.290.000.000 dengan total 22,4% untuk tahun 2013, setiap rupiah penjualan bersih sebesar 89.696.000.000 dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 21.274.000.000 dengan total 23,7% untuk tahun 2014, setiap rupiah penjualan bersih sebesar 102.470.000.000 dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 23.317.000.000 dengan total 22,8% untuk tahun 2015, dan setiap rupiah penjualan bersih sebesar 116.333.000.000 dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 29.172.000.000 dengan total 25% untuk tahun 2016. Dimana jika dilihat dari tahun ketahun perusahaan mengalami peningkatan yang mengakibatkan perusahaan berada pada posisi likuid dari standar industri sebesar 20%.

Hasil penelitian rasio profitabilitas dengan menggunakan hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Dengan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah total aset dijamin oleh laba setelah pajak sebesar 16,4% untuk

tahun 2012, 15,8% untuk tahun 2013, 15% untuk tahun 2014, 14% untuk tahun 2015, dan 16,2% untuk tahun 2016. Dimana jika dilihat dari tahun ketahun perusahaan mengalami penurunan dan berada dibawah rata-rata yang mengakibatkan perusahaan berada pada posisi tidak likuid dari standar industri sebesar 30%.

Dalam teori menurut Sutrisno (2011), merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Dapat disimpulkan untuk rasio profitabilitas dengan menggunakan perhitungan margin laba bersih pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun, tetapi tetap berada diatas standar industri. Akan tetapi untuk rasio profitabilitas yang menggunakan perhitungan hasil pengembalian investasi pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami naik turun, namun berada dibawah standar rata-rata industri. Atas dasar tersebut dapat dinyatakan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam 5 tahun berada dalam kondisi likuid pada perhitungan margin laba bersih akan tetapi tidak likuid untuk hasil pengembalian investasinya.

Dari hasil pembahasan keseluruhan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama melakukan penelitian berkaitan dengan laba, menggunakan purposive sampling dan sama-sama menggunakan perusahaan jasa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak menggunakan perhitungan current ratio, total debt to assets ratio dan return on equity.

SIMPULAN

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan dari hasil analisi laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama 5 tahun terakhir yang telah dibahas sebelumnya peneliti menarik kesimpulan:

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi milik BUMN dan saham Telkom diperdagangkan di BEI.

Dalam rasio likuiditas dengan menggunakan alat analisis quick ratio dan cash ratio dari tahun 2012 dan 2013 perusahaan dalam keadaan likuid, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan rata-rata standar industri perusahaan masih dapat dikatakan likuid, karena masih berada diatas rata-rata standar industri.

Dalam rasio solvabilitas dengan menggunakan alat analisis total debt to equity ratio dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari hasil pembahasan bahwa perusahaan berada di posisi tidak likuid dalam memenuhi kewajibannya yang berada dibawah rata-rata standar industri.

Dalam rasio aktivitas dengan menggunakan alat analisis work capital turnover dari tahun 2012 perusahaan mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 mengalami penurunan, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan, akan tetapi pada tahun 2015 perusahaan sangat mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Naik turunnya yang dialami perusahaan tidak berdampak, sebab masih berada diatas setandar rata-rata industri.

Dalam rasio aktivitas dengan menggunakan alat analisis total assets turnover dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan akan tetapi perusahaan dalam keadaan tidak likuid karena berada dibawah rata-rata standar industri.

Dalam rasio profitabilitas dengan menggunakan alat analisis net profit margin dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami naik turun akan tetapi penurunan itu tidak berdampak, sebab masih berada diatas setandar rata-rata industri.

Dalam rasio profitabilitas dengan menggunakan alat analisis return on investment dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan begitu perusahaan dalam keadaan tidak baik karena berada dibawah rata-rata standar industri.

Tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan laporan keuangan yang diperbandingkan terhadap keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sudah baik. Hanya saja untuk beberapa rasio yang terjadi penurunan persentase.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, Fitria. 2016. Analisis Rasio Keuangan Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Mulawarman. Samarinda.

-
- Fahmi, Irham. 2015, Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Hadi, Danar. 2013. Analisis Rasio Keuangan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI di Dewantara Jember. UNI Maulana Malik. Malang.
- Harahap, Sofyan S. 2016, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan Ke-13, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hery. 2018. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit PT Grasendo. Jakarta
- Husnan, S dan E. Pujiastuti. 2015. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Ketujuh. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan UPP STIM YKNP. Yogyakarta.
- Irmayanti. 2016. Analisis Rasio Keuangan Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Samarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Jumingan. 2017, Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmianti. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pada PLN (Perseroan) Area Samarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Kasmir. 2016, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-9, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Margaretha, Farah. 2011. Manajemen Keuangan untuk Manajer Non Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Riski, Mirsa. 2014. Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. STIE Perbanas. Surabaya.
- Riyanto, Bambang. 2010. Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta.
- Samryn. 2011, Akuntansi Manajemen, Penerbit Kencana.
- Sartono, Agus. 2008, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2017. Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Pusaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sunyoto, Danang. 2013. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Edisi Kedua. Yogyakarta: Media Persindo.
- Sutrisno. 2012, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Syamsudin, Lukman. 2013. Manajemen Keuangan Perusahaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Analisis survei minat studi siswa sma/smk/ma terhadap program studi akuntansi manajerial di kalimantan timur

Hendra Sanjaya Kusno^{1*}, Dahyang Ika Leni Wijayani²

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

¹Email: hendra.sanjaya@poltekba.ac.id

²Email: dahyang.ika@poltekba.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat besarnya potensi lulusan SMA/SMK/MA di Kalimantan Timur yang berminat melanjutkan jenjang pendidikan D4 Akuntansi Manajerial. Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMA/SMK/MA Kelas XII Kalimantan Timur yang diwakili oleh Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Samarinda. Metode sampling yang digunakan adalah metode *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui metode penyebaran kuesioner. Data akan dianalisis menggunakan tabulasi frekuensi, persentase dengan Ms. Excel dan menggunakan diagram *pie*. Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 83 responden atau 57% dari total 145 responden yang memilih konsentrasi akuntansi, menginginkan jenjang pendidikan D4. Sebanyak 51 responden atau 35% dari total 145 responden yang memilih jurusan akuntansi, menginginkan program studi akuntansi manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi institusi khususnya Politeknik Negeri Balikpapan dalam membuka program studi baru di jurusan akuntansi.

Kata Kunci: Minat studi; akuntansi; program studi akuntansi manajerial

Analysis of survey studies of high school/high school/MA student interest in managerial accounting courses in East Kalimantan

Abstract

Student interest on managerial accounting in West Kalimantan will be observed in this research. The reserach object are final year students in senior high school, involve Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara and Samarinda. The sampling method is convenience sampling through questionnaire. We use primary data and will be analyze with frequency tabulation, percentage and pie diagram through microsoft excel. We find that 75% or 83 from 145 respondents prefers to continues their study on diploma 4/applied bachelor in accounting. Our findings, 35% or 51 from 145 respondents prefers to continues study on managerial accounting. We hope that this result can be applied by Politeknik Negeri Balikpapan in opening new study program.

Keywords: *Student interest; accounting; managerial accounting study program*

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal yang terpenting bagi negara Indonesia untuk maju dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Sejumlah program kerja telah dicanangkan dan direalisasikan untuk penguatan mutu SDM masyarakat Indonesia. Dapat ditarik 'benang merah' yang kuat terkait komitmen pemerintah pada pembangunan SDM. Sejumlah program tersebut menjadi dasar yang penting untuk menyiapkan bonus demografi pada 2030 yang terjadi di Indonesia (www.detik.com). Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat memperketat persaingan dan tuntutan di dunia kerja. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sejumlah kompetensi yang dimiliki tidak dapat dibantahkan lagi. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia, Indriyanti & Ivada (2013).

Jenjang pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui sebuah lembaga pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi dan berjenjang dari pendidikan paling rendah sampai dengan pendidikan tertinggi. Jenjang pendidikan pada pendidikan formal terdiri dari, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama sembilan tahun, diselenggarakan enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan dasar ini adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi nasional (Wajib Belajar). Tujuannya adalah memberikan bekal berupa kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar, dengan waktu tempuh pendidikan selama tiga tahun. Tujuannya adalah melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam memasuki dunia kerja maupun pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademis maupun kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Siswa kelas XII di SMA/SMK/MA yang akan melanjutkan pendidikan tinggi akan lebih aktif untuk mencari informasi tentang Perguruan Tinggi mana yang akan menjadi tujuannya selanjutnya. Minat dari siswa SMA/SMK/MA ini akan mempengaruhi keputusannya dalam memilih jurusan ataupun program studi yang akan ditempuh setelah lulus di Pendidikan Menengah. Politeknik Negeri Balikpapan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Timur yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, selalu berusaha melakukan pengembangan diri dan menyediakan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu cara untuk tujuan tersebut adalah dengan menyediakan pilihan jurusan dan program studi yang dibutuhkan oleh industri di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.

Kebutuhan industri terhadap kompetensi pegawai atau karyawan berlatarbelakang pendidikan akuntansi semakin tinggi. Untuk itu Politeknik Negeri Balikpapan di Tahun Ajaran 2019/2020 akan membuka Program Studi D-IV Akuntansi Manajerial. Untuk itu perlunya dilaksanakan survei dan analisis terhadap minat siswa SMA/SMK/MA untuk melanjutkan pendidikannya, serta analisis potensi calon mahasiswa yang akan menjadi peserta didik dibidang kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja tersebut. Sehingga, Politeknik Negeri Balikpapan dapat melaksanakan pengembangan diri yang baik dan terarah sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi dipasar kerja.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian penelitian deskriptif kuantitatif, yang akan mendeskripsikan keadaan atau situasi kondisi yang terjadi pada saat sekarang dengan sistematis dan faktual. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas XII SMA/SMK/MA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, baik sekolah negeri maupun swasta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah siswa kelas XII SMA/SMK/MA di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu per satu calon responden. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode tabulasi frekuensi dan persentase dengan Microsoft Excel, serta menggunakan Diagram Pie.

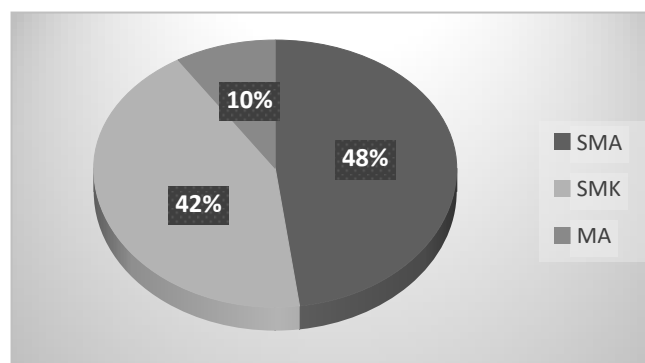
HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini adalah siswa SMA/SMK/MA kelas XII tahun ajaran 2018/2019. Pengambilan data dilaksanakan tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 2 April 2019. Jumlah responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebanyak 700 responden dan tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Tabel 1. Sebaran responden berdasarkan kabupaten/kota

| No. | Kabupaten / Kota | Jumlah |
|---------------|---------------------|------------|
| 1 | Balikpapan | 347 |
| 2 | Kutai Kartanegara | 112 |
| 3 | Penajam Paser Utara | 213 |
| 4 | Samarinda | 28 |
| JUMLAH | | 700 |

Kota Balikpapan diwakilkan oleh 4 SMK, 3 SMA dan 1 MA. Kemudian, Kabupaten Penajam Paser Utara diwakilkan oleh 2 SMA dan 3 SMK. Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara diwakilkan oleh 2 SMK dan Kota Samarinda 1 SMK. Di bawah ini disajikan data jenis sekolah SMTA yang menjadi responden.

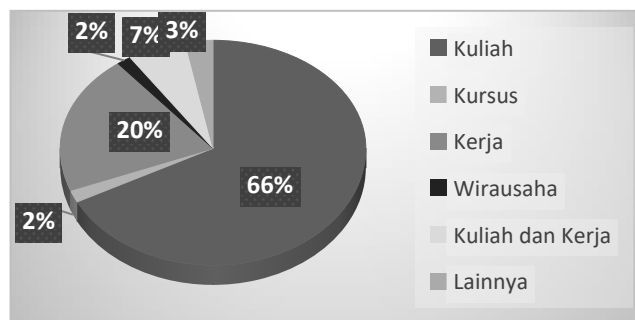


Gambar 1. Klasifikasi responden berdasarkan jenis smta

Rencana responden setelah lulus sma/smk/ma

Pertanyaan pertama dalam kuesioner penelitian ini adalah rencana responden setelah lulus dari SMTA. Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (Kuliah) terlebih dahulu atau menghasilkan uang dengan bekerja. Dari 700 responden, sebanyak 472 responden (67%) memilih untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Kemudian, sebanyak 137 responden (20%) memilih untuk bekerja, 12 responden (2%) memilih untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kursus, 11 responden (2%)

memilih untuk berwirausaha, dan 22 responden (3%) memilih pilihan lainnya (Polri, TNI, dll). Sedangkan, sebanyak 46 (6%) responden memilih untuk kuliah dan bekerja, artinya responden ingin berkuliah dan mengisi waktu luang yang dimilikinya untuk bekerja paruh waktu.

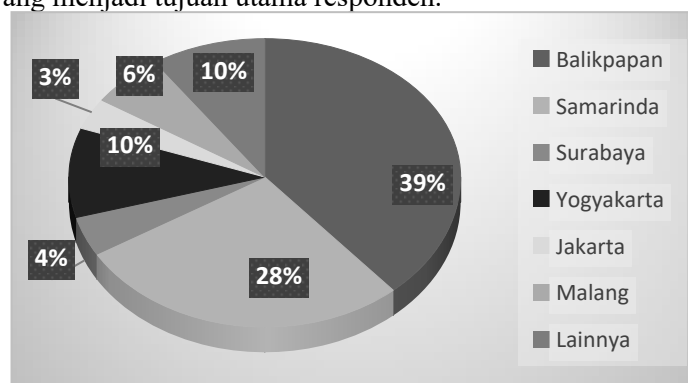


Gambar 2. Rencana setelah lulus smta

Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian lebih banyak yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Keinginan siswa kelas XII di Kalimantan Timur untuk melanjutkan jenjang studi tergolong tinggi. BPS (2018) merilis data rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia, Kalimantan Timur termasuk dalam provinsi teratas yang penduduknya sekolah lebih dari 10 tahun. Jika dibandingkan dengan hasil survei rencana responden setelah lulus jenjang pendidikan, persentase yang paling tinggi adalah melanjutkan kuliah, senada dengan riset yang dilakukan oleh BPS (2018).

Kota yang menjadi tujuan utama untuk kuliah

Pertanyaan kedua dalam kuesioner penelitian ini adalah kota yang menjadi tujuan utama untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi setelah lulus dari SMTA. Dalam kuesioner penelitian disediakan beberapa pilihan kota yang menjadi favorit pelajar di Indonesia, seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Balikpapan, Samarinda dan pilihan Lainnya dengan memberikan kolom untuk responden menuliskan kota yang diinginkan. Pada kolom Lainnya jawaban responden cukup bervariasi, Malang, Semarang, Bandung, Makassar, Jember, dan beberapa kota lainnya. Jumlah responden yang memilih untuk berkuliah dari pertanyaan pertama adalah sebanyak 518 responden. Kemudian, sebanyak 200 responden memilih Balikpapan (39%), 144 responden memilih Samarinda (28%), 22 responden memilih Surabaya (4%), 50 responden memilih Yogyakarta (10%) dan 18 responden memilih Jakarta (3%), serta sebanyak 52 responden memilih Lainnya (10%) dengan variasi jawaban berbeda. Hal yang menarik adalah sebanyak 32 responden (6%) menuliskan Malang sebagai tujuan utama mereka untuk berkuliah, sehingga penulis menghitung dan menampilkan Kota Malang sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan utama responden.



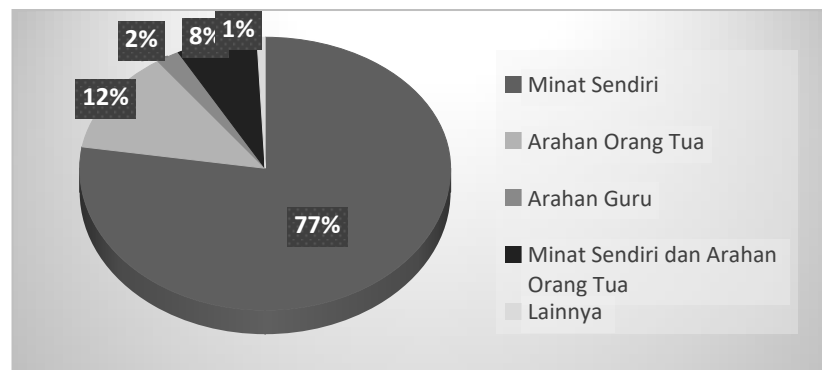
Gambar 3. Kota tujuan untuk kuliah

Balikpapan menjadi kota yang paling diminati untuk melanjutkan studi, sebanyak 39%. Di Balikpapan, terdapat dua Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi swasta. Balikpapan merupakan kota kedua terbesar di pulau Kalimantan setelah kota Samarinda dilihat dari segi jumlah penduduk. Hasil survey *we love cities* yang diselenggarakan oleh WWF (2015), menempatkan Balikpapan sebagai kota paling dicintai di dunia dari 47 kota lainnya di dunia. Dalam survei WWF di tahun 2019, hanya ada 3 kota di Indonesia yang masuk nominasi kota paling dicintai di dunia, yaitu

Balikpapan, Bogor dan Jakarta. Data BPS Kaltim (2019) menunjukkan bahwa diantara semua provinsi di Kalimantan Timur, Balikpapan masuk dalam rata-rata upah/gaji bersih paling tinggi diantara kabupaten dan kota lainnya. Hal – hal tersebut yang kemungkinan besar mendorong calon siswa SMA/SMK/MA memilih Balikpapan sebagai kota untuk melanjutkan studi, dikarenakan melihat sisi kenyamanan tinggal dan prospek kerja ke depan setelah lulus, dimana banyak perusahaan multinasional ada di Balikpapan dengan standar upah/gaji yang tinggi.

Alasan memilih perguruan tinggi

Pertanyaan selanjutnya dalam kuesioner penelitian ini adalah alasan memilih Perguruan Tinggi setelah lulus dari SMTA. Hasil survei untuk 518 responden ditunjukkan dalam diagram lingkaran di bawah ini:

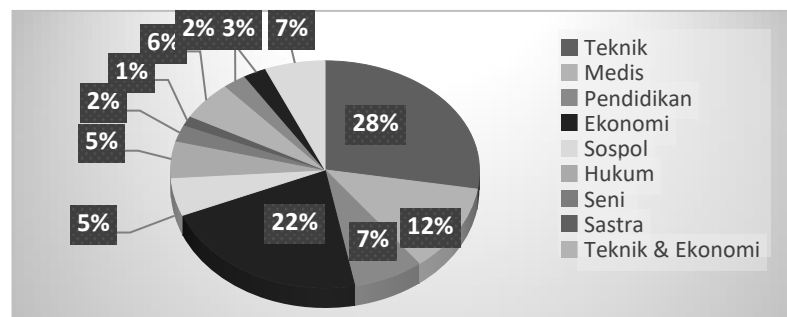


Gambar 4. Alasan memilih perguruan tinggi

Mayoritas responden memiliki alasan karena minat sendiri sebanyak 401 responden (77%). Kemudian, 63 responden karena arahan orang tua (12%), 11 responden karena arahan guru (2%), dan 39 responden karena minat sendiri dan didukung oleh arahan orang tua (8%). Jika dilihat dari hasil tersebut, siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi memang karena keinginan dan minatnya sendiri, bukan karena keinginan orang lain.

Ketertarikan bidang studi

Pertanyaan keempat dalam kuesioner penelitian ini adalah ketertarikan responden terhadap bidang studi di SMTA. Dari 518 responden, ketertarikan responden terhadap bidang studi didominasi oleh bidang studi Teknik, sebanyak 143 responden (28%) dan bidang studi Ekonomi mencapai 113 responden. (22%). Kemudian, bidang studi lainnya yaitu, Medis sebanyak 62 responden (12%), Pendidikan 38 responden (7%), Sosial Politik 27 responden (5%), Hukum 26 Responden (5%), Seni 12 responden, dan Sastra 7 responden. Beberapa responden juga memilih dua bidang studi, seperti Teknik dan Ekonomi sebanyak 29 responden (6%), Ekonomi dan Hukum 13 responden (2%), serta Ekonomi dan Sosial Politik 13 responden (3%). Untuk bidang studi lainnya sebanyak 35 responden (7%), seperti Sistem Informasi, Agama Islam, Tata Boga, Psikologi, Penerbangan, dan lainnya.

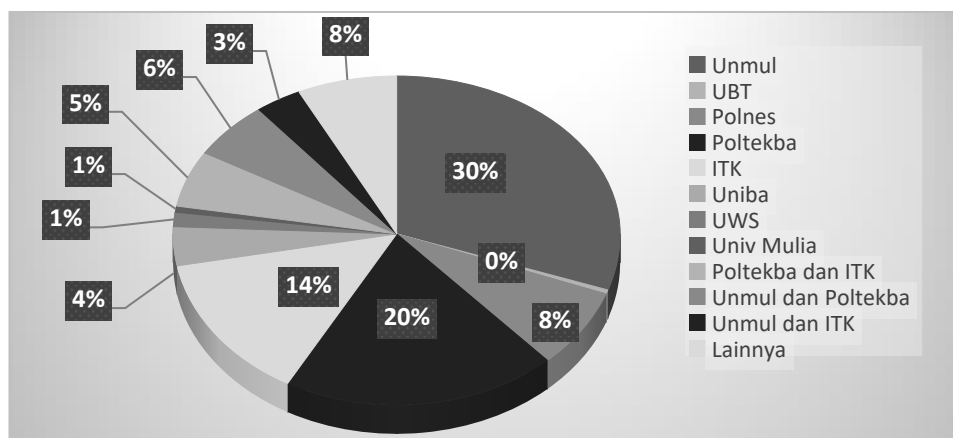


Gambar 5. Ketertarikan bidang studi

Perekonomian Kaltim didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sebesar 46,35% menurut data BPS (2018). Sektor ini dalam bisnis utamanya banyak membutuhkan keahlian teknik dibandingkan keahlian lainnya. Hal ini mungkin yang mendorong ketertarikan bidang studi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dikarenakan lapangan kerja paling banyak di Kaltim didominasi oleh perusahaan sektor pertambangan dan penggalian.

Pilihan perguruan tinggi

Pertanyaan berikutnya adalah tentang pilihan Perguruan Tinggi setelah lulus dari SMTA. Namun, pada pertanyaan tersebut penulis mempersempit ruang lingkup pilihan responden, hanya Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 518 responden, sebanyak 157 responden (30,3%) memilih Universitas Mulawarman dan sebanyak 103 responden (19,9%) memilih Politeknik Negeri Balikpapan. Kemudian, Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 72 responden (13,9%), Politeknik Negeri Samarinda sebanyak 39 responden (7,5%), Universitas Balikpapan sebanyak 19 responden (3,7%), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebanyak 7 responden (1,4%) dan Universitas Mulia sebanyak 3 responden (0,6%). Beberapa responden memilih dua Perguruan Tinggi sekaligus, sebanyak 28 responden (5,4%) memilih Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan, sebanyak 30 responden (5,8%) memilih Universitas Mulawarman dan Politeknik Negeri Balikpapan, serta 18 responden (3,5%) memilih Universitas Mulawarman dan Institut Teknologi Kalimantan. Sedangkan pilihan lainnya selain universitas tersebut di atas adalah sebesar 40 responden (7,7%), yaitu antara lain IAIN Samarinda, Universitas 17 Agustus Samarinda, Poltekkes Balikpapan, STT Migas dan STIT Balikpapan.

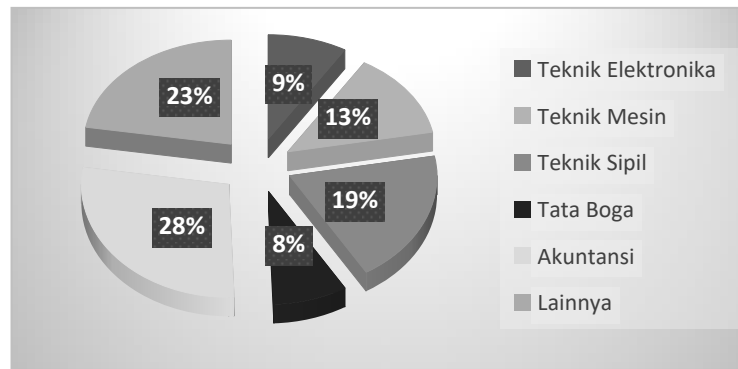


Gambar 6. Pilihan perguruan tinggi di kalimantan timur

Universitas Mulawarman yang terletak di Samarinda merupakan universitas negeri tertua di Kalimantan Timur dengan jumlah mahasiswa terbesar di Kalimantan dengan (www.tribunkaltim.co). Universitas ini menjadi tujuan utama siswa di sekitaran Kaltim untuk melanjutkan studi, oleh karena itu hasil dari survei ini, Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi yang dipilih paling banyak oleh siswa tingkat SMTA. Pilihan terbanyak kedua adalah Politeknik Negeri Balikpapan. Politeknik Negeri Balikpapan merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi berstatus negeri yang terletak di Kota Balikpapan. Perguruan tinggi vokasi lebih mengutamakan praktek (60%) dibandingkan dengan teori (40%), dan sistem pendidikannya adalah kejuruan yang bidang ilmunya lebih spesifik sesuai bidang pekerjaannya. Visi pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 juga memiliki *major project* yang salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Pendidikan berbentuk vokasi lebih diutamakan karena diharapkan akan lebih cepat terserap dalam pasar kerja. Hal ini yang mungkin menjadi alasan pilihan siswa SMTA kenapa memilih Politeknik Negeri Balikpapan sebagai pilihan terbesar kedua.

Program studi yang diminati

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang Program Studi yang diminati responden setelah lulus dari SMTA. Dalam kuesioner penelitian yang disebar, penulis memberikan beberapa pilihan, yaitu Teknik Elektronika, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Tata Boga, Akuntansi dan Lainnya. Dari 518 pertanyaan, Program studi Akuntansi dipilih oleh 145 responden (28%), Teknik Sipil sebanyak 99 responden (19%), Teknik Mesin 67 responden (13%), Teknik Elektronika 48 responden (9%) dan Tata Boga sebanyak 42 responden (8%). Pada pilihan Lainnya, sebanyak 117 responden (23%) menuliskan program studi yang diminati seperti, Sistem Informasi, Farmasi, Pendidikan, Agama Islam, Ilmu Administrasi, Hukum, Sosial Politik, dan sebagainya.

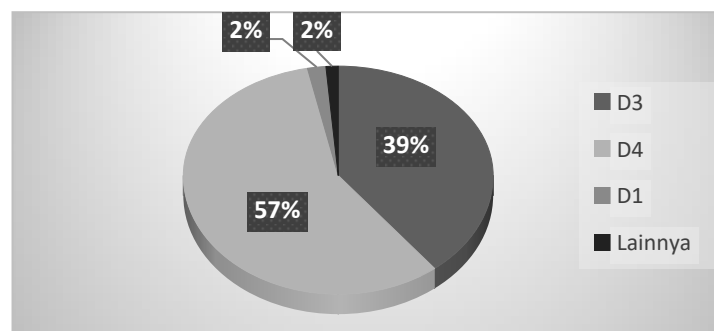


Gambar 7. Program studi yang diminati

Program studi akuntansi menjadi program studi yang paling banyak diminati diantara program studi lainnya. Hampir semua jenis perusahaan membutuhkan bidang keahlian akuntansi, untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangannya. Menurut Disnakertrans (2013) dalam rencana tenaga kerja provinsi Kalimantan Timur tahun 2014–2018, salah satu prioritas pelatihan yang bisa dikembangkan bagi pekerja/karyawan adalah di bidang pembukuan/akuntansi. Menurut IAI (2014), ketersediaan akuntan profesional dengan kebutuhan dunia kerja, masih cukup timpang. Data terakhir menunjukkan, setidaknya dibutuhkan sekitar 452 ribu akuntan. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati urutan ketujuh jumlah akuntan dibandingkan jumlah penduduk. Jumlah akuntan di Indonesia terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, peluang lulusan program studi akuntansi untuk bisa diterima di lapangan pekerjaan sangatlah besar. Hal ini mungkin yang menjadikan alasan siswa kelas XII tingkat SMTA memilih program studi akuntansi, karena ketersediaan yang luas atas lapangan pekerjaan.

Jenjang pendidikan akuntansi yang diinginkan

Pertanyaan ketujuh adalah tentang pilihan responden terhadap jenjang pendidikan Akuntansi yang diminati oleh responden setelah lulus SMTA. Pada pertanyaan ini, penulis membatasi ruang lingkup pada jenjang pendidikan yang hanya tersedia di Politeknik. Responden yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah responden yang pada pertanyaan sebelumnya memilih Akuntansi sebagai Program Studi yang diminati, yaitu sebanyak 145 responden. Dari jumlah responden tersebut, sebanyak 83 responden (57%) memilih D4, 57 responden (39%) memilih D3 dan 3 responden memilih D1 (2%), serta 2 responden memilih Lainnya.

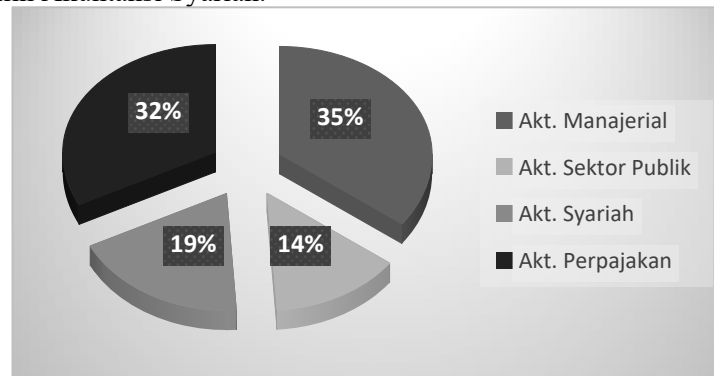


Gambar 8. Jenjang Pendidikan Akuntansi yang Diinginkan

Jenjang pendidikan paling diinginkan adalah Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Jenjang diploma 4 kebanyakan tersedia di sekolah vokasi atau politeknik. Di jenis perguruan tinggi selain politeknik seperti universitas, institut dan sekolah tinggi, jenjang Diploma 4 dikenal dengan istilah sarjana (S1). Perbedaan antara jenjang D4 dan S1 selain ditempuh di jenis perguruan tinggi yang berbeda adalah pada jenjang D4 lebih banyak mempelajari mata kuliah praktek atau ilmu terapan (60% praktek, 40% teori), sedangkan jenjang S1 lebih banyak mempelajari teori (40% praktek, 40% teori). Lulusan D4 dianggap memiliki skill dan ketrampilan yang lebih baik dikarenakan selama menjalani perkuliahan lebih banyak mata kuliah praktek. Hal inilah yang menjadikan jenjang diploma 4 menjadi jenjang paling diminati dibandingkan D1, D3 dan jenjang lainnya. Dengan gelar yang identik dan tidak kalah dengan sarjana di S1, lulusan D4 juga dinilai lebih siap terjun di dunia kerja.

Konsentrasi pendidikan akuntansi yang diminati

Pertanyaan terakhir dalam kuesioner penelitian ini adalah tentang pilihan responden terhadap konsentrasi pendidikan Akuntansi yang diminati oleh responden setelah lulus SMTA. Dari 145 responden, sebanyak 51 responden (35%) memilih Akuntansi Manajerial, 20 responden memilih Akuntansi Sektor Publik (14%), dan 47 responden (32%) memilih Akuntansi Perpajakan, serta 27 responden (19%) memilih Akuntansi Syariah.



Gambar 9. Konsentrasi pendidikan akuntansi yang diminati

Akuntansi manajerial menjadi konsentrasi yang paling banyak diminati diantara pilihan lainnya. Akuntansi manajerial adalah proses akuntansi yang menyajikan informasi kejadian ekonomi untuk manajemen/pihak internal perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja organisasi (Siregar et al., 2017). Hampir setiap perusahaan membutuhkan keahlian akuntansi, terutama berkaitan dengan penyediaan laporan untuk internal perusahaan. Alasan ini yang memungkinkan siswa kelas XII tingkat SMTA memilih konsentrasi akuntansi manajerial ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, (1) Sebanyak 83 responden atau 57% dari total 145 responden yang memilih konsentrasi akuntansi, menginginkan jenjang pendidikan D4, (2) Sebanyak 51 responden atau 35% dari total 145 responden yang memilih jurusan akuntansi, menginginkan program studi akuntansi manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi Politeknik Negeri Balikpapan untuk membuka program studi D4 akuntansi manajerial dikarenakan minat yang cukup tinggi dari siswa SMA/SMK/MA terhadap program studi ini.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti yaitu meliputi 2 kota (Balikpapan dan Samarinda) dan 2 Kabupaten (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara), sehingga kurang mewakili Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota. Untuk penelitian ke selanjutnya, dapat dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan Timur (7 kabupaten dan 3 kota) dengan mengambil perwakilan sekolah secara acak dengan persentase masing-masing sekolah yang diambil untuk setiap kota/kabupaten adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2019). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Timur*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur: Februari 2019. Diakses secara online pada 22 Maret 2019 <http://www.bi.go.id/web/id/publikasi>.
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Timur*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur: Februari 2018. Diakses secara online pada 24 Maret 2019 <http://www.bi.go.id/web/id/publikasi>.
- BPS Provinsi Kaltim. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur 2017*. Berita Resmi Statistik No. 41/05/64/Th.XXI: 07 Mei 2018.

-
- BPS Provinsi Kaltim. (2017). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2017.
- BPS Provinsi Kaltim. (2018). Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2018 (Buku IV). Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
- BPS Provinsi Kaltim. (2019). Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka.
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur kerjasama dengan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans RI. (2013). Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014–2018. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekjen Kemnakertrans: 2013
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Bersiap Diri Menyambut Pasar Tunggal ASEAN. Diakses secara online pada 24 Maret 2019 <http://iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailarsip-617>
- Indriyanti, Ninuk, dkk. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2013. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 1 (2), pp. 1-10.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2019). Isu - Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 - 2024. Jakarta: 24 Juli 2019.
- Siregar, Baldirc; Bambang Suripto; Dody Hapsoro; Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto. (2013). Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaf dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Website Kaltim Antara News. (2016). Balikpapan masih kekurangan tenaga akuntansi. Diakses secara online pada 26 Maret 2019 <https://kaltim.antaranews.com/berita/32004/balikpapan-masih-kekurangan-tenaga-akuntansi>
- Website Pemprov Kaltim. (2016). Kaltim butuh tenaga akuntansi profesional. Diakses secara online pada 26 Maret 2019 <https://kalimprov.go.id/berita/kaltim-butuh-tenaga-akuntansi-berbasis-akrual>
- <http://akubank.co.id/indonesia-kekurangan-25-000-tenaga-akuntan/>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi/komentar>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180628/12/810732/hati-hati-indonesia-bakal-kekurangan-tenaga-ahli-pada-2030>
- <http://welovecities.org/> diakses pada 21 Agustus 2019
- <https://kaltim.tribunnews.com/2019/02/26/daftar-5-perguruan-tinggi-negeri-di-samarinda-yang-bisa-jadi-tempat-kamu-kuliah> diakses pada 21 Agustus 2019.

Audit operasional atas fungsi sumber daya manusia

Ige Mawarni¹, Cornelius Rantelangi², Ledy Setiawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: mawarniige@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektivitas perencanaan sumber daya manusia; (2) mengetahui efektivitas rekrutmen sumber daya manusia; (3) mengetahui efektivitas seleksi sumber daya manusia; (4) mengetahui efektivitas pelatihan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia; (5) mengetahui efektivitas penilaian kinerja sumber daya manusia; (6) mengetahui efektivitas kompensasi dan balas jasa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian adalah Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah. Objek penelitian adalah fungsi sumber daya manusia di yayasan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan berpatokan pada prosedur pelaksanaan audit operasional atas fungsi sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda efektif; (2) rekrutmen sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda belum efektif, (3) seleksi sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda belum efektif, (4) Pelatihan dan pengembangan ketrampilan SDM telah berjalan efektif; (5) Penilaian kinerja SDM belum efektif; (6) Pemberian kompensasi dan balas jasa telah berjalan efektif.

Kata Kunci: Audit; operasional; fungsi; sumber daya manusia

Operational audit of the human resources function

Abstract

This study aims to (1) find out the effectiveness of human resource planning; (2) knowing the effectiveness of human resource recruitment; (3) knowing the effectiveness of human resource selection; (4) knowing the effectiveness of training and development of human resource skills; (5) knowing the effectiveness of human resource performance appraisal; (6) knowing the effectiveness of compensation and remuneration. This research is descriptive qualitative. The subjects of the study were the Islamic Education Foundation of the Shuffah Hizbullah Islamic Boarding School. The object of research is the function of human resources at the foundation. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is to use qualitative analysis based on the procedures for carrying out operational audits on the functions of human resources. The results of this study indicate that (1) Human resource planning at the Islamic Education Foundation Shuffah Hizbullah Islamic Boarding School in Samarinda has been effective; (2) recruitment of human resources at the Islamic Education Foundation Shuffah Hizbullah Samarinda Islamic Boarding School has not been effective, preferably the recruitment is made in detail and documented; (3) selection of human resources at the Islamic Education Foundation Shuffah Hizbullah Samarinda Islamic Boarding School has not been effective; (4) Training and development of HR skills have been effective; (5) HR performance assessment has not been effective; (6) The provision of compensation and remuneration has been effective.

Keywords: *Audit; operational; function; human*

PENDAHULUAN

Kontribusi pendidikan Islam dalam proses pencerdasan masyarakat dan pembangunan bangsa merupakan salah satu fakta yang sangat terukur dewasa ini. Berdasarkan beberapa indikator pembangunan di bidang pendidikan, kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam tercermin secara jelas terutama partisipasi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan Islam. Dalam hal kemajuan ini terdapat beberapa hal penting yang harus digarisbawahi yaitu peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan daya saing pendidikan Islam. Jika diamati melalui media social semakin banyak lembaga pendidikan Islam yang menorehkan prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Belum lama ini tepatnya bulan November 2017 lalu empat santri asal Blitar berhasil menjuarai kontes robot “Osaka Robotik Games 2017” yang diadakan di Jepang, tepat satu bulan sebelumnya dua santri asal Yogyakarta menjadi juara ketiga dan keempat dalam ajang musabaqah hafalan Al-qur’an tingkat internasional yang di adakan di Arab Saudi. Pada bulan April 2018 lalu, empat santri Indonesia asal Malang berhasil menyabet juara pertama dalam kejuaraan “4th International School Arabic Debating Championship 2018” di Qatar. Tidak luput pula dari sorotan media Rfidah Farnidah seorang santri hafidzoh yang berhasil meraih juara kedua pada ajang Musabaqoh Hifdzil Qur’an yang diadakan di Yordania pada bulan Mei 2018 lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa santri-santri hasil didikan lembaga pendidikan Islam mampu bersaing di kancah Internasional.

Salah satu sumber daya yang paling penting perannya terhadap kelancaran operasional lembaga pendidikan Islam adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan ujung tonggak dalam suatu lembaga yang menjalankan aktifitas dan kegiatan belajar mengajar, menjalankan sebuah system operasional yang efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam tidak sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh pihak manajemen maka akan mengakibatkan keburukan pada sumber daya yang lainnya karena sumber daya manusia merupakan kunci atau penggerak utama dalam berjalannya suatu organisasi/ lembaga/ perusahaan.

Dalam segala aktivitas di dalam suatu lembaga pendidikan sumber daya manusia hendaknya menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka untuk memperoleh nilai tambah dalam lembaga maupun di hadapan mitra pendidikan yakni orang-orang yang memiliki kepentingan seperti wali murid dan masyarakat sekitar. Sikap tanggung jawab sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh seluruh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Penyusunan personalia sangat diperlukan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Penyusunan personalia ini biasanya meliputi perekrutan, penempatan, pemberian latihan, dan jenjang pengembangan karir.

Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda memiliki dua lembaga formal yang dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari peranan sumber daya manusia, mulai dari pendidik hingga tenaga kependidikan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh yayasan tersebut berjumlah 35 orang. 7 orang menjadi tenaga di KBA Al-Fatah, 21 orang tenaga di SDIA Al-Fatah, dan sisanya 7 orang mengurus pondok mahasiswa. Dengan jumlah tersebut tentu saja terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional dalam yayasan.

Kendala-kendala atau fenomena yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah antara lain adalah ketidakdisiplinan waktu yang berdampak ketidaknyamanan dan ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar juga berdampak terhadap pribadi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi kurang semangat dalam melaksanakan tugas yang semestinya mereka emban dengan baik. Selain dari pada itu jumlah tenaga pendidik yang faham akan teknologi tidak memadai sehingga sering terjadi penumpukan tugas yang dibebankan kepada satu atau dua orang saja. Masalah lain yang sangat menonjol adalah sebagian besar tenaga kependidikan membawa masalah rumah tangga dalam pekerjaan mereka, dalam hal ini adalah pengaruh anak dirumah yang sering dijadikan sebagai alasan untuk tidak mematuhi peraturan kedisiplinan yang sudah disepakati bersama. Masalah ini sering terlihat di salah satu lembaga yakni SDIA (Sekolah Dasar Islam Al-Fatah) Samarinda. Selain itu beberapa masalah juga terlihat dari kurangnya sumber daya manusia di pondok mahasiswa dimana sebagian besar tenaga pendidik melanjutkan studi ke luar negeri akan tetapi tenaga pengganti tidak dipersiapkan dengan baik

sehingga para santri sering terbengkalai dan kurang mendapatkan perhatian dari segi program yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan adanya beberapa fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, sangat disadari betapa pentingnya peranan dari sumber daya manusia yang memadai. Melihat betapa pentingnya sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan ataupun lembaga lainnya, maka diperlukan adanya penanganan yang serius yakni dengan melaksanakan audit terhadap fungsi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar fungsi sumber daya manusia yang memperoleh tugas dan tanggung jawab dapat melaksanakannya dengan tingkat efektivitas yang semakin tinggi. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah dicapai oleh suatu lembaga melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dikerjakan dengan prosedur yang benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Apabila suatu lembaga ingin tetap unggul dalam persaingan yang semakin hari semakin banyak lembaga pendidikan Islam yang muncul, maka lembaga harus melakukan kegiatannya dengan efektif serta melakukan perbaikan secara rutin.

Audit sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu manajemen pusat dalam mengidentifikasi penyimpangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Audit tidak hanya dilakukan terhadap suatu lembaga yang telah mengalami masalah akan tetapi audit dilakukan sebagai alat atau instrument perbaikan. Melalui audit, manajemen atas sumber daya manusia dapat dinilai.

METODE

Definisi operasional

Audit sumber daya manusia menekankan pada kegiatan evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi di yayasan dalam rangka memastikan proses tersebut telah berjalan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja.

Penilaian efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada data-data baik berupa dokumentasi kegiatan sumber daya manusia maupun hasil wawancara secara langsung yang diperoleh selama melakukan penelitian yakni dengan cara menyesuaikan kondisi aktual dengan standar yang telah dibuat oleh yayasan tersebut. Jika aktivitas yang dilakukan oleh yayasan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa fungsi sumber daya manusia tersebut telah efektif, akan tetapi jika aktivitas yang dilakukan oleh yayasan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka fungsi sumber daya manusia tersebut dapat dikatakan belum efektif.

Alat analisis

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan dua perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada di yayasan yang diteliti.

Untuk dapat membandingkan antara teori dan kenyataan yang ada di yayasan tersebut dilakukan beberapa tahapan audit operasional sumber daya manusia yakni sebagai berikut:

Audit pendahuluan

Tahap audit pendahuluan adalah langkah awal yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit operasional dalam menilai aktivitas yang dijalankan oleh suatu unit bisnis atau yayasan. Tujuan utama dengan dilaksanakannya tahap audit pendahuluan ini guna mendapatkan berbagai informasi umum dan latar belakang bidang usaha yang dijalankan oleh klien auditor dalam waktu yang relatif singkat, agar dapat memperoleh pengetahuan dan gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan. Setelah pengumpulan informasi umum mengenai yayasan diperoleh, maka auditor dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan di dalam yayasan audit untuk dijadikan sasaran audit sementara. Pelaksanaan audit operasional pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda ini diawali dengan survei pendahuluan bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan yayasan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia pada yayasan ini.

Review dan pengujian pengendalian manajemen

Tahap review dan pengujian pengendalian manajemen dilakukan terhadap aktivitas pengendalian fungsi sumber daya manusia yang termasuk dalam ruang lingkup audit (perencanaan sumber daya

manusia, seleksi sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan ketrampilan sumber daya manusia, penilaian kinerja sumber daya manusia, kompensasi dan balas jasa).

Dalam tahap ini penulis menggunakan Internal Control Questionare (ICQ) sebagai pedoman dalam melakukan pengujian dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen yayasan. Internal Control Questionare (ICQ) terdiri dari berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi SDM dalam yayasan yang terdiri dari: fungsi perencanaan umum, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, serta kompensasi dan balas jasa dimana jawaban yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi yayasan yang sebenarnya sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu temuan audit.

Audit lanjutan

Tahap ketiga yaitu menganalisis hasil objek audit (audit terperinci) dengan menggunakan alat pengukuran yang digunakan dalam audit manajemen sumber daya manusia. Temuan audit yang ada dikumpulkan untuk kemudian dianalisa. Audit manajemen sumber daya manusia mempunyai empat alat pengukuran untuk menganalisa tingkat keberhasilan dari program-program yang dilakukan oleh fungsi sumber daya manusia, antara lain:

Kondisi

Kondisi (condition) adalah keadaan atau kejadian sebenarnya yang ditemukan selama proses audit dilaksanakan dan diselesaikan. Keadaan atau kejadian yang diteliti berupa pelaksanaan prosedur kerja secara aktual, situasi operasional di dalam Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda. Kondisi ini adalah merupakan inti dari temuan yang dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu didasarkan kepada bukti audit yang kompeten, relevan, lengkap, dan bermanfaat.

Kriteria

Kriteria (criteria) merupakan standar normal yang menjadi pedoman bertindak bagi semua individu di dalam organisasi. Peraturan yayasan, ketentuan yang diberlakukan yayasan, dan kebijakan yang digunakan yayasan adalah kriteria.

Penyebab

Penyebab (cause) merupakan program-program yang dilaksanakan organisasi dan menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada.

Akibat

Akibat (effect) merupakan sesuatu yang harus ditanggung karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan yayasan berdasarkan kriteria dengan aktual yang terjadi di lapangan.

Pelaporan

Tahap pelaporan ini memuat beberapa kesimpulan audit dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung adanya permasalahan terhadap kesimpulan audit. Selain itu peneliti juga membuat rekomendasi berupa tindakan korektif atas kelemahan yang ditemukan pada fungsi sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fungsi sumber daya manusia lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit pendahuluan

Penyelenggaraan fungsi SDM di Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda dilaksanakan oleh bidang Human Resources and Development (HRD) dalam pengawasan pimpinan yayasan. Penyelenggaraan fungsi SDM pada yayasan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan yayasan lain yakni mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Bagian ini memiliki tugas antara lain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan sumber daya manusia serta seleksinya, memberikan pelatihan dan pengembangan ketrampilan kepada sumber daya manusia yang ada, melakukan penilaian kinerja sumber daya manusia, merencanakan hingga memberikan kompensasi dan balas jasa yang diberikan kepada sumber daya manusia. Jika dilihat secara langsung beberapa fungsi yang telah ditetapkan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun belum sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh yayasan.

Beberapa masalah yang ditemui tersebut antara lain ketidaktepatan waktu beberapa pendidik dan tenaga kependidikan yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dari beberapa pendidik yang menyebabkan penumpukan tugas diberikan

kepada salah satu orang saja, beberapa pendidik dan tenaga kependidikan melakukan cuti baik karena melanjutkan studi dan melahirkan tanpa adanya tenaga pengganti yang disiapkan sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan belajar dan mengajar terganggu.

Adapun prosedur audit yang dilakukan dalam audit pendahuluan adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan langkah awal bagi penulis dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan latar belakang yayasan dan segala aktivitas yayasan secara langsung yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional Sumber Daya Manusia (SDM) pada yayasan dengan waktu yang relatif sangat singkat pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda.

Pengumpulan data-data yang diperlukan

Pengumpulan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan:

Meminta dan mencari data-data tertulis (dokumentasi) dari tenaga pendidikan yang bekerja dan berhubungan langsung pada bagian SDM yakni tenaga bagian HRD seperti struktur organisasi dan data-data yang berkaitan dengan SDM yang diperlukan.

Melakukan wawancara dengan penanggungjawab SDM dan pimpinan yayasan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fungsi SDM dan pengelolaannya pada yayasan serta melakukan beberapa tanya jawab dengan beberapa tenaga pendidikan diluar devisi fungsi SDM guna membantu penulis untuk mengidentifikasi dan menemukan kelemahan pada yayasan tersebut.

Memberikan kuesioner kepada penanggungjawab SDM, pimpinan yayasan, dan pimpinan masing-masing lembaga pendidikan.

Dari prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat ditunjukkan bahwa tujuan audit sementara yang ingin dibuktikan oleh peneliti adalah penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia (perencanaan sumber daya manusia, perekrutan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan ketrampilan sumber daya manusia, penilaian kinerja sumber daya manusia, kompensasi dan balas jasa) pada Yayasan Pendidikan Islam Shuffah Hizbullah telah efektif dalam mendukung tercapainya tujuan yayasan yang telah ditetapkan.

Review dan pengujian pengendalian

Pada tahap ini, peneliti melakukan *review* dan pengujian terhadap fungsi sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah terutama pada dua lembaga pendidikan formal yakni Sekolah Dasar Islam Alam (SDIA) Al-Fatah dan Kelompok Belajar Alam (KBA) Al-Fatah untuk menilai apakah tujuan yayasan telah diorientasikan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di yayasan tersebut, serta telah sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia bagi lingkungan kerja terhadap kelancaran hasil kerja.

Setelah melakukan review dan pengujian pengendalian peneliti mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

Program presensi pendidik dan tenaga kependidikan masih dilakukan secara manual, namun karna kurangnya perhatian dari masing-masing individu hal tersebut tidak berjalan lancar.

Bagian kesekretariatan hanya dikelola oleh satu orang saja sehingga mengakibatkan permasalahan personalia yang kurang mendapatkan perhatian, misalnya saja kurangnya pendokumentasian dan pelaporan presensi.

Suasana kerja yang ada di dua lembaga pendidikan pada yayasan tersebut kurang kondusif karena beberapa tenaga kependidikan bebas untuk kembali kerumahnya sehingga dirasakan kurang optimal dan sering terjadi keterlambatan pada saat kembali mengajar.

Beberapa tenaga kependidikan yang memiliki anak balita sering terganggu dengan perannya sebagai ibu sekaligus sebagai tenaga kependidikan sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan waktu mengajar.

Kurangnya tenaga kependidikan yang faham teknologi komunikasi menyebabkan penumpukan tugas yang dibebankan kepada sekretaris sekolah sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas intinya.

SIMPULAN

Perencanaan sumber daya manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah terutama pada dua lembaga pendidikan formal yakni SDIA Al-Fatah dan KBA Al-Fatah belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan belum adanya prosedur yang menjelaskan tentang perencanaan SDM secara menyeluruh dan mengakibatkan perencanaan SDM belum terdokumentasi dengan baik.

Rekrutmen sumber daya manusia

Rekrutmen Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah (SDIA dan KBA Al-Fatah) belum berjalan secara efektif. Prosedur rekrutmen belum disosialisasikan kepada masyarakat secara umum dan kebijakan terkait dengan proses rekrutmen belum terdokumentasi dengan baik. Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh yayasan adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara pimpinan yayasan dan pimpinan lembaga pendidikan formal dalam yayasan tersebut dalam hal ini adalah kepala sekolah.

Seleksi sumber daya manusia

Seleksi Sumber Daya Manusia pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda terutama pada dua lembaga pendidikan formal yakni SDIA Al-Fatah dan KBA Al-Fatah telah berjalan secara efektif. Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan pengembangan ketrampilan SDM pada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda telah berjalan efektif. Pelatihan dan pengembangan SDM terencana dengan baik meskipun dalam bentuk dokumen sederhana.

Penilaian kinerja sumber daya manusia

Penilaian kinerja sumber daya manusia pada yayasan ini belum efektif. Hal ini disebabkan yayasan pendidikan islam pondok pesantren shuffah hizbullah belum memiliki prosedur dan standar yang mengatur tentang penilaian kinerja SDM, sehingga penilaian yang dilakukan masih sangat sederhana.

Kompensasi dan balas jasa sumber daya manusia

Yayasan pendidikan Islam Pondok pesantren Shuffah Hizbullah telah melaksanakan fungsi ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yayasan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian kompensasi dan balas jasa SDM sudah berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2008. Auditing Petunjuk Praktik Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Aninditia, Rosiana Oktaviani. 2015. Audit Operasional atas Fungsi Sumber Daya Manusia pada PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Cabang Jakarta Barat. Skripsi Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Anonim. 2011. Audit Sumber Daya Manusia (SDM),
<https://www.google.co.id/amp/s/learnourworld.wordpress.com/201108/24/audit-sumber-daya-manusia-sdm/amp/>, diakses tanggal 06 Juli 2018.
- Arens, A.A., Elder, R.J. & Beasley, M.S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi, Edisi kedua belas. Terjemahan Gina Gania. Erlangga. Jakarta.
- Bhayangkara, IBK. 2008. Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi, Salemba Empat. Jakarta.
- Biandiputri, Bionita. 2013. Audit Manajemen atas Fungsi Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Distributor dan Percetakan Buku Pustaka Baru. Skripsi UNY. Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu S.P., 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Inayati, Ifana. 2011. Audit Operasional atas Fungsi Sumber Daya Manusia di Hotel Brongto Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta.
- Jusup, Haryono. 2014. Auditing, Edisi kedua. STIE YKPN. Yogyakarta.

-
- Mangkunegaran, Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*, Edisi keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Edisi Kedua. Raja Grafindo. Jakarta.
- Romi, Ahmad Dzati. 2013. *Audit Operasional pada Fungsi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi. UNY. Yogyakarta.
- Simamora, Henry. 2012. *Manajemen Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tunggal, Widjaja Amin. 2008. *Audit Manajemen Kontemporer*. Harvarindo. Jakarta.
- Umar, Bukhari. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif

Indra Suyoto Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: indra.suyoto.kurniawan@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui aset, leverage, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas inventaris dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak menggunakan tarif pajak yang efektif sebagai indikator. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode purposive sampling dan memperoleh sampel 44 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis pertama diterima. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis kedua tidak diterima. Intensitas aktiva tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis ketiga tidak diterima. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis keempat tidak diterima. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis kelima tidak diterima. Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, artinya hipotesis keenam diterima.

Kata Kunci: Manajemen pajak; tarif pajak; bursa efek indonesia

Analysis of factors that influence tax management with effective tax rate indicators

Abstract

The research aims to determine the assets, leverage, intensity of fixed assets, institutional ownership, independent commissioners, and inventory intensity can be used by companies to conduct tax management using effective tax rates as indicators. Determination of samples is done by applying a purposive sampling method and obtaining a sample of 44 manufacturing companies based on certain criteria. Data analysis was performed by testing hypotheses using multiple regression analysis. The results show that assets have a significant negative effect on effective tax rates, meaning that the first hypothesis is accepted. Leverage has a positive and not significant effect on the effective tax rate, meaning that the second hypothesis is not accepted. The intensity of fixed assets has a positive and not significant effect on the effective tax rate, meaning that the third hypothesis is not accepted. Institutional ownership has a positive and not significant effect on effective tax rates, meaning that the fourth hypothesis is not accepted. Independent commissioners have a positive and not significant effect on effective tax rates, meaning that the fifth hypothesis is not accepted. Inventory intensity has a negative and significant effect on effective tax rates, meaning that the sixth hypothesis is accepted.

Keywords: Tax management; tax rate; Indonesia stock exchange

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak menyumbang ke kas negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak maupun hibah. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, seluruh total penerimaan negara selalu didominasi oleh penerimaan dari sektor perpajakan.

Dari data yang diperoleh dari badan pusat statistik menunjukkan bahwa total realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebesar 5.036.283 milyar rupiah dibandingkan dengan sektor non-pajak yang hanya 1.652.305 milyar rupiah serta hibah yang berjumlah 19.908 milyar rupiah. Dari jumlah tersebut dapat diidentifikasi bahwa pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena bersifat memaksa dan diatur oleh Undang-Undang, maka wajib pajak harus bersedia untuk membayar pajak.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak (dalam hal ini perusahaan) berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi perusahaan, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah Muljono dan Wicaksono, (2009).

Kepentingan perusahaan dengan pemerintah terkait dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Perusahaan menginginkan agar pajak yang terutang atau yang dibayarkan ke pemerintah adalah seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan agar pajak yang diterima dari perusahaan akan sesuai dan cenderung seoptimal mungkin.

Dengan kondisi tersebut, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Hal itu perusahaan lakukan agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah dapat ditekan seminimal mungkin. Cara yang ditempuh perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan tersebut dapat dilakukan dengan masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya meminimalisasi beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan tentu sangat tidak diinginkan oleh perusahaan karena perusahaan dapat menerima sanksi, baik sanksi administrasi bahkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui manajemen pajak, Suandy (2008).

Sebagaimana yang diungkapkan Karayan dan Hanum (2013), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Sehingga penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan manajemen pajak sehingga tarif pajak efektif menjadi lebih rendah. Diantaranya adalah total aset, tingkat hutang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen dan intensitas persediaan.

Teori agensi

Teori agensi muncul karena adanya hubungan kerja antara satu orang atau lebih untuk memberi wewenang (prinsipal) dan menerima wewenang (agen) untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajer (agen) memiliki tugas untuk menjalankan aktivitas perusahaan serta berkewajiban untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pemilik (prinsipal) Situmorang, (2013).

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Resmi, (2013).

Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Penggunaan self assessment system dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak terendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan jadi rendah.

METODE

Manajemen pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin baik manajemen pajaknya. Tarif pajak efektif dapat dirumuskan:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Total aset

Total aset menggambarkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak. Semakin meningkat total aset maka semakin meningkat sumber daya yang dimiliki perusahaan guna dipergunakan untuk melakukan manajemen pajak sehingga meminimalkan tarif pajak efektifnya. Logaritma natural (Ln) total aset digunakan dalam penelitian ini.

$$\text{Total Aset} = \ln \text{ Total Aset}$$

Tingkat hutang

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Hutang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang dengan total aset.

$$\text{Tingkat Hutang} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas aset tetap

Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara membandingkan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan.

$$\text{Intensitas Aset tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan lembar saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Lembar Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}}$$

Komisaris independen

Komisaris independen bertugas mengawasi dan mengarahkan jalannya perusahaan agar tidak terjadi adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Intensitas persediaan

Intensitas persediaan menggambarkan banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* intensitas persediaan untuk menggambarkan intensitas persediaan perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara membandingkan total persediaan yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan.

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Metode analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha_0 - \beta_1 \text{TOTAS} - \beta_2 \text{TINGHUT} - \beta_3 \text{IAT} - \beta_4 \text{KEPINS} + \beta_5 \text{INDEP} - \beta_6 \text{INSPEP} + \epsilon_t$$

Keterangan:

| | |
|--|---------------------------------|
| ETR | : Tarif Pajak Efektif |
| α_0 | : Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ | : Koefisien Variabel Independen |
| TOTAS | : Total Aset |
| TINGHUT | : Tingkat Hutang |
| IAT | : Intensitas Aset Tetap |
| KEPINS | : Kepemilikan Institusional |
| INDEP | : Komisaris Independen |
| INSPEP | : Intensitas Persediaan |
| ϵ_t | : Error Term |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data penelitian

Tabel 1. Sampel perusahaan yang sesuai kriteria penelitian

| Kriteria Sampel | Total |
|--|-----------|
| Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2014 | 144 |
| Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut menyediakan laporan tahunan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2014 | (12) |
| Perusahaan manufaktur delisting selama periode pengamatan | (3) |
| Perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi kriteria sampel secara khusus, yaitu laba negatif/rugi, menggunakan mata uang asing, beban PPh positif, saham tidak dimiliki institusi dan tidak memiliki komisaris independen | (85) |
| Jumlah Perusahaan Sampel | 44 |

Tabel 2. Statistik Deskriptif

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------|---------|---------|---------|----------------|
| ETR | 0,1009 | 0,4130 | 0,2520 | 0,0435 |
| TOTAS | 25,1940 | 31,1666 | 28,1779 | 1,5104 |
| TINGHUT | 0,1306 | 0,8375 | 0,3962 | 0,1641 |
| IAT | 0,0818 | 0,8431 | 0,3410 | 0,1742 |
| KEPINS | 0,3307 | 0,9818 | 0,7356 | 0,1615 |
| INDEP | 0,2000 | 0,6667 | 0,3772 | 0,0718 |
| INSPEP | 0,0188 | 0,6325 | 0,2134 | 0,1224 |

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Tarif pajak efektif yang tercantum dalam tabel 2 berasal dari perhitungan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai untuk tarif pajak efektif berupa rasio dengan range nilai 0,0-1,0 atau antara 0%-100%. Nilai rata-rata dari tarif pajak efektif adalah 0,2520 atau 25,20% yang berarti secara rata-rata manajemen pajak perusahaan kurang baik, karena rata-rata tarif pajak efektif perusahaan yang dijadikan sampel penelitian berada di atas tarif statutory atau tarif yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 25%.

Pada variabel total aset, tercatat rata-rata total aset yang menjadi sampel penelitian adalah 28,1779. Nilai untuk menentukan total aset didapat melalui penghitungan logaritma natural dari total aset perusahaan.

Nilai tingkat hutang perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan rasio dari total hutang perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rata-rata untuk tingkat hutang perusahaan adalah sebesar 0,3962 atau 39,62%.

Variabel intensitas aset tetap dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan, yang hasilnya merupakan rasio intensitas aset tetap. Range nilai intensitas aset tetap adalah 0,1 sampai dengan 1,0 atau 0% sampai dengan 100%. Rata-rata intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,3410 atau 34,10%.

Variabel kepemilikan institusional dihitung dengan cara membagi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan perusahaan, yang hasilnya merupakan rasio kepemilikan institusional. Range nilai kepemilikan institusional adalah 0,1 sampai dengan 1,0 atau 0% sampai dengan 100%. Rata-rata kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,7356 atau 73,56%.

Variabel komisaris independen dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan, yang hasilnya merupakan rasio komisaris independen. Range nilai komisaris independen adalah 0,1 sampai dengan 1,0 atau 0% sampai dengan 100%. Rata-rata komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,3772 atau 37,72%.

Variabel intensitas persediaan dihitung dengan cara membagi total persediaan yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan, yang hasilnya merupakan rasio intensitas persediaan. Range nilai intensitas persediaan adalah 0,1 sampai dengan 1,0 atau 0% sampai dengan 100%. Rata-rata intensitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,2134 atau 21,34%.

Pengujian hipotesis

Tabel 3. Pengujian hipotesis

| Model | T | Sig. |
|--------------|--------|-------|
| 1 (Constant) | 1,904 | 0,061 |
| LnTOTAS | -2,374 | 0,020 |
| LnTINGHUT | 4,016 | 0,000 |
| LnIAT | 0,844 | 0,401 |
| LnKEPINS | 0,169 | 0,866 |
| LnINDEP | 0,406 | 0,686 |
| LnINSAPER | -2,494 | 0,015 |

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar -2,374. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,020 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,020 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa total aset memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena semakin meningkat total aset maka semakin meningkat pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak sehingga meminimalkan tarif pajak efektifnya. Hal ini berarti semakin banyak sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan semakin baik manajemen pajak perusahaan tersebut sehingga tarif pajak efektifnya akan menjadi semakin rendah.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar 4,016. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat hutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat hutang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014), bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha akan menaikkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dan akan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar 0,844. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,401 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,401 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013), Ardyansah (2014) dan Imelia (2015). Hal ini karena adanya perbedaan metode penyusutan yang boleh digunakan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Ketika perusahaan telah mengakui adanya beban depresiasi tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak termasuk dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut sehingga akan terjadi penambahan penghasilan kena pajak yang akan meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan (Wahab dan Holland, 2012 dalam Darmadi, 2013).

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar 0,169. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,866 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,866 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Hanum (2013). Hal ini karena investor institusional sebagai pihak yang mempunyai kendali yang cukup besar akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hanum, 2013). Akan tetapi, dengan melihat hasil penelitian yang tidak signifikan, maka disimpulkan bahwa peran investor institusional dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen masih belum maksimal.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar 0,406. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,686 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,686 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berarti bahwa peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan terkait pajak di dalam perusahaan masih minimal.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Uji t, terlihat bahwa nilai thitung sebesar -2,494. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,015 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yakni 0,05 ($0,015 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013), yang membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini karena biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang semakin meningkat akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Penurunan laba akan menyebabkan menurunnya tarif pajak efektif perusahaan.

SIMPULAN

Total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H1 diterima.

Tingkat hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H2 ditolak.

Intensitas aset tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H3 ditolak.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H4 ditolak.

Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H5 ditolak.

Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014 yang berarti H6 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Maria Y.K.P. 2014. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Ardyansyah, Danis. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (2) 2014 : 1-9.
- Aunalal, Ardnolus. 2011. Pengaruh Size, Profitability dan Ownership Structure sebagai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Perusahaan (Studi pada Perusahaan di Indonesia). Thesis Tidak Diterbitkan. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>. Diakses tanggal 29 Januari 2016.
- Blocher E.J, Chen KH, Cokins G, Lin TW. 2007. *Manajemen Biaya*. Tim penerjemah penerbit Salemba, Penerjemah. Salemba Empat: Jakarta. Terjemahan dari cost management.
- Daniel, Niko Ulfandri. 2013. Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan likuiditas terhadap Luas pengungkapan laporan keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Darmadi, Iqbal Nur Hakim. 2013. Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) (Studi empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Jurnal of Accounting* 2 (4): 1-12.
- Eisenhardt, Kathleem M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review* 14: 57-74.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Edisi Revisi 2009. Grasindo: Jakarta.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax rate (ETR). Skripsi. Undip semarang.
- Hendriksen, Eldon. S. 2002. *Diterjemahkan Oleh Herman Wibowo. Teori Akunting*. Edisi Kelima. Buku Satu. Interaksara: Jakarta.
- Ikbali, Muhammad. 2012. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Interpena : Yogyakarta.
- Imelia, Septi. 2015. Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jom Fekon* 2 (1) Februari 2015.

-
- Jensen, Michael C dan William H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4) October : 305-360.
- Karayan, J. E. & Charles W. Swenson. 2007. *Strategic Business Tax Planning*. 2nd ed. Canada: John Wiley & Sons.
- Kasmir. 2014. *Analisis laporan keuangan*, Edisi 7. Rajawali Press: Jakarta.
- Kristanto, Anastasia Kustianingsih. 2013. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Effective Tax Rate di Perusahaan Industri dan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2006-2011*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Grasindo: Jakarta.
- Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*. Buku 1. Salemba Empat Jakarta.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2013. Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (3): 1-13.
- Merdeka. <http://www.merdeka.com/uang/penerimaan-pajak-empat-sektor-tak-maksimal.html>. Diakses tanggal 17 Februari 2016.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Nicodeme, Gaetan. 2007. Do large Companies Have Lower Effective Tax Rates? An European Survey. *Belgia: Solvay Business School (ULB)*.
- Noor RM, Fadzilah NSM, Mastuki NA. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance* 1(2), August 2010.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. *Pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan*. skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Porcano, T. 1986. Corporate tax rates: progressive, proportional or regressive. *The Journal of the American Tax Association* 7 (2): 17-31.
- Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Grasindo: Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Richardson, Grant dan Roman Lanis. 2007. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26 (2007) 689-704.
- Rodriguez, E., F. and Arias, A., M. 2013. "Do Business Characteristics Determine Effective Tax Rate?". *The Chinese Economy* 45 (6).
- Sabli, Nurshamimi dan Noor Md. Rohaya. 2012. "Tax Planning and Corporate Governance". *Proceeding International Conference on Business and Economic Research*. Bandung. ISBN: 978-967-5705-05-2.
- Siegreid, J. 1972. *The Relationship between economic structure and the effect of political influence: empirical evidence from the federal corporate income tax program*. Ph. D. dissertation, University of Wisconsin.
-

-
- Situmorang, Prawira Putri C.I. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Undip. Skripsi. Semarang.
- Solimun. 2007. Memahami Metode Kuantitatif Mutakhir Structural Equation Modeling & Partial Least Square. Program Studi Statistika FMIPA Universitas Brawijaya Malang.

Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat

Indria Fitri Afiyana¹, Lucky Nugroho², Tettet Fitrijanti³, Citra Sukmadilaga⁴

¹Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung.

¹Email: indriafitri5@gmail.com

²Email: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

³Email: tfitry@yahoo.com

⁴Email: citra.sukmadilaga@fe.unpad.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat dan juga berapa realisasi atas penghimpunan yang berhasil dihimpun oleh beberapa amil zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi dengan realisasi zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penyebab ketimpangan tersebut adalah karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahiq disekitarnya.

Kata Kunci: Zakat; literasi zakat; ekonomi syariah

The challenges of managing zakat funds in indonesia and zakat literacy

Abstract

The purpose of this study is to determine the potential of zakat and also how much is the realization of the collection collected by several amil zakat in indonesia in 2014-2018. This study uses quantitative descriptive methods that are supported by secondary data obtained from various sources. The results of this study are that there is a significant gap between the potential and the realization of zakat in indonesia in 2014-2018. The cause of the inequality is because the public does not fully trust the amil zakat institutions. Therefore, many people who end up not channeling zakat via amil institutions but directly to the surrounding mustahiq.

Keywords: Zakat; zakat literacy; islamic economics

PENDAHULUAN

Pemeluk agama Islam, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim paling besar di dunia, Nugroho & Husnadi et al., (2017), Nugroho & Utami et al., (2017). Lebih lanjut, jika mengacu pada fitrah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin dimana tercantum dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107, yang artinya: “Dan tidaklah Kami (Allah) mengutusmu (Muhammad) melainkan menjadi.” rahmat bagi seluruh alam”, tentu sudah seharusnya negara Indonesia berada dalam kelompok negara maju, bukan sebagai negara berkembang. Pada ajaran agama Islam kita mengenal instrumen sosial yang meliputi: zakat, infak, sedekah dan waqaf sehingga harta benda yang dimiliki seseorang mengandung harta milik orang lain yang mesti dibersihkan atau disalurkan. Karenanya, salah satu rukun Islam yang harus dijalankan setiap muslim adalah membayar zakat. Menurut Andriyanto (2011) dan Nur & Arif (2010), instrumen sosial berupa zakat memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi menurut data Badan Pusat Statistik-BPS (2019) pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 25,7 juta jiwa. Lalu bagaimana bila instrumen sosial zakat ini dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskina? Tentu idealnya di Indonesia apabila seluruh ummat muslimnya telah menjalankan ajaran agamanya secara totalitas (kaffah), maka sudah tidak ada lagi ketimpangan dan kemiskinan, seperti yang termaktub dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja.” Namun demikian terdapat peluang, apabila zakat dapat dikelola dengan profesional dan masyarakat muslim Indonesia dapat mencontoh kepribadian dan tindakan dari rasul (Nata, 2016) menjalankan ajaran agamanya secara kaffa, maka bukan tidak mungkin zakat dapat menjadi salah satu solusi instrumen yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan pemerataan kekayaan, bahkan dapat sebagai mitigasi dan penanggulangan bencana, Hayati & Chaniago (2011).

Menurut data yang diungkapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat nasional di Indonesia pada 2017 mencapai Rp 271 triliun per tahun. Tetapi jumlah zakat yang diterima baru mencapai Rp 5 triliun. Selain Baznas, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang persis, yakni potensi zakat di Indonesia sudah mencapai 217 triliun, akan tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angka 4%. Dalam penelitian terdahulu, ditemukan penyebab mengapa tingkat penghimpunan zakat masih sedikit bila dibandingkan dengan potensinya, yakni karena kurangnya profesionalitas lembaga amil zakat, Canggi et al., (2017); Hayati & Caniago, (2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2018) dan Darmawati & Nawarini (2016), terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan zakat yang meliputi: kurangnya perencanaan strategis dari lembaga amil zakat; rendahnya komitmen pengelola terhadap organisasi, tingginya turn over pegawai, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Merujuk pada data yang diolah dari Boston Consulting Grup (BCG) yang memperkirakan pada 2020 Indonesia dihuni oleh 267 juta jiwa, dengan jumlah kelas menengah 62,8 persennya atau 147 juta jiwa Fauzia et al., (2019). Lebih lanjut, kelas menengah muslim selain mereka memiliki kontribusi terhadap perekonomian dikarenakan pendapatan mereka menciptakan permintaan atas barang-barang konsumsi, akan tetapi kalangan kelas menengah muslim ini akan cenderung mencari nilai spiritual dalam setiap aktivitasnya. Saat ini kita dapat melihat tren kalangan penduduk muslim Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka yang sesuai dengan tuntunan agama mengalami peningkatan Darojatun, (2018); Istiani, (2015). Berdasarkan tren tersebut, maka peningkatan kesadaran akan pencarian nilai spiritual ini merupakan potensi yang besar untuk turut menyampaikan urgensi rukun zakat.

Zakat memiliki arti al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji Canggi et al., (2017). Sedangkan secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, Sukmadilaga & Nugroho, (2017). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang artinya setiap muslim yang wajib untuk menunaikan kewajiban zakat bila sudah waktunya, hal ini termaktub dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakan

shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16). Zakat hukumnya wajib, tapi tidak semua muslim wajib menunaikannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa berzakat, yakni harta yang dimiliki sudah mencapai nishab dan telah mencapai haul. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 pihak yang berhak mendapat zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang berjalan di jalan Allah). Zakat sendiri terdiri dari dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan merupakan satu sha atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat. Adapun zakat maal adalah zakat yang dibayarkan kapan saja atas harta yang dimiliki oleh umat muslim. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada potensi dan realisasi zakat maal di Indonesia yang terkumpul di lembaga amil zakat. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada berapa estimasi potensi penerimaan dana zakat serta berapa total penghimpunan zakat yang berhasil dihimpun oleh beberapa lembaga amil zakat di Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang artinya penggambaran dalam penelitian ini menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi, Gunawan (2013). Objek penelitian ini adalah potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia yang mengacu pada jumlah penduduk muslim di Indonesia dan penghasilan rata-rata per tahunnya, serta realisasi penerimaan zakat dari beberapa lembaga amil zakat ternama di Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data sekunder dari data BPS, Kementerian Agama, dan data realisasi penerimaan zakat yang diambil dari laporan keuangan beberapa Lembaga zakat di Indonesia. Data potensi penerimaan zakat diambil dari data jumlah penduduk muslim di Indonesia dari tahun 2014-2018 dan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2014-2018 karena pendapatan per kapita di estimasi sebagai pendapatan rata-rata penduduk Indonesia pada satu tahun atau bisa diqiyaskan sebagai harta yang disimpan oleh penduduk selama satu tahun (harta yang sudah mencapai haul). Sedangkan data penerimaan zakat diambil dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Rumah Zakat (RZ), Dompot Dhuafa (DD), dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2014-2018.

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi penerimaan zakat dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Untuk menghitung potensi zakat, peneliti menggunakan pendapat Yusuf Qardhawi yakni zakat maal diambil dari 2,5% dikalikan pendapatan satu tahun. Hasil perbandingan antara potensi dengan realisasi zakat yang dihimpun selanjutnya akan dibandingkan dan dijabarkan lebih lanjut di bab hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun akan tetapi realisasi masih sangat jauh (Bambang Brodjonegoro-Kepala Bappenas/Menteri PPN, 2019) sehingga perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi dari pengelola zakat serta masyarakat terkait dengan pentingnya zakat. Lebih lanjut, syarat seseorang bisa disebut muzakki adalah dia beragama Islam dan dia merdeka. Maka untuk mengetahui potensi zakat di Indonesia terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah umat Muslim di Indonesia, sedangkan untuk poin dua tidak harus dicari datanya karena sistem perbudakan hampir sudah tidak ada di Indonesia kecuali di beberapa tempat seperti di Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1. Estimasi muzakki di indonesia

| Tahun | Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia |
|-------|-------------------------------------|
| 2014 | 99.967.101 |
| 2015 | 100.133.823 |
| 2016 | 207.176.162 |
| 2017 | 209.100.000 |
| 2018 | 225.250.000 |

Selain syarat untuk menjadi muzakki, ada pula syarat suatu harta harus di zakatkan, diantaranya harta harus dimiliki penuh, harta berupa harta yang berkembang, harta tersebut sudah mencapai nishab, harta tersebut sudah mencapai haul, dan harta merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Pendapatan per kapita merupakan cerminan dari besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam satu periode atau satu tahun. Maka pendapatan per kapita bisa diasumsikan sebagai harta yang sudah mencapai haul. Berikut data pendapatan per kapita Indonesia tahun 2014-2018:

Tabel 2. Pendapatan per kapita di Indonesia

| Tahun | Pendapatan Per Kapita (Rp) |
|-------|----------------------------|
| 2014 | 28.890.800 |
| 2015 | 31.360.300 |
| 2016 | 47.960.000 |
| 2017 | 51.890.000 |
| 2018 | 56.000.000 |

Selain mencari tahu jumlah harta dalam satu tahun, kita juga harus mencari tahu apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum. Asumsi nishab bisa menggunakan harga emas atau harga perak pada akhir tahun, tergantung pendapat mana yang kita pegang. Pendapat pertama mengatakan bahwa kita harus menggunakan nishab emas, seperti yang difatwakan oleh Yusuf Qardawi dikarenakan nilai perak cenderung turun dan nilai emas cenderung stabil. Selain itu, Rasulullah pun pernah bersabda:

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتَرُدَّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ

Zakat itu diambil dari orang kaya, untuk dikembalikan kepada orang miskin mereka.. (HR. Bukhari 7372). Bila dibanding kan dengan harga perak, tentu harga emas lebih tinggi sehingga orang-orang sepakat bahwa orang yang memiliki 85 gram emas adalah orang kaya sedangkan orang yang memiliki 595 gram perak adalah orang berpendapatan rendah (595 gram x Rp. 7.320= Rp. 4,355,400).

Sedangkan untuk pendapat kedua mengatakan bahwa nishab harta mengikuti nishab yang lebih rendah, yakni nishab perak. Pendapat ini menitik beratkan pada sisi manfaat untuk fakir miskin. Dengan nishab yang lebih rendah, akan lebih menguntungkan bagi kesejahteraan sosial karena akan makin banyak orang-orang yang berzakat. Pendapat ini sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah no. 1728, yakni: "Ukuran nishab zakat untuk dolar atau mata uang yang lainnya senilai dengan 20 mitsqal emas (85 gr) atau 40 mitsqal perak (595 gr) di waktu ketika anda wajib mengeluarkan zakat, dalam bentuk dolar atau mata uang lainnya. Dan dalam hal ini, nishab yang dipilih adalah yang paling menguntungkan bagi orang miskin. Itu dilakukan dengan menimbang perbedaan harganya, menurut perbedaan waktu dan tempat".

Untuk potensi zakat dengan asumsi nishab harga emas, maka kita harus mencari tahu, pada akhir tahun, apakah harta kita sudah senilai dengan harga emas 85 gram (20 dinar x 4,25 gram emas) ataukah belum, berikut harga emas pada bulan Desember setiap tahunnya:

Tabel 3. Nishab emas

| Tahun | Harga per gram (Rp) | Harga emas 85 gram (Rp) |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 2014 | 474.827 | 40.360.295 |
| 2015 | 470.619 | 40.002.615 |
| 2016 | 497.768 | 42.310.280 |
| 2017 | 567.454 | 48.233.590 |
| 2018 | 596.853 | 50.732.505 |

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata orang Indonesia baru bisa berzakat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 karena pada tahun sebelumnya jumlah pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah syarat nishab zakat emas.

Untuk mengetahui potensi zakat dengan asumsi nishab harga perak, maka kita harus mengetahui harga perak dikali dengan nisab zakat perak yakni 595 gram, maka kita harus mencari tahu, pada akhir tahun, apakah harta kita sudah senilai dengan harga perak 595 gram ataukah belum, berikut harga perak pada bulan Desember setiap tahunnya:

Tabel 4. Nishab perak

| Tahun | Harga per gram (Rp) | Harga perak 595 gram (Rp) |
|-------|---------------------|---------------------------|
| 2014 | 6.274 | 3.733.030 |
| 2015 | 6.264 | 3.727.080 |
| 2016 | 6.928 | 4.122.160 |
| 2017 | 7.263 | 4.321.485 |
| 2018 | 6.865 | 4.084.675 |

Berdasarkan data di atas, maka kita bisa menggunakan nishab perak sebagai acuan bahwa rata-rata penduduk muslim Indonesia sudah wajib untuk berzakat. Maka potensi zakat muslim Indonesia secara individu dari tahun ke tahun adalah:

Tabel 5. Potensi penerimaan zakat di indonesia

| Tahun | Potensi Penerimaan Zakat (Rp) |
|-------|-------------------------------|
| 2014 | 72.203.238.039.270 |
| 2015 | 78.505.668.235.673 |
| 2016 | 248.404.218.238.000 |
| 2017 | 271.254.975.000.000 |
| 2018 | 315.350.000.000.000 |

*2,5% x pendapatan per kapita x jumlah penduduk muslim

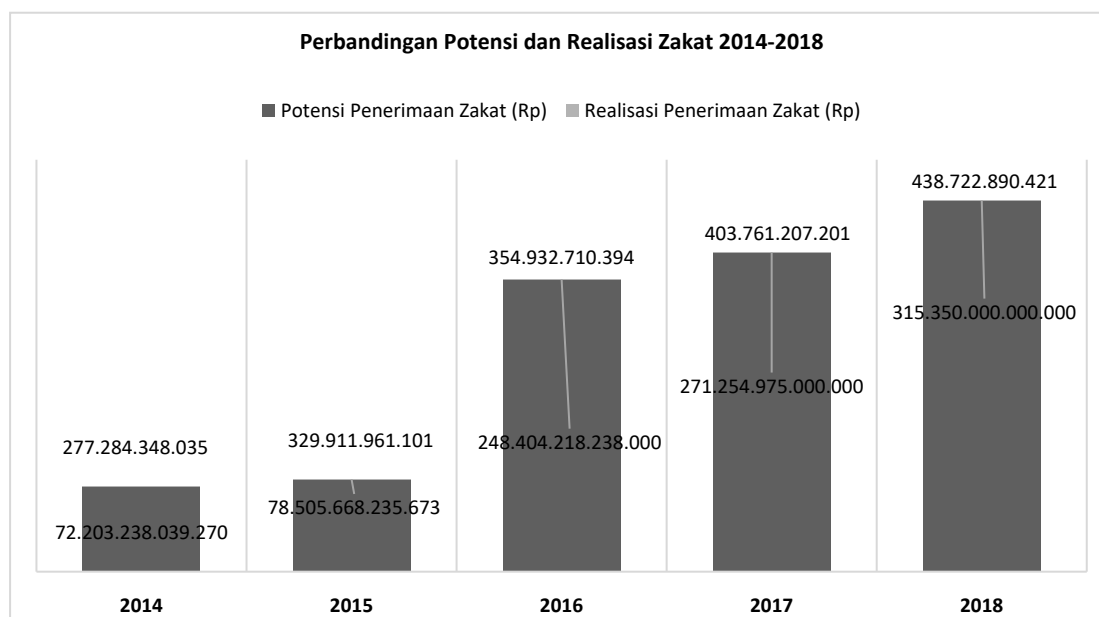
Realisasi penerimaan zakat bisa kita ketahui dari laporan keuangan berbagai lembaga amil zakat di Indonesia, beberapa data dari lembaga amil zakat yang cukup tenar, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Aksi Cepat Tanggap :

Tabel 6. Realisasi penerimaan zakat di indonesia

| Tahun | Baznas (Rp) | RZ (Rp) | DD (Rp) | ACT (Rp) | Total (Rp) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 69.865.506.671 | 79.961.568.561 | 124.045.005.930 | 3.412.266.873 | 277.284.348.035 |
| 2015 | 82.272.643.293 | 97.666.410.793 | 147.378.640.738 | 2.594.266.277 | 329.911.961.101 |
| 2016 | 97.637.657.910 | 109.338.881.331 | 143.341.656.531 | 4.614.514.622 | 354.932.710.394 |
| 2017 | 138.096.290.551 | 113.382.621.377 | 146.273.657.234 | 6.008.638.039 | 403.761.207.201 |
| 2018 | 161.185.135.691 | 120.580.750.711 | 156.250.000.000 | 707.004.019 | 438.722.890.421 |

Sumber: baznas.go.id, rumahzakat.org, dompetdhuafa.org, act.id

Dari hasil perhitungan antara potensi dengan realisasi, kita bisa mengetahui bahwa ada ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi zakat dengan realisasinya, berikut grafik perbandingannya:



Gambar 1. Potensi vs realisasi penerimaan zakat di indonesia

Dari serangkaian perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi dana zakat di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi total realisasi tersebut tidak sepadan dengan potensi zakat yang ada. Menurut data di atas, diketahui bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai 1 % dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hal ini selaras dengan pendapat dari Ketua Baznas, Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa di tingkat nasional zakat yang dikumpulkan di lembaga badan amil resmi masih kecil sekali bila dibandingkan dengan ruang pengumpulan zakat yang besar. Selain Baznas, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang persis, yakni potensi zakat di Indonesia sudah mencapai 217 triliun, akan tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angka 4%.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia menurut Canggih et al., (2017) diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Ada beberapa anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa ada lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan partai politik ataupun lembaga negara (Departemen Agama) yang memiliki citra negatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa Lembaga amil zakat belum mempunyai database mustahiq yang akurat dan juga sepak terjang program nya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara konkrit. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahiq disekitarnya. Selanjutnya faktor edukasi dimana masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti cara menghitung zakat. Faktor regulasi juga menjadi penyebab penghimpunan zakat belum semaksimal pajak. Terakhir karena faktor rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Menurut pendapat lain, yakni Istikhomah & Asrori (2019), mengatakan bahwasanya ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realisasi zakat tidak tercatat. Selain itu terdapat pengaruh atas perbedaan pendapat nishab yang dipakai dengan jumlah potensi penghimpunan zakat. Bila orang-orang di Indonesia berpendapat bahwa nishab harga emas adalah pendapat yang benar tentu nilai perhitungan potensi di atas akan salah dan pada akhirnya realisasi zakat juga mengalami penurunan. Menurut Kusmanto (2014), perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat juga menjadi kesulitan tersendiri di era ini, pertama tidak ada kesepakatan tentang jenis pendapatan dan harta yang dikenakan zakat dan tarif yang diterapkan, kedua karena lemahnya dukungan statistik yang relevan untuk perhitungan zakat, yang ketiga karena adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Maksudnya, dalam fiqh klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, barang perniagaan. Sedangkan di masa kini yang notabene makin beragam aktivitas ekonominya, akan memunculkan qiyas -qiyas baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentukan jumlah pasti dari potensi penghimpunan zakat yang tepat.

Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat harus selalu ditingkatkan. Selain itu upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat dapat diupayakan melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu terhangat dari zakat bisa diupayakan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat bisa meningkat. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga berperan penting terhadap peningkatan penghimpunan pajak. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberi keringanan jumlah pajak yang dibayar bagi orang yang telah membayar zakat.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia akan tetapi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi dana zakat di Indonesia tidak sepadan dengan potensi zakat yang ada. Menurut data di atas, diketahui bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai 1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Menurut pendapat lain, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat karena adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Maksudnya, makin beragam aktivitas ekonominya, akan memunculkan qiyas-qiyas baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentuka jumlah pasti dari potensi penghimpunan zakat yang tepat.

Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat harus selalu digencarkan seperti upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 19(1), 25–46.
- Bambang Brodjonegoro-Kepala Bappenas/Menteri PPN. (2019). Punya potensi Rp 217 triliun, pemerintah terus dorong penyaluran zakat nasional.
- BPS, Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018. Retrieved July 17, 2019, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26.
- Darmawati, D. (2018). Studi Eksplorasi Tentang Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (Zis). *Performance*, 25(2), 17–22.
- Darmawati, D., & Nawarini, A. T. (2016). Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al-Tijary*, 02(01), 67–76.
- Darojatun, R. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, 19(2), 135–157.
- Fauzia, D. R. S., Pangestuti, E., & Bafadhal, A. S. (2019). Pengaruh religiusitas, sertifikasi halal, bahan produk terhadap minat beli dan keputusan pembelian. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 66(1), 37–46.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayati, K., & Caniago, I. (2011). Zakat Potential as A Means to Overcome Poverty (A Study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(2), 187–200.
- Istiani, A. N. (2015). Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 48–55.
- Istikhomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95–109.
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 288–297.
- Nata, A. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community. Malang. Retrieved from http://fitk.uin-malang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi Kuliah Tamu PAI 2016_.pdf

- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2017). The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291.
- Nur, M., & Arif, R. Al. (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42–49.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media, Ed.) (First). Lampung, Jakarta: Pusaka Media.

Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2011-2015)

Moh. Baqir Ainun

Universitas Airlangga, Surabaya.

Email: moh.baqir.ainun-2018@feb.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *growth*, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *software spss statistic 25.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengkonfirmasi teori-teori kebijakan dividen seperti teori *signalling*, teori *bird in the hand*, dan teori *free cash flow hypothesis*. Selain itu, variabel kontrol yang digunakan berpengaruh signifikan kecuali *leverage* dan *growth*. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya bukti empiris tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham, dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajer perusahaan dalam menentukan kebijakan dividennya.

Kata Kunci: Kebijakan dividen; harga saham; teori signalling; teori bird in the hand; free cash flow hypothesis

Effect of dividend policy on stock prices (study of manufacturing companies in the Indonesia stock exchange period 2011-2015)

Abstract

This study aims to examine the effect of dividend policy on stock prices using control variables namely profitability, liquidity, leverage, growth, and firm size. Samples were taken from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2015. The data analysis technique uses multiple regression analysis with software spss statistics 25.0. The results of this study indicate that dividend policy has a significant positive effect on stock prices. This shows that this research confirms dividend policy theories such as signaling theory, bird in the hand theory, and the theory of free cash flow hypothesis. In addition, the control variables used have a significant effect except leverage and growth. This research contributes to enriching empirical evidence about the effect of dividend policy on stock prices, and is expected to be a reference for company managers in determining dividend policy.

Keywords: Dividend policy; stock price; signalling theory; bird in the hand theory; free cash flow hypothesis

PENDAHULUAN

Kebijakan dividen merupakan topik yang telah banyak diperbincangkan oleh kalangan akademisi. Hal ini terjadi karena kebijakan dividen penting bagi manajer, kreditur, dan investor, Jahfer dan Mulafara (2016). Investor memiliki kepentingan pada kebijakan dividen karena dividen merupakan sumber pendapatan dari investasi yang telah dilakukan pada perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen juga merupakan cara untuk mengevaluasi perusahaan.

Bilal dan Jamil (2015), menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan kebijakan pembiayaan yang penting bagi perusahaan dan berdampak pada harga saham. Terkait hubungan kebijakan dividen dengan harga saham, terdapat teori yang saling bertentangan satu sama lain, seperti teori Miller dan Modigliani (1961), dan pendapat dari Gordon (1963). Miller dan Modigliani (1961), menyatakan bahwa harga saham sebuah perusahaan tidak ditentukan oleh kebijakan dividen perusahaan, sedangkan Gordon (1963) menyatakan bahwa kebijakan dividen memiliki relevansi dengan harga saham.

Kebijakan dividen merupakan topik yang tetap menjadi perdebatan terkait hubungannya dengan harga saham Khan *et al.*, (2011); Baker dan Jabbouri, (2017). Para akademisi telah banyak memberikan perhatiannya terhadap hubungan antara kebijakan dividen dengan harga saham (Karpavičius dan Yu, 2018). Pada akhirnya, ditemukan bukti-bukti empiris yang beragam.

Beberapa penelitian seperti Karpavičius dan Yu (2018), Fajaria (2015), Karpavicius (2014), Fenandar dan Raharja (2012), dan Hussainey *et al.* (2011) menyimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini karena pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai sebuah sinyal bahwa kondisi perusahaan dalam kondisi baik, dan memiliki prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti Mardiyati *et al.* (2012), dan Deitiana (2011) menyimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham dan mendukung teori *dividend irrelevant* bahwa kebijakan dividen tidak relevan terhadap harga saham seperti yang diajukan oleh Miller dan Modigliani (1961). Perbedaan hasil penelitian yang terjadi memiliki argumen masing-masing dan berlandaskan teori yang relevan dan kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan bukti empiris terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015 dengan jumlah sampel 160 perusahaan-tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karpavičius dan Yu (2018), Bilal dan Jamil (2015), Karpavičius (2014), Farooq dan Chetoui (2012), dan Hussainey *et al.* (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan direspon oleh investor di pasar modal sehingga saham perusahaan mengalami banyak permintaan dan harganya meningkat. Penelitian ini mengkonfirmasi teori *signalling*, teori *bird in the hand*, dan teori *free cash flow hypothesis*. Selain itu, variabel kontrol yang digunakan juga memiliki hasil yang signifikan kecuali *leverage* dan *growth*.

Hasil penelitian ini berkontribusi untuk menambah literatur terkait hubungan antara kebijakan dividen dengan harga saham. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh manajer perusahaan untuk mempertahankan intensitas pembagian dividen agar nilai perusahaan di pasar modal tetap baik.

Adapun susunan artikel ini adalah pendahuluan di bagian pertama. Tinjauan pustaka di bagian kedua untuk menjelaskan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, kemudian di bagian ke empat adalah hasil dan pembahasan, sedangkan bagian kelima adalah kesimpulan dan saran.

Tinjauan pustaka

Harga saham merupakan salah satu cara untuk menentukan nilai sebuah perusahaan. Harga saham yang tinggi mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga tinggi, sedangkan harga saham yang rendah mengindikasikan nilai perusahaan yang rendah, Fenandar dan Raharja, (2012); Fajaria, (2015).

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh manajer untuk membagikan dividen atau menahan dividen sebagai laba ditahan. Baik perusahaan maupun investor memiliki kepentingan dengan kebijakan dividen karena kebijakan dividen terkait dengan sumber pendapatan yang akan diperoleh investor apabila dividen dibagikan, dan sumber pendanaan yang akan diperoleh oleh perusahaan apabila dividen tidak dibagikan, Jahfer dan Mulafara, (2016).

Teori-teori tentang kebijakan dividen telah dicetuskan oleh para ahli. Teori *dividend irrelevant* merupakan teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, Miller dan Modigliani, (1961). Teori *catering dividend* merupakan teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen bergantung dari preferensi pemegang saham itu sendiri. Teori *free cash flow hypothesis* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa pembagian dividen akan dapat menekan arus kas bebas dalam perusahaan sehingga menekan masalah agensi berupa kecenderungan manajer untuk menggunakan arus kas bebas yang ada untuk membiayai proyek dengan NPV negatif demi kepentingan pribadi manajer. *Expropriation hypothesis* merupakan teori yang menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung tidak menginginkan pembagian dividen karena keterlibatan dari pemegang saham mayoritas dalam pengawasan perusahaan. *Substitution hypothesis* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa pembagian dividen digunakan sebagai sebuah kamufase untuk menutupi keadaan perusahaan yang kurang, pembagian dividen yang dilakukan dalam kasus ini diharapkan dapat membuat investor berasumsi bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Teori *signalling* mengasumsikan bahwa kebijakan dividen dapat menjadi sebuah sinyal bagi investor bahwa perusahaan dalam keadaan baik. Kayanya kebijakan dividen dengan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli menunjukkan besarnya minat akademisi untuk mempelajari pentingnya kebijakan dividen dalam perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan terhadap harga saham. Bilal dan Jamil (2015) menyatakan bahwa *dividen pay out ratio* memiliki pengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan industri yang terdaftar pada *Muscat Securities Market* (MSM) di Oman. Karpavičius dan Yu (2018) menyatakan bahwa *dividend payout ratio* berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Farooq dan Chetoui (2012) dengan menggunakan sampel perusahaan di MENA (Morocco, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan, Kuwait, dan Bahrain) menyimpulkan bahwa pembayaran dividen memiliki hubungan dengan harga saham. Farooq dan Chetoui (2012) menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan bentuk dari efektifnya mekanisme tata kelola perusahaan sehingga dapat mengurangi masalah agensi yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja harga saham perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deitiana (2011), memberikan bukti yang berbeda. Deitiana (2011), menyatakan bahwa dividen tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008 mendukung teori *dividend irrelevant* yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani (1961).

Terlepas dari perdebatan hasil penelitian yang terjadi tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham, penelitian lain yang dilakukan oleh Karpavičius dan Yu (2018), Karpavičius (2014), dan Hussainey *et al.* (2011), juga menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham. Pembagian dividen merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik karena hanya perusahaan yang *profitable* yang membagikan dividennya. Anggapan investor bahwa perusahaan dalam keadaan baik akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebagai konsekwensinya, permintaan saham perusahaan akan meningkat dan meningkatkan harga saham perusahaan.

H1: Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2013), menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software spss statistic 25.0 untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Berdasarkan karakteristik ini maka metode kuantitatif dianggap cocok untuk digunakan.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, satu variabel independen, dan lima variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Variabel independen yang

digunakan adalah kebijakan dividen. Variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *growth*, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol disertakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mengurangi bias dari adanya variabel yang berpengaruh diluar model penelitian. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder melalui *website* www.idx.co.id.

Harga Saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan oleh pelaku pasar pada saat pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pada saham yang bersangkutan di pasar modal, Nababan (2019). Adapun pengukuran harga saham dalam penelitian mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Nababan (2019), dan Deitiana (2011), menggunakan harga saham saat penutupan (*closing price*).

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham atau menahannya sebagai laba ditahan (Deitiana, 2011). Adapun *proxy* yang digunakan adalah *dividend pay out ratio* seperti yang telah digunakan oleh Karpavičius dan Yu (2018), Muharti dan Anita (2017), Bilal dan Jamil (2015), Fajaria (2015), Fenandar dan Raharja (2012), dan Mardiyati *et al.* (2012). *Dividend payout ratio* merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan. Semakin tinggi *dividend payout ratio* akan menguntungkan investor, namun akan berdampak pada kecilnya laba ditahan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

$$\text{DPR} = \frac{\text{Dividen Perlembar Saham}}{\text{Laba Bersih Perlembar Saham}}$$

Adapun pengukuran yang digunakan untuk variabel kontrol profitabilitas menggunakan *ratio on asset* (ROA), likuiditas menggunakan *current ratio* (CR), *leverage* menggunakan *debt to equity ratio* (DER), *growth* menggunakan rasio pertumbuhan aset perusahaan (*Growth*), dan ukuran perusahaan menggunakan *log* dari total aset perusahaan (*Size*).

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{EBIT}}{\text{TotalAset}} \\ \text{CR} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \\ \text{DER} &= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \\ \text{Growth} &= \frac{\text{TotalAset}_1 - \text{TotalAset}_{t-1}}{\text{Totalaset}_{t-1}} \\ \text{Size} &= \text{Ln}(\text{TotalAset}) \end{aligned}$$

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{PRICE} = \alpha + \beta_1 \text{DPR} + \beta_2 \text{ROA} + \beta_3 \text{CR} + \beta_4 \text{DER} + \beta_5 \text{GROWTH} + \beta_6 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

| | |
|---------------|--|
| α | = intersep |
| β | = koefisien regresi variabel independen |
| PRICE | = harga saham |
| DPR | = dividen payout ratio (kebijakan diveden) |
| ROA | = return on asset (profitabilitas) |
| CR | = current ratio (likuiditas) |
| DER | = debt to equity ratio (leverage) |
| GROWTH | = pertumbuhan perusahaan |
| SIZE | = ukuran perusahaan |
| ε | = error |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan bantuan spss statistik 25.0 antara lain adalah statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji korelasi, dan hasil uji koefisien regresi.

Statistik deskriptif

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 160 observasi perusahaan-tahun. Adapun analisis deskriptif dari setiap varuiabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Log PRICE | 160 | 2,15 | 6,08 | 3,77 | ,78 |
| DPR | 160 | ,07 | 145,92 | 42,9792 | 28,03562 |
| ROA | 160 | ,01 | ,66 | ,15 | ,10 |
| CR | 160 | ,51 | 11,74 | 2,66 | 1,85 |
| DER | 160 | ,11 | 3,03 | ,71 | ,50 |
| Growth | 160 | -,87 | 10,77 | ,21 | ,85 |
| Size | 160 | 25,31 | 33,13 | 29,01 | 1,76 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai minimum dari harga saham (*log price*) adalah 2,15, nilai maksimum adalah 6,08, dan standar deviasi 0,78. Nilai minimum dari *dividen pay out ratio* (DPR) adalah 0,07, nilai maksimum adalah 145,92, dan standar deviasi 28,03562. Nilai minimum dari *Return on Asset* (ROA) adalah 0,01, nilai maksimum adalah 0,66, dan standar deviasi 0,10. Nilai minimum dari *current ratio* (CR) adalah 0,51, nilai maksimum adalah 11,74, dan standar deviasi 1,85. Nilai minimum dari *debt to equity ratio* (DER) adalah 0,11, nilai maksimum adalah 3,03, dan standar deviasi 0,50. Nilai minimum dari *growth* adalah -0,87, nilai maksimum adalah 10,77, dan standar deviasi 0,85. Nilai minimum dari ukuran perusahaan (*SIZE*) adalah 25,31, nilai maksimum adalah 33,13, dan standar deviasi 1,76.

Asumsi klasik

Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik untuk menguji model penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

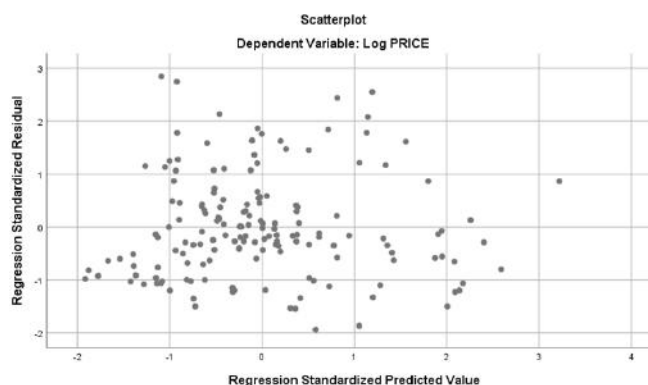
Uji multikolinieritas

Tabel 2. Uji multikolinieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|--------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Log DPR | ,351 | 2,847 |
| DPR | ,309 | 3,239 |
| ROA | ,692 | 1,444 |
| CR | ,541 | 1,849 |
| DER | ,568 | 1,759 |
| Growth | ,903 | 1,107 |
| Size | ,854 | 1,171 |

Uji multikolinieritas merupakan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model penelitian terbebas dari adanya korelasi antar variabel independen. Anshari (2019), menyatakan bahwa nilai VIF yang berada dibawah 5 dapat dinyatakan bahwa model penelitian bebas dari multikolinieritas. Dari tabel di atas nilai VIF berada di bawah 5 sehingga model penelitian dalam penelitian ini dinyatakan telah lolos dari uji multikolinieritas.

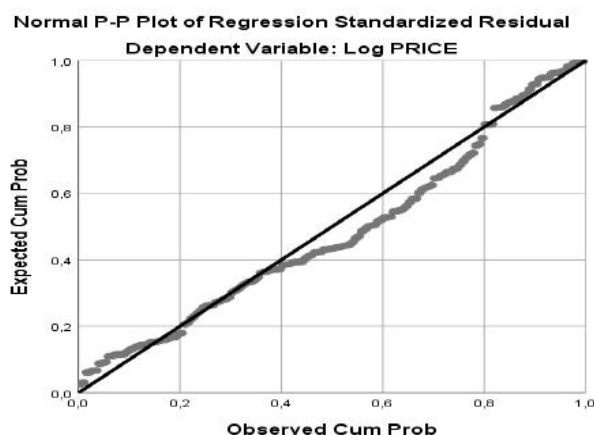
Uji heterokedastisitas



Gambar 1. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji asumsi klasik untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model penelitian yang ditetapkan. Apabila titik-titik pada scatter plot regression standardized predicted value tersebar maka dapat dinyatakan bahwa model memenuhi uji heterokedastisitas, Anshari (2019). Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar, sehingga model penelitian dalam penelitian ini dinyatakan telah memenuhi uji heterokedastisitas.

Uji normalitas



Gambar 2. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk memastikan bahwa residul dalam penelitian telah berdistribusi normal. Anshari (2019), menyatakan bahwa apabila titik-titik pada normal p-p plot regression standardized residual mengikuti garis dan tidak menyebar maka disimpulkan bahwa model penelitian telah normal. Pada Gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik yang ada telah mengikuti garis, sehingga model penelitian dalam penelitian ini dinyatakan normal.

Uji korelasi

Tabel 3. Uji korelasi variabel independen terhadap variabel dependen

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,721 ^a | ,520 | ,498 | ,555676565762769 |

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen yang ada dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Tabel di atas menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki keakuratan 52% yang dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini menjelaskan variabel harga saham sebesar 52%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji koefisien regresi

Tabel 4. Uji koefisien regresi

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | -1,106 | ,791 | | -1,399 | ,164 |
| | DPR | ,006 | ,003 | ,207 | 2,049 | ,042 |
| | ROA | 3,954 | ,506 | ,528 | 7,813 | ,000 |
| | CR | ,122 | ,032 | ,289 | 3,783 | ,000 |
| | DER | ,118 | ,116 | ,076 | 1,014 | ,312 |
| | Growth | -,019 | ,054 | -,021 | -,349 | ,727 |
| | Size | ,145 | ,027 | ,325 | 5,344 | ,000 |

Tabel 4 merupakan hasil analisis koefisien regresi yang mana dari hasil analisis tersebut dapat diketahui model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$PRICE = -1,106 + 0,006 DPR + 3,954 ROA + 0,122 CR + 0,118 DER - 0,019 GROWTH + 0,145 SIZE + 0,791$

Model ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 dari kebijakan dividen akan diikuti oleh 0,006 kenaikan harga saham dengan asumsi variabel yang lain dalam penelitian adalah konstan.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada tingkat 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig DPR sebesar 0,42 yang berada di bawah 0,05 yang berarti hipotesis penelitian yang ditetapkan telah dikonfirmasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karpavičius dan Yu (2018), Bilal dan Jamil (2015), Karpavičius (2014), Farooq dan Chetioui (2012), dan Hussainey et al. (2011).

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori signalling yang menunjukkan bahwa investor merespon kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Investor menganggap kebijakan dividen sebagai sebuah sinyal yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik dan memiliki prospek yang menguntungkan untuk investor, sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan harga saham karena banyaknya permintaan.

Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi teori bird in the hand yang menyatakan bahwa investor menyukai pembagian dividen sebagai upaya untuk menekan ketidakpastian apabila dividen tidak dibagikan. Selain itu, penelitian ini juga mengkonfirmasi teori free cash flow hypothesis dimana pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan dapat menekan arus kas bebas dalam perusahaan, dan pada akhirnya dapat menekan sikap oportunistik manajer untuk menggunakan arus kas bebas tersebut untuk kepentingan pribadi dalam bentuk pembiayaan proyek dengan NPV negatif.

Di sisi lain, perusahaan juga berusaha untuk mewujudkan keinginan investor sebagai upaya untuk menarik investor agar berinvestasi pada perusahaan dengan membagikan dividen. Keinginan investor yang cenderung menginginkan pembagian dividen dijawab oleh perusahaan dengan meningkatkan pembayaran dividen. Sebagai konsekwensinya, investor merasa puas dan harga saham perusahaan meningkat karena banyaknya permintaan terhadap saham perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori clientele effect.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada tingkat 1% selain DER dan Growth, dimana DER dan Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor tentang kondisi perusahaan. Profitabilitas dan likuiditas perusahaan dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik, sehingga investor berminat untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan permintaan saham dan meningkatkan harganya. Ukuran perusahaan dapat dijadikan salah satu indikator bahwa perusahaan telah mapan dan memiliki prospek yang cukup baik sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi didalamnya yang pada akhirnya akan meningkatkan harga pasar dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui pula bahwa kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena harga saham merupakan salah satu tolak ukur nilai sebuah perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga memberikan tambahan bukti bahwa kebijakan dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan baik dengan menggunakan proxy harga saham pada saat penutupan maupun menggunakan proxy lain seperti price book value Fenandar dan Raharja, 2012; Muharti dan Anita, (2017), dan price earning value Fajaria, (2015).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan direspon oleh investor sebagai sebuah sinyal bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan baik, yang pada akhirnya meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan meningkatkan harga saham. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor lebih suka apabila perusahaan membagi dividen untuk meningkatkan kepastian arus kas masuk pada investor. Penelitian ini memperkaya bukti empiris tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham, dan menjadi salah satu rujukan yang dapat digunakan oleh manajer perusahaan untuk memutuskan kebijakan dividennya sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga sahamnya di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, R. (2019). Pengaruh customer relationship management (crm) terhadap kinerja perusahaan pada industri perbankan Indonesia. AKUNTABEL, 16(1), 122-127.

-
- Baker, H. K., & Jabbouri, I. (2017). How Moroccan institutional investors view dividend policy. *Managerial Finance*, 43(12), 1332-1347.
- Bilal, Z. O., & Jamil, S. A. (2015). Does Dividend Policy Impact Stock Market Prices?-Evidence From Oman. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(9), 6873-6883.
- Deitiana, T. (2011). Pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan dan dividen terhadap harga saham. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(1), 57-66.
- Fajaria, A. Z. (2015). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *STIE PERBANAS SURABAYA*.
- Farooq, O., & Chetoui, Y. (2012). Corporate governance and stock price performance of firms during the crisis: evidence from the MENA region. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 7(4), 331-349.
- Fenandar, G. I., & Raharja, S. (2012). Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Gordon, M. J. (1963). Optimal investment and financing policy. *The Journal of finance*, 18(2), 264-272.
- Hussainey, K., Oscar Mgbame, C., & Chijoke-Mgbame, A. M. (2011). Dividend policy and share price volatility: UK evidence. *The Journal of risk finance*, 12(1), 57-68.
- Jahfer, A., & Mulafara, A. H. (2016). Dividend policy and share price volatility: evidence from Colombo stock market. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 8(2), 97-108.
- Karpavičius, S. (2014). Dividends: Relevance, rigidity, and signaling. *Journal of Corporate Finance*, 25, 289-312.
- Karpavičius, S., & Yu, F. (2018). Dividend premium: Are dividend-paying stocks worth more? *International Review of Financial Analysis*, 56, 112-126.
- Khan, K. I., Aamir, M., Qayyum, A., Nasir, A., & Khan, M. I. (2011). Can dividend decisions affect the stock prices: A case of dividend paying companies of KSE. *International Research Journal of Finance and Economics*, 76(68), 69-74.
- Mardiyati, U., Ahmad, G. N., & Putri, R. (2012). Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2010. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 1-17.
- Miller, M., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. *the Journal of Business*, 34(4), 411-433.
- Muharti, & Anita, R. (2017). Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 142-155.
- Nababan, L. U. (2019). Penerapan model regresi data panel pada analisis harga saham perusahaan batubara. *AKUNTABEL*, 16(1), 81-97.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap praktik manajemen laba

Rizki Arlita¹, Hamid Bone², Agus Iwan Kesuma³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

¹Email: rizkiarlita04@gmail.com

²Email: hamid.bone@feb.unmul.ac.id

³Email: agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *good corporate governance* dan rasio *leverage* terhadap manajemen laba. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis. *Good corporate governance* diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen. *Real Earnings Management* digunakan sebagai proksi dari manajemen laba. Sampel penelitian adalah 9 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* selama periode penelitian tahun 2013-2016. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis penelitian. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa dengan Uji Kelayakan Model diperoleh nilai signifikan sebesar $0,040 < 0,05$ yang menyatakan model layak dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Uji Koefisien Determinasi (R^2) dengan melihat nilai *adjusted R square* menunjukkan bahwa sebesar 27% variasi variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel dependen.

Kata Kunci: Manajemen laba; kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; proporsi dewan komisaris independen

The effect of good corporate governance and leverage on earnings management practices

Abstract

*The purpose of this study is to examine and obtain empirical evidence about the effect of good corporate governance and leverage ratios on earnings management. The benefits of this research are expected to provide practical and theoretical benefits. Good corporate governance is measured using institutional ownership, managerial ownership and the proportion of independent commissioners. Real Earnings Management is used as a proxy for earnings management. The research sample was 9 consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange, which were selected using the purposive sampling method during the 2013-2016 research period. Data were analyzed using multiple regression analysis methods in testing the research hypothesis. The results of multiple linear regression analysis showed that the Model Feasibility Test obtained a significant value of $0.040 < 0.05$ which states the model is feasible to be analyzed by multiple linear regression analysis. Determination Coefficient Test (" R^2 ") by looking at the adjusted *R square* value shows that 27% of the variation of the dependent variable in this study can be explained by the variation of the dependent variable.*

Keywords: Earnings management; institutional ownership; managerial ownership; the independent commissioners proportion; leverage

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan arus informasi berkembang pesat menuntut perusahaan untuk dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna informasi, seperti investor dan stakeholder. Informasi berupa laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan dalam menilai kinerja atau tingkat kesehatan perusahaan, dengan demikian ada kemungkinan para manajer melakukan praktik manajemen laba agar laporan keuangan terlihat baik dan memenuhi kriteria bagi investor. Adanya asimetri informasi dan kecenderungan dari pihak eksternal (investor) untuk lebih memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan akan mendorong manajemen melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba yang disebut sebagai manajemen laba (earnings management) Agustia, (2013). Adanya kecenderungan untuk memperhatikan laba perusahaan telah mendasari sikap manajer yang cenderung untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi khususnya laba (earnings) demi kepentingan pribadi dan/atau perusahaan.

Praktik manajemen laba merupakan sisi lain dari teori agensi Sulistyanto, (2008). Sisi lain tersebut terletak pada penekanan pentingnya penyerahan tanggung jawab operasi perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang memiliki kemampuan pengelolaan lebih baik. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam Fauziyah (2014), adanya ketidakseimbangan dalam penyampaian informasi dimana manajer memiliki informasi lebih banyak dari pemilik, hal ini memicu konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Semakin besar asimetri informasi maka semakin besar juga dorongan bagi manajer dalam berlaku oportunistik. Perilaku tersebut dilakukan oleh manajer disebabkan oleh adanya beberapa motivasi seperti motivasi bonus, kontrak politik, pajak, pergantian direksi dan Initial Public Offering (IPO).

Praktik manajemen laba yang mengarah pada aktivitas operasional riil dikenal sebagai manajemen laba riil (real earning management). Praktik ini dalam penelitian Roychowdhury (2006) dilakukan melalui tiga aktivitas operasional yaitu mark up penjualan, pengurangan biaya diskresioner dan produksi yang berlebihan (overproduction). Manajemen laba riil berbeda dengan fraudulent accounting dan accruals management dikarenakan keduanya tidak mengubah aktivitas operasional dari suatu perusahaan, namun hanya memilih metode akuntansi yang digunakan melalui pemanfaatan kelemahan inherent dari kebijakan akuntansi perusahaan dan tetap dalam ruang lingkup General Accepted Accounting, Principle Puspatrianti dan Fitriany (2014). Praktik Real Earnings Management (REM) dapat berupa diskon harga diakhir tahun sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan tahun depan yang dibebankan pada tahun sekarang dan menjual aset tetap untuk memberikan dampak pada others income, semua usaha tersebut merupakan cara untuk meningkatkan laba periode sekarang, Gunny (2005).

Menurut Aprilia (2010), tujuan praktik REM yaitu memenuhi target laba tertentu, menghindari kerugian, dan mencapai target analyst forecast. Praktik manajemen laba dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Telah banyak penelitian mengenai manajemen laba yang melibatkan variabel independen yang bermacam-macam. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti beberapa faktor saja, diantaranya adalah pengaruh mekanisme good corporate governance melalui Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen serta faktor lain yaitu leverage.

Alasan peneliti memilih faktor mekanisme good corporate governance tersebut diatas adalah karena isu ini sedang hangat dibicarakan sebagai suatu alat yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban perusahaan modern. Misalnya, komisaris independen merupakan representasi dari kepentingan minority interest. Keberadaannya dijadikan pelindung dari kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan tindakan oportunistik manajemen terhadap prinsipal. Diharapkan masalah yang nantinya akan timbul diharapkan dapat dibatasi atau bahkan diminimalisir. Sedangkan pemilihan faktor lainnya yaitu leverage karena leverage yang dihitung berdasarkan rumus perbandingan hutang dan aktiva memiliki kaitan erat dengan manajemen laba. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka hal tersebut mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Pemilihan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi sebagai objek dalam penelitian ini karena sub sektor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam dinamika perdagangan di Bursa Efek Indonesia sehingga diharapkan dapat merepresentasikan kondisi

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Selain itu, perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang memiliki komponen-komponen secara lengkap untuk menghitung nilai manajemen laba riil dengan ketiga proksi yang digunakan dalam penelitian ini.

Good corporate governance adalah suatu cara yang digunakan bertujuan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) agar kesalahan-kesalahan yang signifikan dapat diperbaiki ataupun diminimalisir. Mekanisme praktik good corporate governance merupakan alat yang digunakan manajemen dalam meningkatkan pengendalian dan transparansi atas operasional perusahaan sehingga pihak pengguna informasi (contoh: investor) menjadi lebih yakin atas pengembalian dana investasi yang mereka serahkan, Anwar dan Mulyadi (2015).

Leverage merupakan salah satu usaha dalam peningkatan laba usaha, dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam aktivitas manajemen laba. Belkaoui (2007), menyatakan bahwa semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (semakin ketat) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Selain itu perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menghadapi risiko yang lebih tinggi sehingga para investor akan menginginkan return yang semakin besar. Dalam kaitannya dengan leverage, salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang. Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Dechow dkk, (1996) menemukan bahwa motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan eksternal dan memenuhi perjanjian hutang.

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) dan Agustina (2015). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005). Agustina (2013), melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagulung (2011).

Kajian Pustaka

Teori agensi

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*. Adapun yang dimaksud dengan *principal* adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham (*stakeholders*), sedangkan *agent* adalah manajer perusahaan. Pemilik perusahaan mendelegasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab pemilik perusahaan dan manajer telah diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama. Dalam konteks pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan ini, Suwardjono (2005). Namun, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan, Brealey dkk., (2008). Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Fauziyah (2014), bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.

Laporan keuangan

Menurut PSAK No. 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan pernyataan dalam PSAK No. 1 adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut laporan

keuangan agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran serta pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi terkait. Komponen laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Tujuan tersebut bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Manajemen laba

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan motivasi tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Para pemakai laporan keuangan dimungkinkan akan mengambil keputusan yang salah dikarenakan mereka memperoleh informasi keuangan yang salah.

Manajemen laba riil

Roychowdhury (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:
“management actions that deviate from normal business practice, undertaken with primary objective of meetings certain earning thresholds”.

Dengan kata lain bahwa campur tangan manajer dalam proses pelaporan keuangan tidak hanya melalui metode-metode atau estimasi-estimasi akuntansi saja tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Lebih lanjut, manajer juga memiliki insentif untuk memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan untuk memenuhi target laba. Manipulasi aktivitas-aktivitas riil tersebut disebut manajemen laba riil.

Menurut Fauziyah (2014), manajemen laba melalui aktivitas riil dilakukan melalui:

- Arus Kas Operasi (Operating Cash Flow)
- Biaya Diskresioner (Discretionary Expenses)
- Biaya Produksi Berlebihan (Overproduction)

Good corporate governance

Corporate governance merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan sebagai suatu alat yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan modern. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah keagenan. Dengan informasi yang dimiliki, pengelola bisa bertindak yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi mengenai perusahaan, yang tidak dimiliki pemilik perusahaan (*asymmetric information*).

Kepemilikan institusional

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Sedangkan menurut Jensen dan Meckling menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*.

Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasinya. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen

dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Proporsi dewan komisaris independen

Pratiwi (2013), menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antara manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Anggota dari komisaris independen tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat. Karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Leverage

Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage) Van Horne dan Wachowicz (2005). Leverage operasi menunjukkan seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan sedangkan leverage keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang dengan modal yang dimilikinya, Herdian (2015). Rasio leverage terdiri dari beberapa macam rasio, antara lain debt to total asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity, dan time interested earned. Dalam penelitian ini, rasio leverage yang digunakan adalah debt to total assets ratio, yaitu perbandingan total kewajiban (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun, Wulandari (2013). Debt to total asset ratio ini digunakan karena dapat menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang atau beberapa bagian dari aset yang digunakan untuk menjamin hutang, Lande (2014). Rasio Leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dan menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat, Agustia (2013).

Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), berjudul “Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), berjudul “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur)”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Earnings Management. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Earnings Management. Sedangkan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Management. Sedangkan Earnings Management tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagulung (2011), berjudul “Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba perusahaan manufaktur. Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba perusahaan manufaktur. Sedangkan Leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba perusahaan manufaktur.

METODE

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu manajemen laba melalui aktivitas riil (Y) dan variabel independen yaitu Good Corporate Governance yang diprosikan

dengan kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan manajerial (X_2) dan proporsi dewan komisaris independen (X_3) serta variabel independen lain yaitu leverage (X_4).

Variabel dependen (Y)

Dengan menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006), manajemen laba diketahui melalui pendekatan riil yaitu abnormal cash flow operating, abnormal discretionary expenses dan *abnormal production cost*.

Arus kas operasi

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Biaya diskresioner

$$DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Biaya *overproduction*

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Variabel independen (X)

Kepemilikan institusional (X_1)

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Investor Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan manajerial (X_2)

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham beredar di pasar}} \times 100\%$$

Proporsi dewan komisaris independen (X_3)

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Keanggotaan Outside Directors}}{\text{Jumlah Keseluruhan Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Leverage (X_4)

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji koefisien determinasi

Tabel 1. Uji koefisien determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,519 ^a | ,270 | ,175 | ,104415095 |

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh nilai R Square sebesar 0,270 atau 27%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan leverage berpengaruh terhadap praktik manajemen laba laporan tahunan sebesar 27% sedangkan sisanya 73% (100% – 27%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 2. Hasil perhitungan uji t

| Model | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------|
| (Constant) | -,159 | ,111 | | -1,438 | ,160 |
| KI | ,295 | ,144 | ,658 | 2,054 | ,048 |
| 1 KM | ,426 | ,198 | ,660 | 2,155 | ,039 |
| DKI | ,161 | ,179 | ,150 | ,901 | ,375 |
| LEV | -,363 | ,150 | -,402 | -2,412 | ,022 |

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada laporan keuangan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa good corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,295 pada tingkat signifikansi 0,048 atau kepemilikan institusional dengan signifikansi di bawah

$\alpha=5\%$. Nilai koefisien menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif (0,295) dan signifikan ($0,048 < 0,05$), dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan yang berarti semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat manajemen laba dan semakin rendah kepemilikan institusional maka semakin rendah pula tingkat manajemen laba. Pengaruh positif yang dihasilkan dari penelitian tidak dapat mendukung temuan Cornett dkk. (2006) dalam Agustia (2013), bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba.

Berbeda dari pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan bahwa justru semakin tinggi tingkat kepemilikan saham institusional, maka semakin tinggi praktik manajemen laba pada laporan keuangan. Alasan ditolaknya hipotesis yakni dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional berarti adanya kekuasaan oleh investor institusi dalam mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, akibatnya manajer terasa terikat untuk memenuhi target laba dari para investor tersebut serta untuk dapat menyajikan laporan yang memuaskan, sehingga manajer akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba. Tentu saja pihak manajemen dapat saja terpicu melakukan tindakan yang akan meningkatkan laba jangka pendek, salah satunya dengan melakukan manipulasi laba.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang mengatakan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan pada laba jangka pendek (current earnings) (Porter (1992) dalam Boediono(2005)). Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusional dengan kepemilikan yang besar cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak minoritas (Pujiastuti, 2009). Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Boediono (2005) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Selain itu konsep dari Porter (dalam Pranata dan Mas'ud 2003) juga mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba pada laporan keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa good corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan manajerial secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,426 pada tingkat signifikansi 0,039 atau kepemilikan manajerial dengan signifikansi di bawah $\alpha=5\%$. Nilai koefisien menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif (0,426) dan signifikan ($0,039 < 0,05$), dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan yang berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi tingkat manajemen laba dan semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin rendah pula tingkat manajemen laba. Pengaruh positif yang dihasilkan dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen, sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat dikurangi.

Berbeda dari pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Alasan ditolaknya hipotesis yakni motivasi manajer yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial memiliki keuntungan dan kerugian bagi perusahaan secara umum. Kepemilikan saham oleh manajer cenderung mengurangi informasi yang asimetri kepada para pemegang saham. Dengan memanfaatkan kelebihan informasi yang dimiliki, manajer dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri salah satunya dengan melakukan tindakan manajemen laba.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba pada laporan keuangan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa good corporate governance yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen secara parsial

menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,161 pada tingkat signifikansi 0,375 atau proporsi dewan komisaris independen dengan signifikansi di atas $\alpha=5\%$. Nilai koefisien menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif (0,161) dan tidak signifikan ($0,375 > 0,05$), dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan yang berarti semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi tingkat manajemen laba. Alasan ditolaknya hipotesis yakni adanya mekanisme proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini belum bisa membatasi terjadinya praktik manajemen laba dikarenakan beberapa kondisi diantaranya koordinasi yang mungkin belum maksimal dan adanya pemilik yang lebih berkuasa menyebabkan tugasnya masih belum independen, serta pemenuhan mekanisme ini dimungkinkan hanya sebuah formalitas atau untuk dapat memenuhi regulasi saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Boediono (2005) yang membuktikan bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi penentu dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Namun, efektivitas pengawasan tergantung bagaimana komunikasi, koordinasi dan pembuatan keputusan. Penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono 2005).

Siregar dan Utama (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survey Asian Development Bank (dalam Boediono 2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak efektif. Sulistyanto (2008) menyebutkan bahwa kondisi di pasar modal Indonesia merupakan emerging market dengan ciri utama kepemilikan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu (closely held). Akibatnya, pemegang saham mayoritas mempunyai akses yang besar untuk mempengaruhi keputusan manajerial yang sering merugikan dan melanggar asas akuntabilitas dan keadilan pemegang saham minoritas.

Pengaruh leverage terhadap praktik manajemen laba pada laporan keuangan

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa leverage yang diproksi dengan debt to total asset ratio secara parsial menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dibuktikan dengan koefisien sebesar -0,363 pada tingkat signifikansi 0,022 atau leverage dengan signifikansi di bawah $\alpha=5\%$. Nilai koefisien menunjukkan leverage berpengaruh negatif (-0,363) dan signifikan ($0,022 < 0,05$), dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori debt covenant hypothesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (semakin ketat) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer menggunakan metode-metode akuntansi atau mengambil tindakan yang dapat meningkatkan laba.

Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan yang berarti semakin tinggi tingkat leverage maka semakin rendah tingkat manajemen laba dan semakin rendah leverage maka semakin tinggi tingkat manajemen laba.

Berbeda dari pernyataan tersebut hasil penelitian ini membuktikan bahwa justru dalam hal ini nampaknya jika tingkat kewajiban tinggi akan menjadikan pihak manajemen perusahaan menjadi lebih sulit dalam membuat prediksi jalannya perusahaan ke depan. Alasan ditolaknya hipotesis yakni semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh kreditur, sehingga fleksibilitas manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin berkurang. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akibat besarnya total hutang terhadap total aset akan

menghadapi resiko default yang tinggi yaitu perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tindakan manajemen laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindari default tersebut. Pemenuhan kewajiban harus tetap dilakukan dan tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Good Corporate Governance yang diwakili dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti ketika semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi praktik manajemen laba. Tingginya tingkat kepemilikan institusional berarti adanya kekuasaan oleh investor institusi yang dalam hal ini dapat mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, akibatnya manajer teras terikat untuk memenuhi target laba dari para investor tersebut, sehingga manajer akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manajemen laba.

Good Corporate Governance yang diwakili dengan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti ketika semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi praktik manajemen laba. Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, dengan memanfaatkan kelebihan informasi yang dimiliki, manajer dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri salah satunya dengan melakukan tindakan manajemen laba.

Good Corporate Governance yang diwakili dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti ketika semakin tinggi tingkat proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi praktik manajemen laba. Proporsi Dewan Komisaris Independen belum dapat membatasi adanya praktik manajemen laba dimungkinkan karena pemenuhan mekanisme ini hanya sebuah formalitas atau untuk dapat memenuhi regulasi saja.

Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat leverage maka semakin rendah tingkat manajemen laba. Tindakan manajemen laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindari default tersebut. Pemenuhan kewajiban harus tetap dilakukan dan tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2013. Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Manajemen Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antya, Nandana Nirbhita. 2014. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Governance Disclosure. *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Anwar, Yunita dan Martin Surya Mulyadi. 2012. Impact for Corporate Social Responsibility Toward Firm Value and Profitability. *The Business Review*.
- Aprilia, Hasmi. 2010. Indikasi Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil. *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Belkaoui, Riahi, Ahmed. 2007. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boediono, Gideon S.B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Brigham, Eugene dan Joel Houston. 2006. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

-
- Brown, Lawrence D. dan Marcus L. Caylor, 2004. Corporate Governance and Firm Performance. Working Paper. Georgia State University.
- Bursa Efek Indonesia. 2013. 2014. 2015. 2016. *Laporan Keuangan dan Tahunan*. www.idx.co.id. Diakses pada tanggal 21 April 2017.
- Cohen, Daniel A dan Paul Zarowin. 2008. Real and Accrual-Based Earnings Management in The Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. *The Accounting Review*.
- Dechow, Patricia M dan Sloan, R.G. 1996. Detecting Earnings Management, *The Accounting Review*.
- Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press.
- Fauziyah, Nuriyatun. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Seri Tata Kelola (Corporate Governance)*. Jilid II. www.fcgi.org.id. Diakses tanggal 21 April 2017.
- Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Gunny, Katherine. 2005. What Are the Consequences of Real Earnings Management?. Working Paper. Berkeley: University of California.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ketujuh. Penerbit Undip. Semarang.
- Healy, P dan Wahlen J. 1999. A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizon*.
- Herdian, Christopher Henry. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Free Cash Flow dan Leverage terhadap Manajemen Laba. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Horne, Van James dan John M. Wachowicz. 2005. *Financial Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jao, Robert dan Gagaring Pagulung. 2011. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Kausalty, P. R dan T. Mohan. 2013. Corporate Governance Model Around The World. *Global Research Analysis*.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt dan Teery D. Warfield. 2007. *Accounting Principles*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kompas. 2015. OJK Berharap Banyak Perusahaan RI Penuhi Kriteria "Good Corporate Governance" ASEAN. Kompas, 17 November 2015.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. www.governance-indonesia.or.id/. Diakses tanggal 21 April 2017.
- Lande, Adriani, Imam Subekti dan Endang Mardiaty. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kecakapan Manajerial, dan Rasio Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Mahariana, I Dewa G. P dan I Wayan Ramantha. 2014. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Man, C. K. dan B. Wong. 2013. Corporate Governance and Earnings Management: A Survey. *The Journal of Applied Business Research*.
- Murhadi, W. R. 2009. Studi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Praktik Earning Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Nasution, Marihot dan Dobby Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- OECD (Economic Co-Operation and Development). 2004. Principles of Corporate Governance.
- Pranata Puspa, Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz. 2003. Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
-

-
- Pratiwi, Yudhitya Dian dan Wahyu Meiranto. 2013. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Earnings Management Melalui Manipulasi Aktivitas Riil. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Puspatriisnanti, Tifani dan Fitriany. 2014. Analisis Hubungan Manajemen Laba dan Fraud Dalam Laporan Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Rahmawati, Hikmah Is'ada. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal*. Semarang.
- Roychowdhury, S. 2006. Earnings Management Through Real Activities Manipulation, *Journal of Accounting and Economics*.
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory*. Sixth Edition. Canada: Person Prentice Hall.
- Siallagan, Hamonangan dan Mas'ud Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Siregar, Sylvia Veronica N.P dan Siddharta Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Sulistyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba: Teori Dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Susiana dan Arleen Herawaty. 2007. Analisa Pengaruh Indepedensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Ujiyantho, Arif Muh. dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Vafeas, Nikos. 2000. Board Structure and Informativeness of Earnings, *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Watts, Ross L. dan J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Widowati, Nungki. 2009. Pengaruh Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Wulandari, Rahmita. 2013. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Manajemen Laba. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Zang, Amy Y. 2007. Evidence on the Trade-off between Real Manipulation and Accrual Manipulation. Working Paper. Duke University.

The perception of individual taxpayers against the intention of using e-form services

Tapi Omas Annisa¹, Noorlailie Soewarno², Isnalita³

Faculty of Economics and Business, Airlangga University.

¹Email: tapi.omas.annisa.2017@feb.unair.ac.id

²Email: noorlailie.s@feb.unair.ac.id

³Email: isnalita@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to examine the perception of individual taxpayers against the intention of using e-form services. This research uses UTAUT model which is based on 4 main constructs which are Performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating condition. Methods of data collection using online or manual questionnaires. The sample of research is individual taxpayers as much as 100 respondents. Data analysis using Structure Equation Model with Smart PLS 3.0 software. The results showed that Performance expectancy, effort expectancy, and social influence have no significant relationship whereas facilitating condition has a significant relationship.

Keywords: Utaut; tax system

INTRODUCTION

The development of information technology gives influence to the taxation system in Indonesia. This can be proved by the emergence of various online tax services. Online tax services provide simplicity and simplicity to its users, providing a new perspective regarding the development of tax administration that follows the times. According to Mustapha and Obid (2015), there are various factors that influence online tax system. There are tax service quality and perceived ease of use on the online tax sytem. So far in Indonesia, online tax services are tax payments and online tax reporting. Online tax reporting can be done using the e-filling system. E-filling is a tax reporting done without having to report to the tax service office that can be accessed on the website of the Directorate General of Taxation. Implementation of e-filling has been proclaimed by the government since 2012 and is required in the year as of April 2018. In its development e-filling provides ease of taxpayers private individuals and corporate taxpayers to report it taxation obligations. Especially with the mandatory use of e-filling in 2018, this makes taxpayers switch from manual tax reporting to online tax reporting. Due to the large number of online users, the deadline for submission of SPT server errors often occurs causing the use of e-filling is disrupted which of course this has an impact on the time of submission of tax reporting. Some Taxpayers who should report online must eventually report manually.

In response to this e-filling problem, the Directorate General of Taxation provides another alternative to the server error problem when submitting the Notice Letter (SPT), especially the Annual Tax Return. One of the alternatives with e-form issued. Electronic Form (e-form) is Notice Letter of Annual reporting in a way without being online (offline). Submission of SPT by filling out an electronic form with XFDL extension. The form can be opened on a Windows PC or Mac using the viewer application and the Taxpayer will just fill out the form and upload it directly from the form. The advantage of using e-form is if the e-filing, taxpayers must always connect the internet network then the contents on the e-form should not be connected to the internet, the user simply connect the internet only when will take the form and at upload only. E-filing sometimes runs slowly when many taxpayers will report the SPT. As for e-SPT users, users must install e-SPT apps as many types of taxes to report. So the e-form comes as an alternative where 1 viewer can be used to fill various electronic forms of various types of taxes, and the filled form looks similar to the hardcopy / SPT form of SPT.

e-form is a relatively new policy because it was issued in early 2017. So in this case, researchers want to know how the perception of Individual Taxpayer against the intention to use e-form service. In measuring how the taxpayer intentions of individual researchers using the model of UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) according to Venkatesh, et al (2003), where in theory there are 4 main constructs in measuring intention to use (behavior intention to use). The four main constructs are Performance expectancy, effort expectation, social influence and facilitating conditions. 4 The main construct represents how the behavior of intent to use a service.

This study refers to research according to Bhuasiri et al., (2016), which discusses how user acceptance of e-government services in Thailand. This research also uses UTAUT model which consists of various constructs (perceived autonomy, perceived competence, Performance expectancy, effort expectancy, perceived risk, perceived credibility, facilitating conditions, social influence). But the difference, in this study only focus on 4 main constructs in order to explain more simply and easily understood. This study also refers to Nam (2014), which discusses the usefulness of e-government services.

Other than that, the study that discuss e-government referred to (Belanger, and Carter, 2008). This study also explains the usefulness of e-government services but in this study adding variables Trust Of Internet (TOI). The other study that explain e-government The study also refers to (Kurfah et al., 2017) which discusses the adoption of e-government services in Turkey, the study uses the UTAUT Model focusing not only on the 4 main constructs of the UTAUT model but also adding to the Trust in Internet and Trust to Government.

The other study refers to Fu et al., (2006), which discusses the factors affecting the taxpayers' intention to adopt a particular tax-filing method (from manual, two-dimensional barcode, or Internet) based on empirical data gathered from a large-scale nationwide survey. Other than that, the study discussing tax system is referred to Azmi et al., (2012). The study refers to Mustapha and Obid, (2015) which also discusses tax service quality. This study discusses uses the technology acceptance model to understand how perceived risk and its facets influence the adoption behavior of consumers.

Literature review

The study according to Bhuasiri et al., (2016), discusses how user acceptance of e-government services in Thailand. This research also uses UTAUT model which consists of various constructs (perceived autonomy, perceived competence, Performance expectancy, effort expectancy, perceived risk, perceived credibility, facilitating conditions, social influence). But the difference, in this study only focus on 4 main constructs in order to explain more simply and easily understood. The study Kurfalı et al., (2017), discusses the adoption of e-government services in Turkey, using the UTAUT Model focusing not only on the four main constructs of the UTAUT model but also adding to the Trust in Internet and Trust to Government constructs. This study also related, Ling et al., (2014) which discusses using the UTAUT Model for utilising the exists between the expected and the actual citizen participation in the Malaysia's e-Filling Taxation Systems (e-FTS).

UTAUT model

The UTAUT model is a model of technological acceptance developed by the Model (Venkatesh et al., 2003) combined from the previous eight theoretical model of acceptance of the most important technology defined above. The UTAUT construction is determined by reviewing and refining these eight models in order to understand intentions as dependent variables, Venkatesh et al., (2003).

Performance expectancy

Venkatesh et al., (2003), defines Performance Expectancy as the level at which a person believes using the system will help the person to gain performance gains on the job. Performance expectations are defined in this study as the level at which a citizen believes that using government online services is more useful, useful and practical than traditional government services. Therefore, users who expect technology such as information systems will improve performance are more likely to adopt the introduced technology, Lim Ai Ling (2014).

H1: Performance expectancy has a positive relationship with the intention to use e-form

Effort expectancy

Effort expectancy is the level of ease of use of the system that will reduce the effort (energy and time) of individuals in doing their work. The variables are formulated based on 3 constructs on the previous model or theory of perceived easy of use (PEOU) of the TAM model, the complexity of the model of PC utilization (MPCU), and the ease of use of the diffusion theory of innovation, Venkatesh et al., (2003).

H2: Effort expectancy has a positive relationship with the intention to use e-form

Social influence

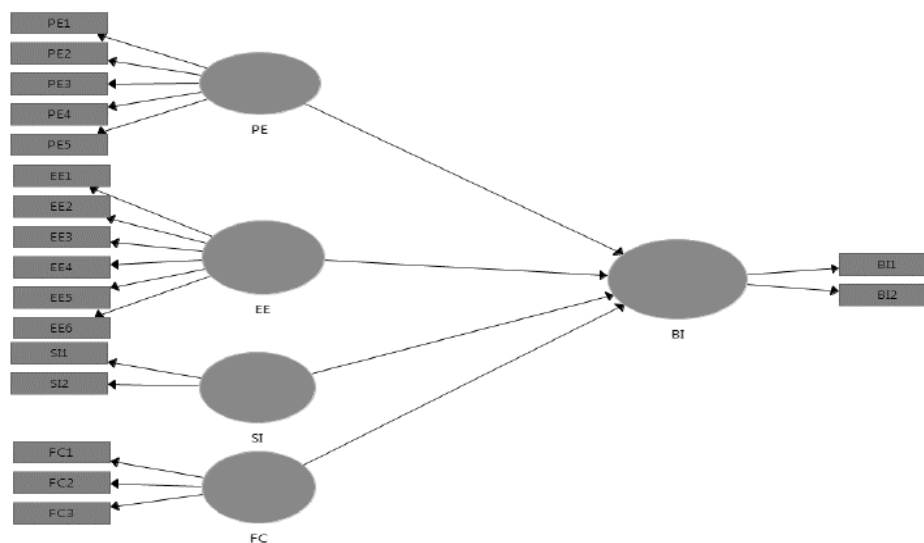
Social Influence is defined as the extent to which an individual perceives interests believed by others who will influence it using the new system. Social influence is a determinant of behavioral goals in using information technology represented as subjective norms in TRA, TAM, TPB, social factors in MPCU, and image in innovation diffusion theory (IDT), Venkatesh et al., (2003).

H3: Social Influence has a positive relationship with the intention to use e-form

Facilitating conditions

Facilitating Conditions are defined as the extent to which one believes that organizational and technical infrastructure is available to support the system, Venkatesh (2003). The main purpose of facilitating the condition is to remove barriers to use. In other words, the conditions that facilitate are measured by perception to be able to access the resources needed to gain knowledge and skills and the necessary support needed to use the system, Ling et al., (2014).

H4: Facilitating Condition has a positive relationship with the intention to use e-form



Picture 1. Construct model

METHODE

Methods of data collection using an online questionnaire (Google Form) or manual. In this case, the questionnaire is addressed to respondents who are categorized as Individual Taxpayers. Individual taxpayers in question consists of various circles such as Students, Workers in Government Institutions or Private, or Entrepreneurs. From the results of data collection, the respondents obtained as many as 100 respondents.

Exogenous variables used include performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions. In addition, the exogenous variable is the intention to use e-form (Behavioral Intention to Use). Data analysis using PLS (Partial Least Square) used to test the model and the hypothesis. PLS is a model SEM (Structure Equation Model) that can analyze various constructs and used in small and medium samples. Using SEM was used to further analyze the data and to design a theoretical model predicting the individual's intention to adopt e-services, Horst et al., (2007). PLS software used is Smart PLS version 3.0.

RESULTS AND DISCUSSION

Descriptive statistic

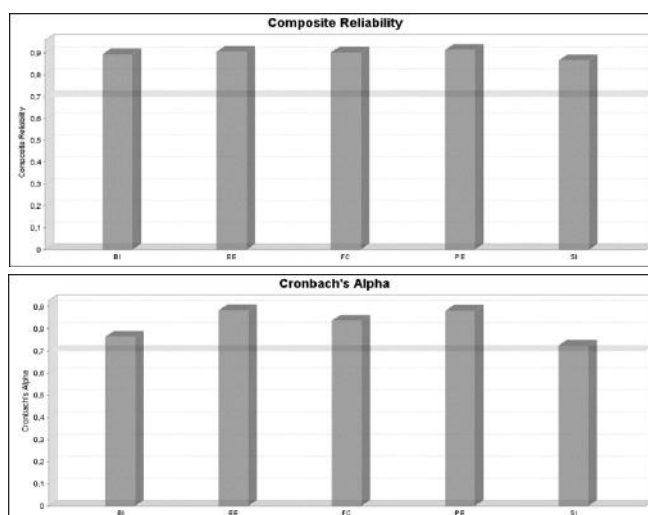
Tabel 1. Demographic

| Gender | | Frequent |
|------------|--|----------|
| | M | 55 |
| | F | 45 |
| Age | | |
| | 20-25 | 48 |
| | 26-30 | 26 |
| | <31 | 26 |
| Occupation | | |
| | Students | 20 |
| | Workers in government institution or private | 65 |
| | Entrepreneurs | 7 |
| | Others | 7 |

Based on the above table can be explained the respondents as much as 100 respondents with the details of respondents with gender Men as many as 55 respondents and Women as many as 45 respondents. Respondents in the age range 20-25 years as many as 48 respondents, respondents in the 26-30 years age range of 26 people and respondents in the age range above 31 years as many as 26 people. While respondents who work as a student as much as 20 respondents, respondents who work in private institutions or government as much as 65 respondents, respondents who work as entrepreneur as many as 7 people and respondents working others by 7 respondents.

Reability

In assessing the reliability of the structure model it is tested using Cronbach Alfa and Composite Realibility test.



Tabel 2. Cronbach alfa & composite realibility

Based on the above table we get the value of Cronbach Alfa and Composite Realibility above the tolerance value of 0.7 so that the structure model is declared realibel.

R square

R Square is used to assess how much influence the independent variable to the dependent variable.

| | R Square | R Square Adjusted |
|----|----------|-------------------|
| BI | 0.214 | 0.181 |

Picture 3. R Square

Based on the picture above obtained R Square value of 0.214 or 21% which means the BI variable can be explained by independent variables of 21% and the rest influenced by variables outside the study.

Hyphotesis test

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O /STDEV) | P Values |
|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| EE -> BI | -0.235 | -0.152 | 0.172 | 1.366 | 0.173 |
| FC -> BI | 0.355 | 0.314 | 0.125 | 2.842 | 0.005 |
| PE -> BI | 0.218 | 0.211 | 0.156 | 1.395 | 0.164 |
| SI -> BI | 0.199 | 0.172 | 0.124 | 1.608 | 0.108 |

Picture 3. hyphotesis test result

Based on the value of the original sample obtained the value of EE variable is negative (-0.235) so that the EE variable has a negative influence on the BI variable. While the original value of sample at variable of FC, PE, SI have positive value (0,355; 0,218; 0,199) so that variable of FC, PE, and SI have positive influence to BI variable.

Based on the value on t statistics obtained results that the value of variables EE, PE, and SI have no significant effect because the value of t arithmetic < t table that is equal to 1.661 so that H1, H2 and H3 rejected. While the FC variable has a significant influence because the value of t arithmetic > 1.661 so that H4 accept, Mustapha and Obid (2015).

The results show that the Facilitating Condition variable has a significant positive effect on the intention to use e-Form Services. While other variables have an insignificant influence. E-form is a new policy so many people who do not know what e-form function itself. This can be seen in the insignificant influence on the variables PE, EE, and SI. PE or Performance expectancy defines Performance Expectancy as the level at which a person believes by using the system will help the person to gain performance gains on the job, Venkatesh (2003). So if you see an insignificant results indicate that the use of e-form services still can't be perceived benefits or usefulness by individual taxpayers.

Variable effort expectations is a level of ease of use system that will be able to reduce the effort (energy and time) of individuals in doing their work. In this case, the results obtained are insignificant indicating that the use of e-form service has not been reflected as a service that facilitates the use of an individual taxpayer.

The Social Influence Variable is defined as the extent to which an individual perceives the interests that are trusted by others who will influence it using the new system. In this case, the results show insignificant results indicating that the e-form service is not yet known by many people so there are not many individuals who recommend using e-form services.

The Facilitating Condition variable is defined as the extent to which one believes that organizational and technical infrastructure is available to support the system, Venkatesh (2003). In this case, the results indicate a significant influence which means the e-form service can support the user's computer system and sufficient knowledge to use e-form services.

CONCLUSION

This study examines the influence of individual taxpayer perception on intention to use e-form. In this research use UTAUT model in explaining user intention to use a system. 4 main constructs used include Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence and Facilitating Condition. The four main constructs may explain the perception of individual taxpayers as the intention to use e-form services.

The result shows that Performance expectancy, effort expectancy and social influence have positive and insignificant influence on intention of using e-form. This is because e-form is a relatively new tax reporting service so it has not received special attention by individual taxpayer for usability and ease of use e-form. In addition, the lack of recommendations from people closest to using e-forms makes the constructs of social influence have insignificant results. However, in the Facilitating Condition construct the results show that there is a positive and significant influence on the intention to use e-form. This shows that the e-form service provides facilities to be used on any computer system (windows/Mac) as well as this e-form service requires special skills in operating it and the availability of tutorials on the website of the Directorate General of Taxes can be easily reached by the users.

Future research is expected to explain other variables outside the study such as considering from the side of Perceived of Risk or Trust of Government because this research is limited to 4 main constructs in UTAUT model.

REFERENCES

- Azmi, A. A. C., et al. 2012. Perceived Risk and the Adoption of Tax E-Filing. *World Applied Sciences Journal*, 20, 532-539.
- Belanger, F., and Carter, L. 2008. Trust and risk in e-government adoption. *Journal Of Strategic Information System*, 17, 165-176.
- Bhuasiri, W., et al. 2016. User Acceptance of e-government Services: Examining an e-tax Filing and Payment System in Thailand. *Information Technology for Development*.
- Fu, J. R., et al. 2006. Acceptance of electronic tax filling: A study of taxpayer intentions. *Information & Management*, 43, 109-126.
- Horst, M., et al. 2007. Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in The Netherlands. *Computers in Human Behavior*, 23, 1838-1852.

-
- Kurfah, M., et al. 2017. Adoption of e-government services in Turkey. *Computers in Human Behavior*, 66, 168-178.
- Ling, L. A., et al. 2014. The Influence of e-Participation on e-Filing Participation: A Study of Citizen Adoption e-Government Services. *International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT)*, 3(5), 251-260.
- Mustapha, B., and Obid, S. N. B. S. 2015. Tax Service Quality: The Mediating Effect Of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 172, 2-9.
- Nam, T. 2014. Determining the type of e-government use. *Government Information Quartely*, 31, 211-220.
- Venkatesh, V., et al. 2003. User Acceptance of Information Technology : Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478.

Analisis perencanaan laba pada perusahaan daerah air minum

Yurisna¹, Anis Rachma Utary², Iskandar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: yurisna@feb.unmul.ac.id

²Email: anis.rachma.utary@feb.unmul.ac.id

³Email: iskandar@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui tingkat pendapatan yang harus dihasilkan PDAM Tirta Kencana untuk memenuhi target laba yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka terkait dengan data pendapatan, biaya operasional, kondisi umum dan kinerja pada PDAM Tirta Kencana Samarinda. Sedangkan sumber data pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Untuk proyeksi laba tahun 2018 pada PDAM Tirta Kencana yang besaran laba 30% adalah sebesar Rp 162.247.013.450; PDAM Tirta Kencana Samarinda akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp. 245.658.248.353,58, pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016, akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp.238.416.274.174,91. Untuk tahun 2017, akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp. 242.384.553.922,32; Rasio Contribution Margin sebesar 0,57 atau 57% yang berarti bahwa penghasilan pendapatan akan menyebabkan kontribusi untuk biaya tetap sebesar 57% di tahun 2015, Rasio Contribution Margin sebesar 0,59 atau 59% yang berarti bahwa penghasilan pendapatan akan menyebabkan kontribusi untuk biaya tetap sebesar 59% ditahun 2016, sedangkan Rasio Contribution Margin-nya sebesar 0,67 atau 67% yang berarti bahwa penghasilan pendapatan akan menyebabkan kontribusi untuk biaya tetap sebesar 67% ditahun 2017

Kata Kunci: Pdam; bep; margin kontribusi; laba

Analysis of earnings planning in regional water companies

Abstract

The purpose of this study is to analyze and determine the level of income that must be produced by PDAM Tirta Kencana to meet the specified profit target. The type of data used in this study is quantitative data, namely data in the form of numbers related to income data, operating costs, general conditions and performance at PDAM Tirta Kencana Samarinda. While the data sources in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used in this study is field research and library research. The results of the research that have been carried out are as follows: For the projection of earnings in 2018 in PDAM Tirta Kencana, the amount of profit of 30% is IDR 162,247,013,450; PDAM Tirta Kencana Samarinda will experience a break even point on revenues of Rp. 245,658,248,353.58, in 2015 while in 2016, there will be a break even point on income of Rp.238,416,274,174.91. For 2017, you will experience a break even point on income of Rp. 242,384,553,922.32; Contribution Margin ratio of 0.57 or 57%, which means that income income will cause contributions to fixed costs of 57% in 2015, Contribution Margin ratio of 0.59 or 59%, which means that income income will cause contributions to costs remains at 59% in 2016, while the Contribution Margin ratio is 0.67 or 67%, which means that income income will cause a contribution to fixed costs of 67% in 2017.

Keywords: Pdam; bep; contribution margin; profit

PENDAHULUAN

Pengelolaan bisnis di era mendatang menuntut kemampuan yang adaptif dari pelaku bisnis. Hal ini disebabkan begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia usaha dan hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti persaingan global dan regulasi pemerintahan.

Perusahaan harus sanggup menawarkan produk atau jasa yang berkualitas karena mutu produk atau kualitas pelayanan yang diterima konsumen saat ini belum tentu diterima sesuai dengan yang diharapkan. Zeithaml et al (1990), menyampaikan adanya suatu batasan atau kesenjangan karena adanya perbedaan persepsi jika kualitas layanan tersebut tidak diramu dengan baik yaitu penggabungan antara jasa pemberi jasa dengan pengguna jasa.

Dalam peraturan tentang otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) terkandung beberapa prinsip di mana peran pemerintah daerah tingkat II sebagai daerah yang memiliki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan semakin berarti dimana prinsip ini memandang bahwa setiap daerah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah daerah/ kota kemudian memperoleh kewenangan untuk menambah atau mengelola potensi sumber daya alamnya dan diantaranya berupa sumber daya air. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kebijakan teknis operasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan bahwa landasan daya saing usaha pengelolaan air adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar yang berbasis sumber daya alam dan komoditas yang ada.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan akan air bersih juga mengalami peningkatan, selain karena tingginya pertumbuhan penduduk peningkatan kebutuhan air bersih disebabkan karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memiliki aneka kegiatan yang pasti berhubungan dengan penggunaan air bersih.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi taraf hidup rakyat adalah dengan cara melakukan pembangunan yang terarah, statis, berkembang dan dinamis dengan kondisi masyarakat yang lebih maju dan siap menghadapi era globalisasi.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional yang terprogram adalah peningkatan sarana air bersih, baik dalam pelayanan, kualitas, kesehatan maupun penyediaan air bersih secara merata kepada semua lapisan masyarakat

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air dan sekaligus melakukan penjualan dan distribusi air bersih kepada masyarakat di Kota Samarinda. Saat ini terdapat sekitar 137.255 pelanggan PDAM Tirta Kencana Samarinda di mana pelayanan sudah mencakup 90% dari penduduk Kota Samarinda. Berikut ini merupakan biaya beban PDAM Tirta Kencana Samarinda Tahun 2014 seperti kelompok sosial iuran perbulan Rp 8,500, kelompok dasar I iuran perbulan Rp 9,500, kelompok dasar II iuran perbulan Rp 10,000, kelompok dasar III iuran perbulan Rp 10,500, kelompok penuh I iuran perbulan Rp 13,500, kelompok penuh II iuran perbulan Rp 18,500, kelompok penuh III iuran perbulan Rp 28,500, kelompok penuh IV iuran perbulan Rp 38,500.

DPRD Kota Samarinda telah menyetujui pemberlakuan kenaikan tarif PDAM Tirta Kencana pada tahun 2016 dengan tujuan menyelamatkan perusahaan daerah itu dari kerugian yang semakin besar setelah delapan tahun tidak mengalami kenaikan.

Selain faktor tersebut di atas, faktor faktor lain seperti kenaikan biaya, mulai biaya operasional, biaya kimia, listrik dan lainnya juga menjadikan kewajiban tarif harus disesuaikan. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Laba PDAM Tirta Kencana Samarinda

METODE

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu seperti biaya gaji, biaya penyusutan, biaya kantor, biaya sewa, biaya pemeliharaan

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabel seperti biaya obat air, biaya bahan kimia, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan peralatan

Contribution margin atau laba marginal merupakan selisih antara pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel. Contribution Margin dihitung dengan cara mengurangi biaya variabel, baik produksi maupun non-produksi, dari penjualan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sangat potensial untuk di kembangkan sehingga dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar.

Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut

Analisis deskriptif bersifat eksploratif, berupaya menelusuri dan mengungkapkan struktur dan pola data tanpa mengaitkan secara kaku asumsi-asumsi tertentu. Analisis deskriptif digunakan agar penelitian tidak hanya terbatas pada data statistik yang bersifat kaku dan selain itu agar penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang menarik. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai karakteristik pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat.

Menurut Herjanto (2008), Penerapan Break Even Point (BEP) dapat dilakukan apabila biaya tersebut dipisahkan dalam dua bagian yaitu Biaya Tetap (Fixed Cost / FC) dan Biaya Variabel (Variable Cost / VC). Secara sederhana adalah sebagai berikut:

$$BEP = \frac{FC}{1 - \left(\frac{VC}{S}\right)}$$

artinya berapa nilai penjualan (dalam satuan uang) yang dapat menutupi seluruh biaya yang terjadi.

Dimana:

FC : total fixed cost (total biaya tetap)

VC : variable cost per unit untuk jenis produk atau pelanggan

S : Penjualan

Perencanaan laba

Analisis perencanaan laba merupakan kelanjutan dari analisis titik impas (break even point) dalam rangka merencanakan laba, maka kita harus menentukan seberapa besar laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan, Garrison (2006).

Laba = Total Pendapatan – (Biaya variabel + Biaya Tetap)

Contribution margin

Contribution margin adalah jumlah yang tersisa dari penjualan (pendapatan) dikurangi dengan biaya variable. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. Jika tidak cukup menutup biaya tetap, maka akan mengalami kerugian, Halim dan bambang (2005).

Analisis Contribution Margin dan rasionya pada periode Tahun 2017 sebagai berikut:

$$CMR = 1 - \frac{VC}{S}$$

CMR : Contribution Margin Ratio

S : Penjualan (pendapatan)

VC : Biaya Variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2015 PDAM Tirta Kencana Samarinda memiliki biaya variabel sebesar 96.342.099.472, pada tahun 2016 biaya variabel PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 102.218.934.371, sedangkan pada tahun 2017 biaya variabel PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 104.506.195.491 dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi biaya variabel pdam tirta kencana samarinda tahun 2015-2017

| Keterangan | Tahun | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Biaya Listrik | 46.251.113.658 | 39.170.078.606 | 39.484.968.494 |
| Biaya Bahan Kimia | 13.889.380.055 | 15.864.970.015 | 19.777.826.365 |
| Biaya Pembelian Air Curah | 18.781.287.720 | 21.548.914.171 | 22.429.602.680 |
| Biaya Pemeliharaan | 16.654.047.011 | 24.911.211.709 | 22.734.072.402,50 |
| Biaya Air Baku | 766.271.028 | 723.759.870 | 793.725.550,00 |
| Total | 96.342.099.472 | 102.218.934.371 | 104.506.195.491 |

Sumber: PDAM tirta kencana samarinda, (2018).

Pada tahun 2015 PDAM Tirta Kencana Samarinda memiliki biaya tetap sebesar 140.642.046.578, pada tahun 2016 biaya tetap PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 140.781.832.637, sedangkan pada tahun 2017 biaya tetap PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 162.021.038.555 dengan klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi biaya tetap pdam tirta kencana samarinda tahun 2015-2017

| Keterangan | Tahun | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Biaya Pegawai | 71.440.851.583 | 71.095.461.422 | 89.349.446.838 |
| Biaya Pinjaman | 843.001.384 | - | - |
| Biaya Penyisihan Piutang | 3.051.323.478,11 | 4.968.270.527 | 4.572.306.142 |
| Biaya Penyusutan | 45.874.809.310 | 47.593.762.870 | 48.102.521.709 |
| Biaya Oprasional Lainnya | 19.432.060.822 | 17.124.337.817 | 19.996.763.866 |
| Total | 140.642.046.578 | 140.781.832.637 | 162.021.038.555 |

Pada tahun 2015 PDAM Tirta Kencana Samarinda memiliki pendapatan sebesar 225.367.429.017, pada tahun 2016 pendapatan PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 249.611.275.480, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan PDAM Tirta Kencana Samarinda sebesar 315.165.338.083, dengan klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 3. Klasifikasi pendapatan pdam tirta kencana samarinda tahun 2015-2017

| Keterangan | Tahun | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pendapatan Penjualan Air | 182.450.131.224 | 209.122.505.037 | 270.837.071.423 |
| Pendapatan Penjualan Non-Air | 42.917.297.793 | 40.488.770.443 | 44.328.266.660 |
| Total Pendapatan Usaha | 225.367.429.017 | 249.611.275.480 | 315.165.338.083 |

Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dimana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi/laba, neraca, kas dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran (budget) hanyalah merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam nilai uang atau satuan kuantitatif lainnya. Perencanaan laba ditujukan kepada sasaran akhir organisasi perusahaan sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti.

Analisis perencanaan laba merupakan kelanjutan dari analisis titik impas (break even point) dalam rangka merencanakan laba, maka kita harus menentukan seberapa besar laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Dalam analisis ini target laba yang ingin diperoleh ditentukan sebesar 30%. Penentuan tarif 30% ini adalah hasil dari perencanaan kenaikan tarif pada tahun 2016 yang direncanakan oleh PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda, maka untuk mengetahui besarnya rencana laba dilakukan analisis perencanaan laba dengan pendekatan yang berkaitan dengan analisis break even point yang diformulasikan, Garrison (2006).

$$\text{Laba} = \text{Total Pendapatan} - (\text{Biaya variabel} + \text{Biaya Tetap})$$

Analisis *contribution margin*

Contribution margin adalah jumlah yang tersisa dari penjualan (pendapatan) dikurangi dengan biaya variabel. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. Jika tidak cukup menutup biaya tetap, maka akan mengalami kerugian. Halim dan bambang, (2005).

Analisis Contribution Margin dan rasionya pada periode Tahun 2015-2017 sebagai berikut:

$$CMR = 1 - \frac{VC}{S}$$

Tabel 4. Perhitungan *Contribution Margin*

| Keterangan | Tahun | | |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pendapatan | 225.367.429.017 | 249.611.275.4380 | 315.165.338.083 |
| Biaya Variabel | 96.342.099.472 | 102.218.934.371 | 104.506.195.491 |
| CMR | 129.025.329.544 | 147.392.341.109 | 210.659.142.591 |

Tahun 2017

Dimana:

$$CM = 315.165.338.083 - 104.506.195.491$$

$$CM = 210.659.142.591$$

$$CMR = 1 - \frac{104.506.195.491}{315.165.338.083}$$

$$CMR = 1 - 0,33$$

$$CMR = 0,67$$

Analisis *break even point*

Analisis titik impas (*break even point*) akan memberikan informasi mengenai hubungan antara volume penjualan (pendapatan) dan keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan tingkat penjualan (pendapatan) yang dilakukan pada periode tertentu. Selain itu dapat kita ketahui pula pada posisi bagaimana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, dalam hal ini total biaya yang dikeluarkan perusahaan baik itu biaya variabel maupun biaya tetap sama dengan total penjualan perusahaan.

Analisis *break event point* dapat dilakukan dengan pendekatan matematis, yakni pendekatan berdasarkan unit dan rupiah. Informasi atau data yang dibutuhkan adalah data pendapatan, harga jual per unit, biaya variabel, biaya variabel per unit, dan biaya tetap. Herjanto (2008), berikut adalah persamaannya:

$$BEP(Rupiah) = \frac{FC}{1 - \left(\frac{VC}{S}\right)}$$

Artinya berapa nilai penjualan (dalam satuan uang) yang dapat menutupi seluruh biaya yang terjadi.

Dimana:

FC : Total fixed cost (total biaya tetap)

VC : Variable cost per unit untuk jenis produk atau pelanggan

S : Penjualan

Tahun 2017

$$BEP(Rupiah) = \frac{162.021.038.556,39}{1 - \left(\frac{104.506.195.491,93}{315.201.338.083,43}\right)}$$

$$BEP(Rupiah) = \frac{162.021.038.556,39}{1 - (0,33)}$$

$$BEP(Rupiah) = \frac{162.021.038.556,39}{0,67}$$

$$BEP(Rupiah) = Rp \ 242.384.553.922,32$$

Berdasarkan hasil perhitungan Tahun 2017, diperoleh informasi bahwa perusahaan akan mengalami *break even* pada pendapatan sebesar Rp. 242.384.553.922,32

Analisis perencanaan laba

Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dimana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi-laba, neraca, kas dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran (*budget*) hanyalah merupakan suatu

rencana yang dinyatakan dalam nilai uang atau satuan kuantitatif lainnya. Perencanaan laba ditunjukkan kepada sasaran akhir organisasi dan bermanfaat sebagai pedoman untuk, memepertahankan arah kegiatan yang pasti.

Dalam rangka merencanakan laba, maka kita harus menentukan seberapa besar laba yang ingin diperoleh perusahaan.

Perencanaan laba tahun 2018

$$\text{Laba} = 315.165.338.083 - 266.527.234.048$$

$$\text{Laba} = 48.638.104.035,11$$

Untuk mencari target laba tahun 2018 maka PDAM Tirta Kencana Menaikan laba laba 30% , laba tersebut didapat dari pendapatan tahun 2017. Berikut ini adalah perhitungan kenaikan laba 30%

$$\text{laba } 30\% = \frac{48.638.104.035 \times 100}{30}$$

$$\text{Laba} = 14.591.431.210$$

$$\text{Target Laba} = \text{laba tahun 2017} + \text{kenaikan laba } 30\% \text{ tahun 2017}$$

$$\text{Target Laba 2018} = 48.683.104.035 + 14.591.431.210$$

$$\text{Target laba} = 63.229.535.245$$

Berdasarkan hasil analisis di atas, untuk kenaikan laba yang direncanakan sebesar 30% adalah sebesar Rp. 14.591.431.210 sedangkan untuk target laba pada tahun 2018 sebesar Rp 63.229.535.245.

Untuk perhitungan perencanaan pendapatan PDAM tirta kencana tahun 2018 dapat diketahui dari perhitungan berikut:

$$S = \frac{\text{biaya tetap} + \text{target laba 2018}}{CM}$$

$$S = \frac{162.021.038.555 + 63.229.535.245}{0,67}$$

$$S = \frac{225.250.573.800}{0,67}$$

$$S = 336.194.886.269$$

Seperti yang terlihat dari perhitungan di atas perencanaan pendapatan tahun 2018 adalah sebesar Rp 336.194.886.269, pendapatan tersebut didapat dari biaya tetap Rp 162.021.038.555 ditambah dengan taget laba Rp 63.229.535.245 kemudian dibagi dengan contribution margin sebesar 0,67 dan dari perhitungan tersebut didapatkan perencanaan pendapatan untuk tahun 2018.

Contribution Margin pada Tahun 2017 sebesar Rp. 210.695.142.591,50 dimana nilai tersebut diperoleh dari selisih antara pendapatan Rp. 315.201.338.083 dengan Rp. 104.506.195.491 sebagai biaya variable. Rasio Contribution Margin-nya sebesar 0,67 atau 67% berarti bahwa penghasilan pendapatan akan menyebabkan kontribusi untuk biaya tetap sebesar 67% atau bagian dari hasil pendapatan yang akan digunakan untuk menutupi biaya tetap yakni 67%.

Untuk kenaikan laba tahun 2017 yaitu sebesar 30% adalah Rp Rp. 14.591.431.210. hasil perhitungan ini bersumber dari pendapatan tahun 2017 serta biaya-biaya yang ada di tahun 2017, perencanaan ini bertujuan untuk merencanakan target laba untuk tahun 2018 yang akan menjadi tolak ukur untuk perencanaan pendapatan di tahun 2018.

Target laba tahun 2018 adalah sebesar Rp 63.229.535.245, perhitungan ini didapat dari hasil kenaikan laba 30% dari pendapatan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 14.591.431.210, ditambah dengan laba tahun 2017 yaitu sebesar Rp 48.638.104.035. setelah mendapatkan hasil dari target laba tahun 2018 maka dapat dihitung perencanaan pendapatan untuk tahun 2018. Dimana hasil perencanaan pendapatan tahun 2018 bersumber dari biaya tetap tahun 2017 yaitu sebesar Rp 162.021.038.555 ditambah dengan target laba 2018 sebesar Rp 63.229.535.245 dan dibagi dengan contribution margin tahun 2017 sebesar 0,67. Maka didapatkan hasil perencanaan pendapatan PDAM Tirta Kencana untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp 336.194.886.269

SIMPULAN

PDAM Tirta Kencana Samarinda akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp. 245.658.248.353,58, pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016, akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp.238.416.274.174,91. Untuk tahun 2017, akan mengalami break even point pada pendapatan sebesar Rp. 242.384.553.922,32.

Rasio Contribution Margin-nya sebesar 0,67 atau 67% yang berarti bahwa penghasilan pendapatan akan menyebabkan kontribusi untuk biaya tetap sebesar 67% ditahun 2017.

perencanaan pendapatan tahun 2018 adalah sebesar Rp 336.194.886.269, pendapatan tersebut didapat dari biaya tetap Rp 162.021.038.555 ditambah dengan target laba Rp 63.229.535.245 kemudian dibagi dengan contribution margin sebesar 0,67.

DAFTAR PUSTAKA

- A Parasuraman, valarie A. Zeithmal, Leornard L. Berry, 1990, "Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectations" (The Free Press).
- Armila Krisna Warindrani. 2006. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2009. Akuntansi Biaya. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Effendi Sofian. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Kusumawardani, Arum. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Leong, K, C., 2004, The Essence of Asset Management, Published by UNDP, Kuala Lumpur.
- McCarthy, Jerome, E.; Perreault, William D, 2003. Dasar-dasar Pemasaran, Edisi kelima, alih Bahasa: Agus Darma. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- Putra, Nugraha Agung Eka. 2012. Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Sunaryo dan Waluyo. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air, Konsep dan Penerapan. Cetakan Pertama Bayumedia Publishing. Malang
- Supriyono. 2011. Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, Buku 1 Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Does family firm have better performance? empirical research in indonesia smes

Ratna Purnama Sari¹, Shinta Suryaningrum², Dekeng Setyo Budiarto³

Universitas PGRI Yogyakarta

¹Email: ratnaps@upy.ac.id

²Email: shinta.surya94@gmail.com

³Email: dekengsb@upy.ac.id

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) have an essential and strategic role in national economic development. SMEs are proven to be resistant to the financial crisis and absorb part of the workforce in Indonesia. This study examines whether SMEs family firm and diversification have better performance. The research sample was 114 SMEs owners in the Special Region of Yogyakarta. The results of the study prove that SMEs family firm and SMEs that diversify have better performance. The results of this study are expected to provide advice to SMEs owners that family businesses can be expanded through diversification to increase business value.

Keywords: Family ownership; diversification; SMEs performance

INTRODUCTION

Small and Medium Enterprises (SMEs) have an essential position, especially in economic growth throughout Indonesia. Most companies in Indonesia are micro and small enterprises. SMEs play a role in driving the pace of economic growth after the monetary crisis that occurred in the period 1997 to 1998 when large companies experienced difficulties in developing their businesses. Only the SMEs sector remains strong and contributes revenues significantly to it and to the State of Indonesia, Suci (2017).

Based on the type of the owner, SMEs ownership mostly has similarity if compare to the large companies. It can be categorized into two types, namely family and non-family firm. Family ownership can be described by either purely family ownership or a combination between family and corporation. While non-family ownership usually described by single ownership or corporate ownership. The different types of SMEs ownership will impact on the differentiation of strategy, risk management, decision making and performance achievement, Sunarjanto, Roida, & Christiana, (2013).

This study will examine the relationship between family ownership, diversification, and SME performance. This study examines family ownership because the majority of SMEs are owned and managed by families. Family firm especially SMEs, the roles of which can be seen both directly and indirectly. Direct involvement can be seen by the participation of family members in business planning, while indirect involvement can be seen by the proportion of ownership in the capital participation, Tjantoko (2014).

The importance of family involvement is not the only reason to survive, expand market share and increase competitiveness, SMEs can diversify their business to realize it (Baptista, Karaöz, & Leitão, 2012). Business diversification is an effort to expand the business by increasing the number of segments either by adding business units or expanding business units or increasing the market share that has been owned and developing a variety of products (Sumendap, Tommy, & Maramis, 2018). In terms of business dynamics, entrepreneurs in small industries usually diversify their business in terms of raw materials and production output. Business diversification in SMEs can be divided into two types, the stable diversification which do the same diversification like the previous business and the unstable diversification, Hamid & Susilo, (2011). In the family business, second-generation successors tend to expand family businesses through diversification to increase business value, Weng & Chi, (2019).

Many research has attempted to link the performance of SMEs with other variables such as information technology, Chang, Yen, Ng, & Chang, (2012); Budiarto, Prabowo, & Herawan, (2017), accounting Ismail & King, (2014), Ediraras, (2011); human resource competency, Dubihlela & Rundora, (2014); Ardiana, Brahmayanti, & Subaedi, (2010); Entrepreneurial orientation and business networking capabilities, Keh, Nguyen, & Ng, (2007); Lukiastuti, (2012); Enterpreneur Keh et al., (2007); Naranjo-Valencia, Calderón-Hernández, Jiménez-Jiménez, & Sanz-Valle, (2018); Sari, (2014). Although research on the performance of SMEs has been extensively studied, this research is still interesting because: First, the successfull of family businesses, especially in SMEs, can be measured through strategic policies, one of them is diversification Weng & Chi, (2019). Second, work commitments from family members are higher than non-families in contributing to the economic's growth, Gozali, (2014). Third, when compared to other countries, the performance of SMEs in Indonesia is still low (Tahi Hamonangan Tambunan, (2011). Fourth, most of Indonesian SMEs run their business traditionally with low productivity levels T. Hamonangan Tambunan (2011); McKague et al., (2011).

Literature review

SMEs

Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia have different meanings. According to Indonesian Law Number 20/2008 about Small and Medium Enterprises, the definition of SMEs is a productive businesses owned by individuals or business entities that have met the requirements of small businesses. The requirements for SMEs are having less than 50 million net assets, less than 300 million turnover for micro businesses and less than 500 million for small businesses. The Central Bureau of Statistics provides the definition of SMEs based on the number of workers in each category. For small businesses are a kind of business entities that have 5 to 19 employees, while medium companies are business entities that have 20 to 99 employees.

Family ownership

Companies that are purely owned by the public only exist in several major countries, in developing countries including Indonesia, most companies are owned by their family. A family company is a company consisting of 2 or more family members who oversee the company's finances (De Pontet, Aronoff, Mendoza, & Ward, 2012). It said to be a family firms if the family dominates the equity or management and control (Kraus, Pohjola, & Koponen, 2012). The reason is the family is one of the crucial factors in business because of the social capital. Another factor that drives the success of a family business is the support of an information network built by family members. Many SMEs, especially owned by families, put their family members to the top management position, while employees who are not family members put in the bottom level of management. It has an aim to ensure the business continuity (Gozali, 2014).

Diversification

Business diversification is a form of business development by expanding the number of segments both business and geographical. Companies can also do diversification by increasing their existing market share or developing various products (Sumendap et al., 2018). The diversification strategy used by company is likely can increase the complexity of the problem, especially in the structure of ownership and control of the organization. The complexity of these problems causes businesses that have a lot of diversifications face a higher risk of failure. However, many companies continue to diversify because they already have large capital with higher income levels which predicted before (Lucyanda & Wardhani, 2017).

SMEs performance

Organizational performance is an accumulation of the performance of all members in the organization and is a means for companies in the process towards corporate goals. There are 4 leading causes of low production of small and medium enterprises in Indonesia: 1) Nearly 60% of small businesses still use traditional technology; 2) Market share tends to decrease due to the lack of capital, weak technology and managerial; 3) Most small businesses are unable to meet administrative requirements to obtain assistance from the Bank; 4) The level of dependence on government facilities still huge. SMEs that succeed in overcoming the above problems are likely to have an excellent or positive performance, but those who do not realize will experience negative performance. Positive performance means the company can achieve its objectives, while negative performance suggests that the company cannot meet its objectives (Ardiana et al., 2010; Purnomo & Lestari, 2010).

Hypothesis development

Family companies have control of company activities and can increase company value. Families who have large enough shares can do an interest that aims to reduce conflicts that occur so that it can increase the companies value (Anderson & Reeb, 2003). Family members resources can also reduce labor from outside the organization. Family ownership will encourage managers of family businesses to work better because the success of the strategies will contribute significantly to the success of the organization (Kim & Gao, 2013).

A family company has self-actualization, so the organization's manager will run his business correctly because he feels like the owner. In the family firms, the manager will have a variety of relevant information that will be announced to all parties to prevent asymmetry information between the owner and the manager as a family member. Family ownership will reduce moral hazard actions from managers who act deviate from the initial interests of the company. A concentrated family ownership will reduce fraud's tendencies committed by the manager so that the owner being helpful by its condition. Because of the family ownership, all corporate strategies can be controlled to minimize strategy errors/failures that have a negative impact on the company's performance (Anita, Kirmizi, & Savitri, 2018). Based on previous research findings, the following hypothesis is proposed:

H₁: SMEs family firms have better performance than non-family firms

SMEs can survive long in the environmental uncertainty by diversifying products, geographical markets or knowledge (Delbufalo, Poggesi, & Borra, 2016). Empirical evidence states that companies with a tremendous level of idle financial condition tend to choose diversified technology resources (Alliance, Acquisition) in response to poor innovative performance (Carnes, Xu, Sirmon, & Karadag, 2019; Choi, Lee, & Bae, 2019). Family firms may have significant effects on general strategic decisions

and diversified choices in particular such as product and geographical diversification (Muñoz-Bullón & Sanchez-Bueno, 2011).

The diversification strategy allows SMEs to exploit the company's ability to expand the company's core industry product lines, generate benefits from the business scope and create existing market opportunities (Pangboonyanon & Kalasin, 2018). Diversified companies have lower average capital costs than stand-alone companies (Hann, Ogneva, & Ozbas, 2013). Besides, diversified companies perform better (Shen, Au, & Yi, 2018). The hypotheses to be tested are as follows:

H₂: Diversified SMEs have better performance than non-diversified

METHOD

The population of this study is all active SMEs owner in the city of Yogyakarta in 2018. The sampling technique used is purposive sampling which are selected according to predetermined criteria. The criteria are:

Respondents (samples) are the SMEs owners/managers;

According to Indonesian's Law No. 20 of 2008, the number of employees are less than 10 for micro, less than 30 for small businesses and less than 300 to medium-sized firms.

There are 125 questionnaires were distributed, with 91.2% return rate. There are 114 returned questionnaires which could be used as research analysis.

Table 1. Description of Respondents

| | | Sleman | Kulon Progo | Gunung Kidul | Bantul | Yogyakarta | Total |
|---------------------|--------------------|--------|-------------|--------------|--------|------------|-------|
| Size | Micro | 20 | 27 | 22 | 22 | 13 | 84 |
| | Small | | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| | Medium | | | 1 | | 1 | 2 |
| Ownership | Non-family | 9 | 3 | 3 | 17 | 7 | 39 |
| | Family firms | 11 | 26 | 22 | 8 | 8 | 75 |
| Diversification | Diversified | 8 | 24 | 6 | 12 | 7 | 57 |
| | Not-diversified | 12 | 5 | 19 | 13 | 8 | 57 |
| Type of business | Retail | 2 | 8 | 21 | 12 | 8 | 51 |
| | Services | | 2 | 3 | | 2 | 7 |
| | Kraft | 1 | 4 | | 11 | 1 | 17 |
| | Food | 17 | 15 | 1 | 2 | 4 | 39 |
| Age of business | <3 years | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| | 4-10 years | 17 | 13 | 10 | 12 | 6 | 58 |
| | 11-20 years | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 23 |
| | >21 years | | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| Number of employees | <10 | 20 | 24 | 25 | 23 | 12 | 104 |
| | 11-30 | | 4 | 3 | 2 | | 9 |
| | 31-99 | | 1 | | | | 1 |
| Owners Education | Elementary school | 1 | 1 | 5 | 4 | | 11 |
| | Junior High shool | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| | Senior High school | 14 | 17 | 11 | 11 | 6 | 59 |
| | Bachelor | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 29 |

Variable measurement

The variables used in this study are the SMEs performance as measured by 6 question indicated: the way of business, profitability, success, growth, business development and market share (Radzi, Nor, & Ali, 2017). Respondents will answer six items of questions and measured by a Likert scale, with 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Family ownership is measured using categories, 1 for non-family firms and 2 for family firms (Chu, 2009). Diversification is measured using categories to indicate whether a company is diversified or not diversified. Type 1 is diversified firms and 2 for not diversified firms (Muñoz-Bullón & Sanchez-Bueno, 2011).

Table 2. Measurement of variables

| Variables | Definition | Measurement |
|------------------|--|---|
| SMEs ownership | Family companies run from one generation to the next (Morck & Yeung, 2004; Cahyani & Sanjaya, 2017) | Non-family firms Family firms (Chu, 2009) |
| Diversification | Business diversification is a form of business development by expanding the number of segments in business or developing various types of products (Sumendap et al., 2018) | Diversified Not-diversified (Muñoz-Bullón & Sanchez-Bueno, 2011) |
| SMEs performance | Performance is the result of work that can be achieved by a person or group of people in the organization and is a determining tool for achieving organizational goals (Ardiana et al., 2010) | The way of business Profitability Success Growth Business development Market share (Radzi et al., 2017) |

The test of instrument

Testing instruments in this study using validity and reliability tests. A valid questionnaire if the question in the survey can express something that will be measured by the questionnaire. Test the validity of using the Pearson correlation while the reliability test uses the Cronbach alpha (Ghozali, 2018).

Table 3. SMEs performance validity testing

| No | Instrument | Pearson correlation |
|----|--|---------------------|
| 1. | I am happy with the way my business is operated | 0.691** |
| 2. | I am satisfied with the growth of net income of the business | 0.756** |
| 3. | I consider my business as successful | 0.747** |
| 4. | I consider my business as growing | 0.771** |
| 5. | My business will continue to expand in the future | 0.729** |
| 6. | The company's market share is growing from year to year | 0.792** |

** significant < 1%

Reliability is a tool for measuring a questionnaire which is an indicator of a variable. A questionnaire is said to be reliable if a person's answer to a statement is consistent or stable over time. (Ghozali, 2018). The results of the reliability test of the SMEs performance have a Cronbach Alpha value of 0.787.

Hypothesis testing and discussion

The aim of testing both of hypotheses is to examines SMEs performance differences based on family ownership and diversification strategies.

Table 4. Independent-sample t-test of family ownership

| No | Instrument | Mean | | Lavene's test for equality of variances | P Value |
|----|--|-----------------|-------------|---|---------|
| | | Non-family firm | Family firm | | |
| 1 | I am happy with the way my business is operated | 0.423 | 0.431 | 0.015* | 0.554 |
| 2 | I am satisfied with the growth of net income of the business | 0.385 | 0.428 | 0.435 | 0.000** |
| 3 | I consider my business as successful | 0.359 | 0.413 | 0.457 | 0.001* |
| 4 | I consider my business as growing | 0.390 | 0.424 | 0.956 | 0.012* |
| 5 | My business will continue to expand in the future | 0.428 | 0.433 | 0.038* | 0.681 |
| 6 | The company's market share is growing from year to year | 0.387 | 0.424 | 0.184 | 0.020* |

* significant < 5% , ** significant < 1%

Based on table 4, it can be explained that family firms have a better performance than non-family firms. The most significant difference in instrument number 2 with an average value of 0.385 for non-family firms and 0.428 for family firms. The results of this study support previous research that family ownership has a strong motivation in conducting corporate supervision. Besides, the family workforce contributes more, and relatively little family capital compared to non-family companies that are comparable in improving company performance (Anita et al., 2018; Barbera & Moores, 2013)

Table 5. Independent-sample t-test of diversification

| No | Instrumen t | Mean | | <i>Lavene's test for equality of variances</i> | <i>P Value</i> |
|----|--|-------------|--------------------|--|----------------|
| | | Diversified | Not diversified | | |
| 1 | I am happy with the way my business is operated | 0.440 | 0.416 | 0.779 | 0.042* |
| 2 | I am satisfied with the growth of net income of the business | 0.428 | 0.398 | 0.147 | 0.006* |
| 3 | I consider my business as successful | 0.421 | 0.368 | 0.001* | 0.000** |
| 4 | I consider my business as growing | 0.433 | 0.391 | 0.720 | 0.001* |
| 5 | My business will continue to expand in the future | 0.449 | 0.414 | 0.577 | 0.003* |
| 6 | The company's market share is growing from year to year | 0.430 | 0.393 | 0.055 | 0.014* |

* significant < 5% ,** significant < 1%

Based on table 5, it can be explained that there are differences in performance based on diversification. Diversified companies have better performance than companies that are not diversified. In question number 3 about the success of a business in the future, the mean value of a diversified company is 0.421 higher than a non-diversified company. The results of this study state that family businesses can be expanded through diversification to increase business values, Weng & Chi, (2019).

CONCLUSION

Based on the results of data analysis conducted, it can be concluded that SMEs family firms and diversified SMEs have better performance. This study has several limitations; first, this study does not divide whether SMEs family firms are managed alone or run by others. The self-managed family business can be done by transferring embedded values as a family culture, but differences in managerial mindset between the first generation and the next generation can be prolonged conflicts within the family, Simanjuntak, (2011). Second, this study does not consider succession based on generations. Given the second generation is more aggressive in pursuing diversification strategies to reduce uncertainty in the economic environment, Weng & Chi, (2019). Third, this study does not test the type of diversification whether it is still one line or different from the primary business. Companies that run a business diversification strategy with multi-segments have lower excess value than companies that only have one business line so that they have not provided optimal results on company performance, Kurniasari & Tahun, (2013).

REFERENCES

- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. *The journal of finance*, 58(3), 1301-1328.
- Anita, A., Kirmizi, K., & Savitri, E. (2018). Pengaruh family ownership terhadap kinerja keuangan: strategi bisnis dan agency cost sebagai variabel moderating. *Jurnal Ekonomi*, 24(4), 1.
- Ardiana, I., Brahmayanti, I., & Subaedi, S. (2010). Kompetensi SDM UKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), 42-55.

-
- Baptista, R., Karaöz, M., & Leitão, J. (2012). Diversification and Survival of Young, Small Firms. *Small Firms (February 23, 2012)*.
- Barbera, F., & Moores, K. (2013). Firm ownership and productivity: a study of family and non-family SMEs. *Small Business Economics*, 40(4), 953-976.
- Budiarto, D. S., Prabowo, M. A., & Herawan, T. (2017). An integrated information system to support supply chain management & performance in SMEs. *Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM)*, 10(2), 373-387.
- Cahyani, K. A., & Sanjaya, I. P. S. (2017). Analisis Perbedaan Dividen Pada Perusahaan Keluarga dan Non Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Ultimat. *Modus Journals*, 26(2), 133-144.
- Carnes, C. M., Xu, K., Sirmon, D. G., & Karadag, R. (2019). How Competitive Action Mediates the Resource Slack–Performance Relationship: A Meta-Analytic Approach. *Journal of Management Studies*, 56(1), 57-90.
- Chang, S.-I., Yen, D. C., Ng, C. S.-P., & Chang, W.-T. (2012). An analysis of IT/IS outsourcing provider selection for small-and medium-sized enterprises in Taiwan. *Information & suManagement*, 49(5), 199-209.
- Choi, J.-D., Lee, J.-S., & Bae, Z.-T. (2019). When do firms focus on public research?: evidence from US medical device industry. *Industry and Innovation*, 1-23.
- Chu, W. (2009). The influence of family ownership on SME performance: evidence from public firms in Taiwan. *Small Business Economics*, 33(3), 353-373.
- De Pontet, S. B., Aronoff, C. E., Mendoza, D. S., & Ward, J. L. (2012). *Siblings and the family business: Making it work for business, the family, and the future*: Palgrave Macmillan.
- Delbufalo, E., Poggesi, S., & Borra, S. (2016). Diversification, family involvement and firm performance: empirical evidence from Italian manufacturing firms. *Journal of Management Development*, 35(5), 663-680.
- Dubihlela, J., & Rundora, R. (2014). Employee training, managerial commitment and the implementation of activity based costing; Impact on performance of SMEs. *The International Business & Economics Research Journal (Online)*, 13(1), 27.
- Ediraras, D. T. (2011). Akuntansi dan Kinerja UKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(2).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23.
- Gozali, J. (2014). Analisa Kinerja Bisnis Aspek Pemasaran dan Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Keluarga dan Perusahaan Non Keluarga di Jawa Timur. *Agora*, 2(2), 1419-1424.
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. (2011). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hann, R. N., Ogneva, M., & Ozbas, O. (2013). Corporate diversification and the cost of capital. *The journal of finance*, 68(5), 1961-1999.
- Ismail, N. A., & King, M. (2014). Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms. *Journal of Information Systems and Small Business*, 1(1-2), 1-20.
- Keh, H. T., Nguyen, T. T. M., & Ng, H. P. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. *Journal of business venturing*, 22(4), 592-611.
- Kim, Y., & Gao, F. Y. (2013). Does family involvement increase business performance? Family-longevity goals' moderating role in Chinese family firms. *Journal of Business Research*, 66(2), 265-274.
-

-
- Kraus, S., Pohjola, M., & Koponen, A. (2012). Innovation in family firms: an empirical analysis linking organizational and managerial innovation to corporate success. *Review of Managerial Science*, 6(3), 265-286.
- Kurniasari, S. E., & Tahun, E. T. (2013). Pengaruh Diversifikasi Usaha Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Kepemilikan Manajerial. *Semarang: Universitas Dian Nuswantoro*.
- Lucyanda, J., & Wardhani, R. H. K. (2017). Pengaruh diversifikasi dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan. *Media Riset Akuntansi*, 4(2), Hal. 1-23.
- Lukiastuti, F. (2012). Pengaruh orientasi wirausaha dan kapabilitas jejaring usaha terhadap peningkatan kinerja ukm dengan komitmen perilaku sebagai variabel intervening (Studi empiris pada sentra UKM batik di Sragen, Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 155-175.
- McKague, K., D. Wheeler, C. Cash, J. Comeault, E. Ray, and Tahi Hamonangan Tambunan. 2011. Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in Global Economy* 5 (1): 68-82.
- Morck, R., & Yeung, B. (2004). *Special issues relating to corporate governance and family control: The World Bank*.
- Muñoz-Bullón, F., & Sanchez-Bueno, M. J. (2011). Is there new evidence to show that product and international diversification influence SMEs' performance? *EuroMed Journal of Business*, 6(1), 63-76.
- Naranjo-Valencia, J. C., Calderón-Hernández, G., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2018). Entrepreneurship and innovation: Evidence in colombian SMEs *Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in SMEs* (pp. 294-316): IGI Global.
- Pangboonyanon, V., & Kalasin, K. (2018). The impact of within-industry diversification on firm performance: Empirical evidence from emerging ASEAN SMEs. *International Journal of Emerging Markets*, 13(6), 1475-1501.
- Purnomo, R., & Lestari, S. (2010). Pengaruh kepribadian, self-efficacy, dan locus of control terhadap persepsi kinerja usaha skala kecil dan menengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17(2).
- Radzi, K. M., Nor, M. N. M., & Ali, S. M. (2017). The Impact of Internal Factors on Small Business Success: A Case of Small Enterprises Under the Felda Scheme. *Asian Academy of Management Journal*, 22(1), 27.
- Sari, M. (2014). Enterpreneur terhadap Kinerja UKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Shen, N., Au, K., & Yi, L. (2018). Diversification Strategy, Ownership Structure, and Financial Crisis: Performance of Chinese Private Firms. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 47(1), 54-80.
- Simanjuntak, A. (2011). Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT). *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, 12(2), 113-120.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sumendap, R., Tommy, P., & Maramis, J. B. (2018). Analisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan diversifikasi segmen bisnis pada industri manufaktur yang go public. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Sunarjanto, N. A., Roida, H. Y., & Christiana, A. (2013). Analysis of the internationalization strategy of the engagement and ownership of family in east java with variable control of innovation, sales, and assets: Review of agency theory. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 2(1).
- Tahi Hamonangan Tambunan, T. (2011). Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 5(1), 68-82.
-

-
- Tjantoko, L. E. (2014). Hubungan Sumber Keuangan dan Budaya Bisnis Keluarga dengan Inovasi Produk. *Agora*, 2(2), 1489-1493.
- Weng, T.-C., & Chi, H.-Y. (2019). Family succession and business diversification: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 56-81.

